

Laporan

KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya

2025



**Interim
Triwulan II**





Ali Yudhi H., SF., Apt., MM
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Interim Triwulan 2 Tahun 2025 Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya dapat terselesaikan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pelayanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan 2 Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan 2 Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan ikhtisar yang menjelaskan dan menggambarkan secara terperinci, lengkap dan sistematis capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan 2 Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur. Dalam laporan kinerja BBPOM Di Palangka Raya Triwulan 2 Tahun 2025 tertuang indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja serta evaluasi dan analisis yang memadai tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan yang dapat menggambarkan pengukuran kinerja serta realisasi anggaran serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi baik internal maupun eksternal untuk perbaikan kinerja selanjutnya.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu wujud penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi kegiatan terhadap target capaian kinerja, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dan anggaran disertai analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan 2 Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja, untuk peningkatan kinerja BBPOM di Palangka Raya pada triwulan selanjutnya serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Palangka Raya, 21 April 2025
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya



Ali Yudhi H., S.F., Apt., M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dokumen Renstra BBPOM di Palangka Raya periode 2025-2029 telah ditetapkan tujuan strategis untuk periode 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi. Berikut adalah tujuan BBPOM di Palangka Raya untuk periode 2025-2029:

1. Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan, telah dirumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi
3. Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan publik UPT yang prima
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 mengacu pada Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029 dengan melaksanakan 22 kegiatan untuk mencapai 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 di triwulan II ini capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Palangka Raya adalah **104.87** dengan Predikat NKO **Istimewa**. Dari 25 indikator kinerja, 19 indikator kinerja dapat diukur pada triwulan I, dan 6 indikator kinerja diukur pada akhir tahun. Sembilan belas indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 103.59% dengan kriteria Sangat Baik.
2. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 115.58% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 100.00% dengan kriteria Baik.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 108,58 % dengan kriteria Sangat Baik.
5. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder **berhasil tercapai** dengan capaian 100,31 % dengan kriteria Sangat Baik.
6. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 114,94% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

7. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 108,80 % dengan kriteria Sangat Baik.
8. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 134,34% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
9. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 112,50% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
10. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 113,55 % dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
11. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
12. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **berhasil tercapai** dengan capaian 106,06% dengan kriteria Sangat Baik.
13. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 105,38% dengan kriteria Sangat Baik
14. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan **berhasil tercapai** dengan capaian 142,86% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
15. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
16. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas **berhasil tercapai** dengan capaian 114,29% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
17. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan **berhasil tercapai** dengan capaian 102,18 % dengan kriteria Sangat Baik.
18. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT **belum berhasil tercapai** dengan capaian 87,71% dengan kriteria Cukup.
19. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

Enam indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT.
3. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
4. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM.
5. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
6. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan 1 tahun 2025, dari 9 sasaran kegiatan, 7 sasaran kegiatan dapat diukur, dan 2 sasaran kegiatan diukur pada akhir tahun. Tujuh sasaran kegiatan yang dapat diukur, 6 kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 1 kegiatan belum berhasil mencapai target. Tujuh sasaran kegiatan yang dapat diukur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai**, dengan capaian 111.22% yang diukur dengan 11 indikator. Satu indikator diukur pada akhir tahun, 10 indikator dapat diukur. Dari 10 indikator yang dapat diukur, 4 indikator dapat dicapai

- dengan kriteria sangat baik, 1 indikator tercapai dengan kriteria Baik, 5 indikator dapat dicapai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi **berhasil tercapai** dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.
 3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 106.06% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 115.63% yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, 1 indikator tercapai dengan kriteria baik, dan 2 Indikator dengan capaian tidak dapat disimpulkan
 5. Sasaran Kegiatan Kelima, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu **berhasil tercapai** dengan capaian 102.18% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT **tidak berhasil tercapai** dengan capaian 87.71% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
 7. Sasaran Kegiatan Ketujuh, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif **berhasil tercapai** dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.

Dua Sasaran Kegiatan yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang prima.
2. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025, pagu yang dikelola pada triwulan I Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola menjadi Rp 14.035.291.000,-.

Pada tanggal 10 April 2025 usulan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 BPOM disetujui oleh Ditjen Anggaran BBPOM Palangka Raya mendapat relaksasi blokir anggaran senilai Rp 3.194.209.000,- pada akhir triwulan 2 tahun 2025 pagu yang dikelola Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 4.898.808.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 17.229.500.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2025 adalah Rp 4.303.472.442,- yang berarti 43% dari pagu awal dan 55.23% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi secara keseluruhan Tingkat Efisiensi BBPOM Palangka Raya adalah **1.08** dengan kriteria capaian **tidak efisien** yang berarti capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran.

Tahun 2025 sebagai tahun awal periode Renstra 2025-2029 dimana didalamnya terdapat perubahan dibandingkan dengan Renstra 202-2024 pada sisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis maupun indikatornya. Pada awal tahun 2025 dari sisi anggaran mengalami dinamika dimulai dengan terbitnya Surat Sekretaris Utama BPOM tentang Penyampaian Data Pembollikan dalam rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025 diikuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025. Pada akhir triwulan I terdapat revisi anggaran berdasarkan Surat Sekretaris utama tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 terhadap blokir belanja barang dan belanja modal. Atas dinamika pengelolaan anggaran tersebut yang mempengaruhi pencapaian sasaran kegiatan, terhadap beberapa tantangan yang dihadapi dan kelemahan yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya, beberapa upaya yang telah dilaksanakan adalah efisiensi dalam pengelolaan operasional perkantoran, dilakukannya pengaturan ulang titik lokus pengawasan Obat dan Makanan, dimanfaatkannya teknologi dalam pelayanan publik dikembangkan Inovasi Smart Laura di Mall Pelayanan Publik yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota, dilakukannya perubahan sistem kerja pegawai antara lain pembagian sistem kerja WFO dan WFH, dan pemanfaatan *co-working space*, serta dalam semua aspek operasional dilakukan digitalisasi salah satunya penciptaan dokumen elektronik (*paperless*). Dalam pelaksanaannya upaya ini efektif dan efisien berhasil mengatasi kendala yang dihadapi atas terbatasnya jumlah anggaran dan sumber daya manusia, hal ini dapat dibuktikan dari 16 indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan II, 16 indikator kinerja berhasil tercapai dan 1 indikator kinerja belum berhasil tercapai dengan kriteria cukup. Dan hasil Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Palangka Raya adalah 104.87 dengan Predikat NKO Istimewa.

Palangka Raya 21 Juli 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
Di Palangka Raya



Ali Yudhi Hartanto

Highlight Kinerja

1. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Upaya

Penguatan Pengawasan & Integritas Pegawai

Dampak



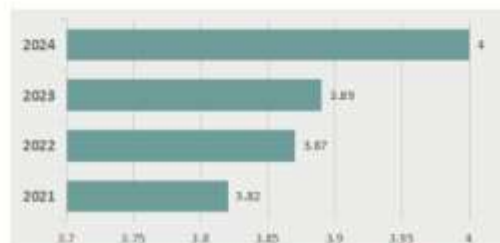
**Pencantuman
Antigratifikasi pada
footnote Surat Tugas**



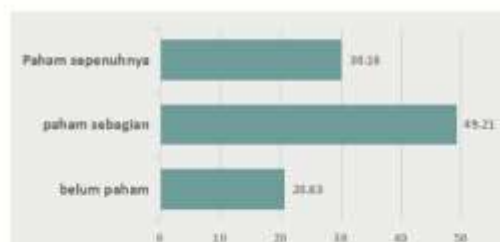
Sosialisasi Tolak Gratifikasi saat Apel Disiplin



Pelanggaran disiplin pegawai nihil



Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meningkat



Penilaian RB Tematik 79.37% paham

Penguatan Integritas Pegawai

Melalui Inovasi **BRANTAS TAKTIK** (Branding Logo Zona Integritas & Tolak Gratifikasi)

Brantas Taktik

"From Good Branding to Good Governance: Bangun Zona Integritas dan Cegah Gratifikasi melalui Implementasi BRANTAS TAKTIK"



Sistem Manajemen Anti Penyusapan

ISO 37001 : 2016

BBPOM di Palangka Raya telah meng-implementasikan SMAP dan tersertifikasi ISO 37001:2016 sejak 21 Desember 2023



CERTIFICATE

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DE PALANGKA RAYA

SNJ ISO 37001 : 2016



Stage of Migration

Previous: Settled, Government of Pakistan, Government of Sindh, Ministry of Planning, Public Works Department, Provincial Road Works, Public Administration



Document	2010-2011	2011-2012
Annual Report 2010-2011	100	100
Annual Report 2011-2012	100	100
Annual Report 2012-2013	100	100
Annual Report 2013-2014	100	100
Annual Report 2014-2015	100	100
Annual Report 2015-2016	100	100
Annual Report 2016-2017	100	100
Annual Report 2017-2018	100	100
Annual Report 2018-2019	100	100
Annual Report 2019-2020	100	100
Annual Report 2020-2021	100	100
Annual Report 2021-2022	100	100
Annual Report 2022-2023	100	100
Annual Report 2023-2024	100	100
Annual Report 2024-2025	100	100
Annual Report 2025-2026	100	100
Annual Report 2026-2027	100	100
Annual Report 2027-2028	100	100
Annual Report 2028-2029	100	100
Annual Report 2029-2030	100	100
Annual Report 2030-2031	100	100
Annual Report 2031-2032	100	100
Annual Report 2032-2033	100	100
Annual Report 2033-2034	100	100
Annual Report 2034-2035	100	100
Annual Report 2035-2036	100	100
Annual Report 2036-2037	100	100
Annual Report 2037-2038	100	100
Annual Report 2038-2039	100	100
Annual Report 2039-2040	100	100
Annual Report 2040-2041	100	100
Annual Report 2041-2042	100	100
Annual Report 2042-2043	100	100
Annual Report 2043-2044	100	100
Annual Report 2044-2045	100	100
Annual Report 2045-2046	100	100
Annual Report 2046-2047	100	100
Annual Report 2047-2048	100	100
Annual Report 2048-2049	100	100
Annual Report 2049-2050	100	100
Annual Report 2050-2051	100	100
Annual Report 2051-2052	100	100
Annual Report 2052-2053	100	100
Annual Report 2053-2054	100	100
Annual Report 2054-2055	100	100
Annual Report 2055-2056	100	100
Annual Report 2056-2057	100	100
Annual Report 2057-2058	100	100
Annual Report 2058-2059	100	100
Annual Report 2059-2060	100	100
Annual Report 2060-2061	100	100
Annual Report 2061-2062	100	100
Annual Report 2062-2063	100	100
Annual Report 2063-2064	100	100
Annual Report 2064-2065	100	100
Annual Report 2065-2066	100	100
Annual Report 2066-2067	100	100
Annual Report 2067-2068	100	100
Annual Report 2068-2069	100	100
Annual Report 2069-2070	100	100
Annual Report 2070-2071	100	100
Annual Report 2071-2072	100	100
Annual Report 2072-2073	100	100
Annual Report 2073-2074	100	100
Annual Report 2074-2075	100	100
Annual Report 2075-2076	100	100
Annual Report 2076-2077	100	100
Annual Report 2077-2078	100	100
Annual Report 2078-2079	100	100
Annual Report 2079-2080	100	100
Annual Report 2080-2081	100	100
Annual Report 2081-2082	100	100
Annual Report 2082-2083	100	100
Annual Report 2083-2084	100	100
Annual Report 2084-2085	100	100
Annual Report 2085-2086	100	100
Annual Report 2086-2087	100	100
Annual Report 2087-2088	100	100
Annual Report 2088-2089	100	100
Annual Report 2089-2090	100	100
Annual Report 2090-2091	100	100
Annual Report 2091-2092	100	100
Annual Report 2092-2093	100	100
Annual Report 2093-2094	100	100
Annual Report 2094-2095	100	100
Annual Report 2095-2096	100	100
Annual Report 2096-2097	100	100
Annual Report 2097-2098	100	100
Annual Report 2098-2099	100	100
Annual Report 2099-2100	100	100
Annual Report 2100-2101	100	100
Annual Report 2101-2102	100	100



RUANG LINGKUP ISO 37001 : 2016
BBPOM di Palangka Raya :

- Pelayanan Sertifikasi
- Layanan Informasi dan Pengaduan
- Pemeriksaan Sarana Rutin
- Sampling dan Pengujian Rutin
- Operasi Penindakan
- Pengujian Pihak Ketiga
- Serta Ketatausahaan

Highlight Kinerja

2a. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

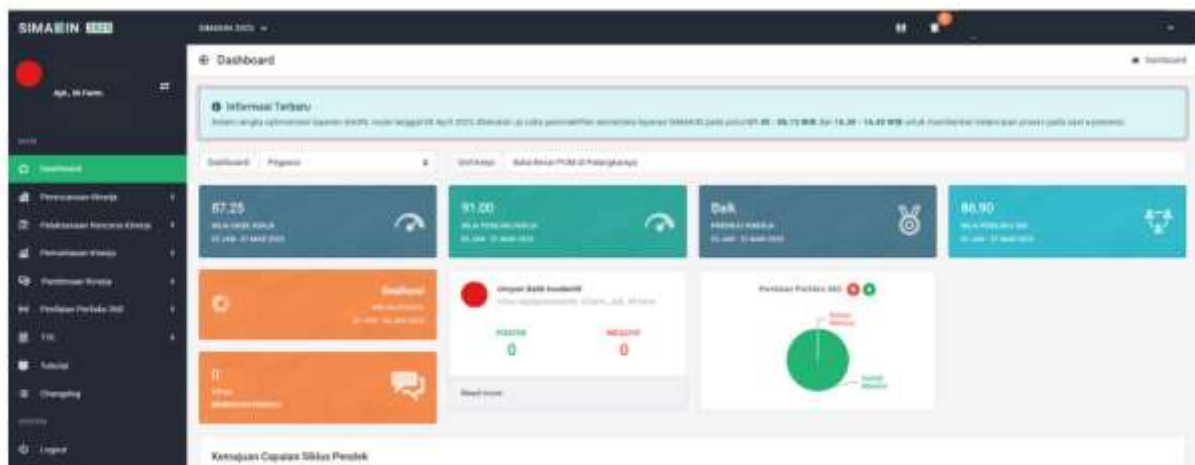


RINGKAS

Role Integration for Genuine Inat Goal Achievement System

“RINGKAS” merupakan inovasi manajemen kinerja pada pokja penguatan SDM

- **Role Integration :**
 - Menyederhanakan dan menyatukan peran/tugas individu
- **Genuine :**
 - Fokus pada hasil nyata dan relevan
- **Neat Goal Achievement :**
 - Proses yang rapi, efisien, dan terarah pada pencapaian kinerja
- **System :**
 - Mengarah pada pendekatan/platform terstruktur, bisa manual/digital



Tujuan dibuatnya Inovasi “RINGKAS” :

- Menyederhanakan jumlah Rencana Hasil Kerja (RHK) pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Unit dengan berfokus pada pengurangan jumlah RHK, penyederhanaan SKP, penguatan pengukuran berbasis kualitas pencapaian kinerja dengan tetap menjamin proses kegiatan pendukung terakomodir tertuang dalam kertas kerja SKP secara sistematis dan terukur



Highlight Kinerja

2b. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

Inovasi



- ✓ PERENCANAAN
- ✓ PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA
- ✓ KEUANGAN
- ✓ LAPKIN DAN LAPTAH PMPZI
- MANAJEMEN RESIKO
- SISTEM MANAJEMEN MUTU TERINTEGRASI
- SAKIP
- ✓ MATERI DAN PERATURAN
- SKP 2025



Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Capaian Kinerja

- Analisa Capaian Target Kinerja
- Identifikasi Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / Penurunan Kinerja
- Rekomendasi / Perbaikan
- Arahkan Pimpinan
- Rencana Aksi



NKO

Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di triwulan 1 tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO senilai 99,43% dari hasil rata-rata 16 Indikator kinerja yang dapat dinilai capaiannya di triwulan 1 tahun 2025 dengan predikat Baik.

MONELAKU menjadi inovasi penggerak / motor akuntabilitas, terhadap individu yang mendukung pencapaian kinerja organisasi diberikan apresiasi melalui **Inovasi BINTANG KINERJA**



Pemberian Reward and Punishment Kinerja tingkat individu

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

April – Mei 2025



BBPOM DI PALANGKA RAYA GELAR ADVOKASI PROGRAM TERPADU PRIORITAS NASIONAL SADAR PANGAN AMAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN LINTAS SEKTOR DI KOTA PALANGKA RAYA



Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya telah menyelenggarakan kegiatan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Program Terpadu Prioritas Nasional Sadar Pangan di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 April 2025, bertempat di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya. Kegiatan Advokasi ini merupakan tahap awal dari rangkaian pelaksanaan Program Terpadu Prioritas Nasional Sadar Pangan Aman, yang mencakup Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan budaya sadar pangan aman.



BBPOM PALANGKA RAYA GELAR BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DENGAN PENDEKATAN INKLUSIF BAGI KELOMPOK RENTAN



Jumat, 23 Mei 2025 BBPOM di Palangka Raya melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Kader Keamanan Pangan Kelompok Rentan & Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan bertempat Aula Tjilik Riwut Balai Besar POM di Palangka Raya. Kegiatan ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan yang inklusif dan prima serta peningkatan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman dan sehat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Sekolah Khusus di Kota Palangka Raya, Himpunan Mahasiswa Disabilitas Provinsi Kalteng, Rumah BUMN, Komunitas Teman Tuli, dan UMKM PMEFS. Peserta diberikan pengetahuan dasar mengenai cara memilih, mengolah, dan menyimpan pangan dengan aman, mengenali bahan berbahaya pada pangan, dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile.

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor Juni 2025



**TINJAU LAYANAN PUBLIK, ANGGOTA DPD RI KUNJUNGI
BOOTH BBPOM PALANGKA RAYA DI MAL PELAYANAN
PUBLIK HUMA BETANG KOTA PALANGKA RAYA**



Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau fasilitas pelayanan publik, Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Agustin Teras Narang, SH, MH, berkesempatan hadir mengunjungi di Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya pada Rabu, 11 Juni 2025. Kunjungan ini salah satunya bertujuan untuk menggali berbagai informasi terkait tantangan, hambatan, dan kebutuhan riil yang dihadapi penyelenggara layanan di lapangan. Kunjungan ini menjadi bagian dari program reses masa kegiatan 23 Mei sd 19 Juni 2025, dengan fokus pada pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada kunjungan ini turut didampingi Plt. Kepala DPMPTSP Kota Palangka Raya, Vallery Budianto, S.T., M.P.W.K. dan Kepala MPP Huma Betang, Pancar Fit, S.Kom.



**BANGUN GENERASI EMAS, BBPOM PALANGKA RAYA
BERKOLABORASI DENGAN DPKP KOTA PALANGKA RAYA
LAKUKAN SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DI SMPN 7
PALANGKA RAYA**



Anak Usia Sekolah merupakan penentu kualitas masa depan bangsa. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Generasi Emas melalui konsumsi pangan yang aman, BBPOM Palangka Raya bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palangka Raya melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran anak usia sekolah dalam cerdas memilih dan mengonsumsi pangan aman, bermutu dan bergizi seimbang di SMPN 7 Palangka Raya pada Kamis, 12 Juni 2025. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Palangka Raya, Langkis.

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Juni 2025



**BBPOM DI PALANGKA RAYA SOSIALISASIKAN
PENGENDALIAN AMR (ANTIMICROBIAL RESISTANCE)
KEPADA PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)**



Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan sosialisasi pengendalian AMR (Anti Microbial Resistance) kepada pimpinan dan penanggung jawab PBF yang ada di Kota Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 bertempat di Aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Ketua PD IAI Kalimantan Tengah Guntur Satria Pratomo. Pada kegiatan ini, Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto menyampaikan bahwa jika AMR tidak dikendalikan secara nyata maka akan menjadi "silent killer" untuk penderita penyakit infeksi. Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya adalah mendorong Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerbitkan surat edaran larangan penjualan antibiotik tanpa resep dokter.



**GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK, BBPOM PALANGKA
RAYA HIMPUN SARAN MASUKAN LINTAS SEKTOR
PENERIMA LAYANAN UNTUK PENINGKATAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK**



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara hybrid di Aula Tjilik Riwut Kantor BBPOM Palangka Raya dan melalui Zoom Meeting untuk menghimpun masukan dari berbagai lapisan masyarakat, pada tanggal 19 Juni 2025. Acara ini menghadirkan perwakilan Penyelenggara Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat, Pengguna Layanan, Ahli/Pakar dan akademisi, serta Media Massa. Forum Konsultasi Publik ini dibuka secara langsung oleh Kepala BBPOM Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto.

Highlight Kinerja

3. Penghargaan - penghargaan

**PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN RAIH
PERINGKAT III KAB/KOTA PANGAN AMAN TAHUN 2024**



Kepala BBPOM Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto SF, Apt., MM menyerahkan trophy dan sertifikat penghargaan Kota/Kabupaten Pangan Aman Tahun 2024 kepada Pemerintah Kab. Barito Selatan yang diterima secara langsung oleh Bupati Kab. Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri, ST., MM. Kab. Barito Selatan meraih peringkat Terbaik III Regional Tengah Timur dalam Penilaian Kab/Kota Pangan Aman Tahun 2024. Selamat atas prestasi gemilangnya untuk Pemerintah Kab. Barito Selatan



Highlight Kinerja

3. Penghargaan - penghargaan

RUNNER UP GREEN LABORATORY PADA GREEN LABORATORY FORUM AND AWARDS BADAN POM 2025 TINGKAT NASIONAL!

BBPOM di Palangka Raya Kembali Mengukir Prestasi Tingkat Nasional!

Selamat kepada seluruh tim atas pencapaian gemilang sebagai Runner UP Green Laboratory pada Green Laboratory Forum and Awards Badan POM 2025 Tingkat Nasional!

Kemenangan ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga semangat baru untuk terus menciptakan solusi ramah lingkungan. Mari jadikan setiap lab sebagai pelopor keberlanjutan! Selamat untuk semua!



Highlight Kinerja

3. Penghargaan - penghargaan

FUNGSI PENINDAKAN BBPOM DI PALANGKA RAYA MERAIH PRESTASI ANALIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN TERBAIK DAN PENGGALANGAN STAKEHOLDER TERBAIK KATEGORI UPT BALAI BESAR POM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
HIGHLIGHT KINERJA.....	8
DAFTAR ISI	17
DAFTAR GAMBAR	18
DAFTAR TABEL	19
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	21
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	21
1.3 Struktur Organisasi	23
1.4 Isu Strategis.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	32
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	32
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	34
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
2.5 Metode Pengukuran.....	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	47
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	156
3.3 Realisasi Anggaran.....	170
BAB IV PENUTUP	
Lampiran.....	191



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Organisasi	19
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya	20
Gambar 3. Visi dan Misi Badan POM RI Tahun 2025-2029	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Beban Kerja	21
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya	31
Tabel 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2024	33
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2023	35
Tabel 5 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2024 Triwulan III.....	222

BAB

1



Pendahuluan

- Latar Belakang
- Gambaran Umum Organisasi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I / Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu tujuan pembuatan Laporan Kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja memiliki manfaat diantaranya menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, objektif, akurat, dan transparan.

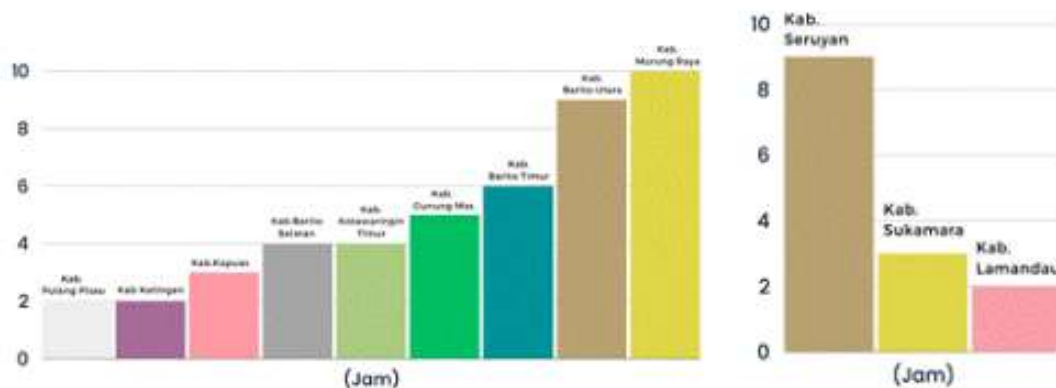
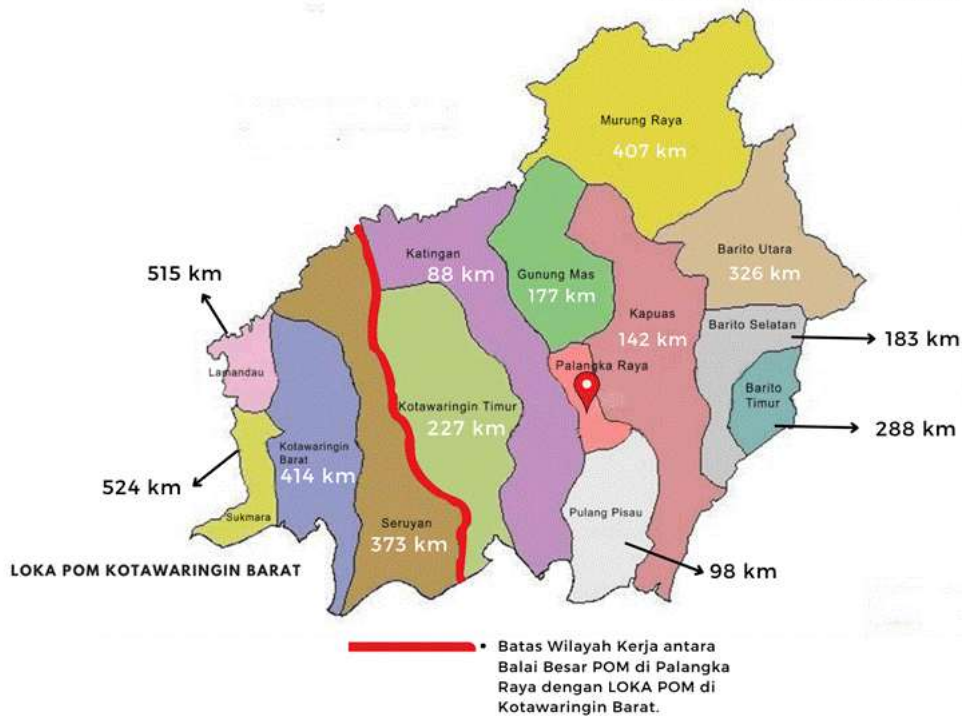
1.2 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut jumlah UPT BPOM terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. BBPOM di Palangka raya dengan cakupan pengawasan 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- b. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cakupan pengawasan 4 kabupaten/kota, yaitu

BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA



Sebagai UPT BPOM, BBPOM di Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala BBPOM di Palangka Raya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 11 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Palangka Raya yang mengawal pencapaian 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPT.

1.4 Isu Strategis

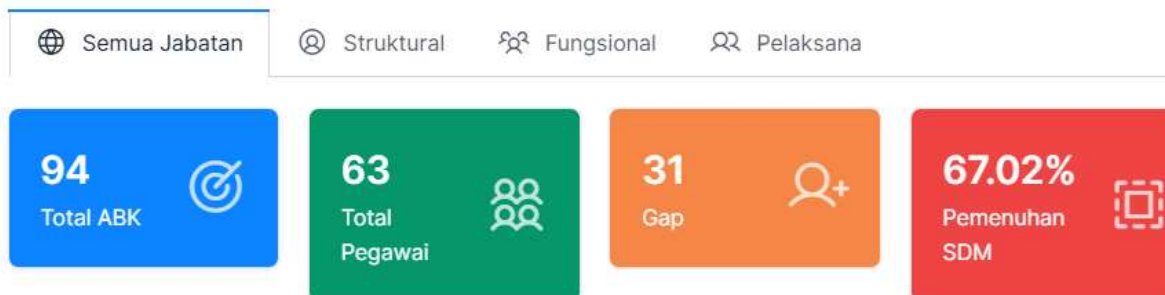
I. Sumber Daya Manusia

1). Jumlah SDM belum memadai

SDM Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan April 2025 sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang ASN yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang PPPK serta 7 (tujuh) orang PPNPN untuk memenuhi beban kerja 94 orang yang baru terpenuhi sebesar 67.02% dengan proporsi 77.36% perempuan dan 22.64% laki-laki. Jumlah SDM tersebut tentunya

belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dashboard - Balai Besar POM di Palangka Raya



ABK BBPOM di Palangka Raya berdasarkan SIREN (April, 2025)

No	Jabatan	Eksisting	ABK	GAP	Pemenuhan ABK
1	Struktural	1	2	-1	50,00
2	Fungsional Ketatausahaan	10	32	-22	31,25
3	Fungsional PFM	45	60	-15	75,00
4	Fungsional Umum	5	0	-	-
5	MPP (Pensiun per 1 Juni 2025)	1	0	-	-
6	Tubel (selesai Februari 2026)	1	0	-	-
		63	94	-38	67,02

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Palangka Raya memerlukan SDM sebanyak 94 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 31 orang. Perhitungan pemenuhan ABK 67,02% didapat dari pemenuhan ABK Struktural 50%, Fungsional Ketatausahaan 31,25% dan Fungsional PFM 75,00%. Selama 3 tahun ke depan, jumlah pegawai fungsi ketatausahaan akan berkurang sebanyak 5 orang. Pada tahun 2025, dari 63 orang pegawai, terdapat 1 orang pegawai yang memasuki masa purna tugas, namun dari 7 orang PPNP akan menambah jumlah SDM melalui jalur pengangkatan PPPK. Dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh fungsi ketatausahaan banyak dirangkap oleh personil yang ada pada fungsi-fungsi diluar jabatan fungsionalnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah akibat beban kinerja.

Selain jumlah pegawai, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Palangka Raya adalah S1 dan Profesi (apoteker). Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai organisasi yang scientific based perlu lebih banyak didukung SDM dengan Pendidikan S2 yang lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan jumlah SDM yang terbatas dan harus menjawab tantangan yang semakin kompleks Balai Besar POM di Palangka Raya harus terus meningkatkan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dengan peningkatan SDM, diharapkan Balai Besar POM di Palangka Raya akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin

kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

2). Kompetensi teknis belum merata

Seiring semakin menurunnya jumlah SDM dengan tantangan yang semakin kompleks, telah membatasi pola rotasi internal antar fungsi sehingga kompetensi teknis SDM belum merata di setiap jenjangnya, belum terpetakannya peta kompetensi SDM menjadi kendala dalam percepatan pemenuhan dan pemerataan kompetensi teknis. Kompetensi yang belum merata selain terjadi pada kompetensi teknis juga terdapat pada kompetensi manajerial.

II. Sumber Daya Anggaran

a. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dimana telah memasuki tahun kelima sejak pengalokasian perdananya di tahun 2020. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

DAK NF BPOM tahun 2024 diberikan kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang pengawalannya dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun anggaran DAK ini dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana.¹

b. DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya

Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor: SP.DIPA-063.01.2.432872/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 22.128.308.000-. Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025, telah dilakukan revisi anggaran melalui persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran sebanyak 6 kali dari DIPA awal sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025. Anggaran yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya menurut jenis belanja dan sumbernya dananya dalam mendukung pelaksanaan 2 program dengan rincian sebagai berikut:

Program	Sumber Dana	Jenis Belanja		
		51	52	53
3165	Rupiah Murni	-	5.135.346.000	5.646.990.000
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PNP	-	987.260.000	256.478.000
	Total	-	6.122.606.000	5.903.468.000
6384	Rupiah Murni	5.530.734.000	4.571.500.000	-
Grand Total	Rupiah Murni	5.530.734.000	9.706.846.000	5.646.990.000
	PNP	-	987.260.000	256.478.000
	Total	5.530.734.000	10.694.106.000	5.903.468.000
		22.128.308.000		

Anggaran Responsif Gender (ARG merupakan anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan.

Bila sebelumnya telah dikenal istilah anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Anggaran berbasis kinerja memiliki tiga nilai inti yakni Efficiency, Effectiveness dan Economy. Anggaran Responsif Gender melengkapi satu nilai inti lagi, yakni Equity. Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi anggapan yang kurang tepat, jika: ARG adalah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; ARG berarti alokasi anggaran 50% laki-laki dan 50% perempuan; adanya ARG berarti adanya penambahan anggaran yang dikhususkan untuk perempuan dan ARG hanya untuk kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.

III. Mesin/Perlengkapan

Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya, laboratorium pengujian memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Kecepatan dalam proses pengujian produk obat dan makanan sangat diharapkan agar dapat segera dilakukan tindak lanjut apabila ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat seperti dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang terkait sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal). Untuk itu Balai Besar POM di Palangka Raya terus melakukan peningkatan kapasitas maupun kapabilitas pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini Balai Besar POM di Palangka Raya telah didukung dengan instrument laboratorium teknologi kompleks seperti LC MSMS, GCMS dan real time PCR.

Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin pesatnya industri obat dan makanan, membawa perubahan yang cepat dan signifikan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi perubahan tersebut. Tantangan pengujian yang semakin kompleks berkaitan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan digitalisasi perdagangan memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis terkait kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan ketersediaan sarana dan prasarana dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengujian.

Keterbatasan dalam anggaran pengadaan alat laboratorium serta kebutuhan reagensia dan media yang diperlukan dalam proses pengujian menimbulkan gagasan konsep regionalisasi laboratorium. Regionalisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Laboratorium pengujian Badan POM. Melalui konsep regionalisasi BBPOM di Palangka Raya telah dilengkapi dengan instrumen mutakhir untuk mendukung pengujian parameter uji spesifik seperti LCMSMS dan GCMS, namun seiring dengan berubahnya konsep regionalisasi, untuk alat LC MSMS di pindahkan ke BBPOM di Samarinda sebagai Balai Unggulan di Region Samarinda untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian.

III. Metode

Konsep Regionalisasi Laboratorium

Pengujian merupakan tulang punggung pengawasan Obat dan Makanan BPOM, dimana hasil pengujian laboratorium menjadi landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan atas produk dibawah pengawasannya. Dalam rangka efisiensi dan memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan maka sejak tahun 2022 telah diterapkan sistem Regionalisasi Laboratorium yang kemudian disempurnakan pada tahun 2023 dengan konsep baru regionalisasi laboratorium.

Pada konsep baru Regionalisasi ini dilakukan pemusatan pengujian unggul di salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional pada setiap region. Terdapat total 8 (delapan) Laboratorium Regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap menjadi laboratorium dengan peralatan yang canggih dan menjadi rujukan bagi laboratorium anggota dalam region tersebut. Laboratorium Regional tersebut adalah : Laboratorium di BBPOM Medan, BBPOM Pekanbaru, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM Samarinda, BBPOM Makassar, BBPOM Manado dan terakhir adalah BBPOM di Jayapura. Dengan konsep regionalisasi ini maka penajaman perencanaan pengujian dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai.

Proses perubahan konsep regionalisasi dilakukan pada pertengahan pada tahun 2023 antara lain dengan pemindahan peralatan canggih yang selama ini tersebar ke Laboratorium Regional antara lain LC MS MS, DUSA, dan Isolator; peningkatan kompetensi dan jumlah analis sesuai beban kerjanya. Dengan perubahan menjadi Konsep baru Regionalisasi Laboratorium diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan makanan di seluruh pelosok negeri.

V. Lingkungan

Laboratorium Hijau merupakan sebuah konsep revolusioner dalam pengelolaan fasilitas laboratorium yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dengan praktik laboratorium modern. Konsep ini tidak sekadar tentang pengurangan dampak lingkungan, tetapi merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas laboratorium. Dalam implementasinya, Laboratorium Hijau mengedepankan tiga pilar utama, yaitu: (1) efisiensi penggunaan sumber daya, (2) minimalisasi dampak lingkungan, dan (3) penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Laboratorium mengkonsumsi energi besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan, dengan jejak karbon lima kali lebih besar dibanding ruang kantor biasa. Pedoman ini menawarkan pendekatan holistik, mencakup efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Selain mengurangi dampak lingkungan, konsep ini juga menghemat biaya operasional, meningkatkan kesehatan kerja, dan menciptakan lingkungan yang produktif.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi pondasi utama dalam konsep Laboratorium Hijau. Hal ini dimulai dari manajemen energi yang cerdas, di mana setiap aspek penggunaan energi direncanakan dan dikelola secara optimal. Sistem pencahayaan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami melalui desain arsitektur yang tepat, dikombinasikan dengan penggunaan lampu LED hemat energi yang dilengkapi sensor gerak. Zonasi pencahayaan diterapkan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap area kerja, dengan sistem kontrol otomatis berbasis waktu dan okupansi yang memastikan energi hanya digunakan saat diperlukan.

Pengelolaan suhu ruangan menjadi aspek kritis lainnya dalam efisiensi energi. Laboratorium Hijau mengimplementasikan sistem HVAC dengan teknologi inverter yang dapat menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan. Pengaturan suhu dilakukan secara optimal untuk berbagai area laboratorium, didukung oleh sistem insulasi yang efektif dan pemantauan suhu otomatis. Peralatan laboratorium dipilih dengan mempertimbangkan sertifikasi hemat energi, dan penggunaannya dijadwalkan untuk menghindari beban puncak. Program pemeliharaan preventif dilaksanakan secara rutin untuk menjaga efisiensi operasional peralatan.

Konservasi air menjadi fokus penting berikutnya dalam konsep Laboratorium Hijau. Implementasinya mencakup instalasi sistem daur ulang air, teknologi pengolahan air limbah yang efektif, dan sistem pemanenan air hujan. Praktik hemat air diterapkan dalam setiap aktivitas laboratorium, mulai dari prosedur pembersihan peralatan yang efisien hingga penggunaan air destilasi secara bijak. Program deteksi dan perbaikan kebocoran dilakukan secara rutin, didukung dengan pelatihan staf tentang pentingnya konservasi air.

Pengelolaan material dalam Laboratorium Hijau dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Sistem tracking digital untuk bahan kimia memungkinkan optimalisasi pemesanan dan penyimpanan, menghindari pemborosan akibat kadaluarsa atau kerusakan. Pemilihan bahan kimia ramah lingkungan menjadi prioritas, dengan prosedur penanganan material yang efisien untuk meminimalkan risiko pencemaran. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan secara konsisten, didukung dengan sistem pemisahan dan pengolahan limbah yang terpadu.

Minimalisasi dampak lingkungan menjadi pilar kedua yang tak kalah pentingnya. Pengendalian polusi dilakukan melalui sistem ventilasi dengan filter efisiensi tinggi dan pemantauan kualitas udara secara berkala. Penggunaan bahan kimia dengan VOC rendah dan sistem penangkapan gas buang yang efektif memastikan kualitas udara tetap terjaga.

Pengurangan dampak lingkungan menjadi fokus utama dengan mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam operasional laboratorium. Ini meliputi penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, pengolahan limbah yang tepat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penerapan sistem manajemen limbah yang efektif. Laboratorium juga menerapkan prinsip 3R

(Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan material dan menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam proses pengujian.

Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem pengolahan mandiri dengan pemisahan saluran berdasarkan karakteristik limbah. Program monitoring kualitas effluent dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Perlindungan ekosistem menjadi aspek integral dalam Laboratorium Hijau. Program penanaman vegetasi di area laboratorium tidak hanya berkontribusi pada estetika, tetapi juga mendukung biodiversitas lokal. Pemilihan tanaman adaptif dan penciptaan habitat mikro menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Optimalisasi penggunaan lahan dan pencegahan erosi dilakukan melalui manajemen air limpasan yang efektif dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Mitigasi perubahan iklim mendapat perhatian khusus melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dan monitoring jejak karbon dilakukan secara sistematis, didukung dengan program efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Optimalisasi transportasi dan logistik turut berkontribusi pada pengurangan emisi. Adaptasi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui desain bangunan yang tangguh, sistem drainase berkelanjutan, dan program tanggap darurat yang komprehensif.

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan menjadi pilar ketiga yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas. Kualitas udara dalam ruangan dijaga melalui sistem ventilasi yang adequate dengan pemantauan parameter IAQ secara rutin. Aspek ergonomi diperhatikan melalui desain stasiun kerja yang nyaman dan pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Sistem keselamatan kerja diterapkan secara komprehensif, meliputi deteksi bahaya, peralatan pelindung diri, dan prosedur tanggap darurat.

Produktivitas dan kenyamanan kerja ditingkatkan melalui desain ruang yang mendukung alur kerja efisien. Optimalisasi pencahayaan alami dan zonasi berdasarkan fungsi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kenyamanan termal dijaga melalui sistem pengkondisian udara yang optimal dan pemantauan kondisi ruangan secara berkala. Aksesibilitas menjadi perhatian penting, dengan sirkulasi yang efisien dan fasilitas yang ramah difabel. Keberlanjutan operasional didukung oleh sistem manajemen yang kuat, meliputi kebijakan laboratorium hijau, prosedur operasional standar, dan program audit internal.

Pengembangan SDM dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan. Inovasi dan perbaikan terus didorong melalui program riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru yang relevan. Integrasi dengan sistem yang lebih luas menjadi aspek penting dalam konsep Laboratorium Hijau. Keterlibatan pemangku kepentingan diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Dampak sosial diperhatikan melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat lokal.

Aspek ekonomi dikelola melalui efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya, menciptakan nilai tambah bagi institusi. Implementasi konsep Laboratorium Hijau dilakukan secara terencana dan terukur. Tahap perencanaan meliputi penetapan target dan indikator, penyusunan roadmap, dan alokasi sumber daya yang tepat. Pelaksanaan program diawali dengan pilot project, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator kuantitatif seperti konsumsi energi dan air, serta indikator kualitatif seperti kepuasan pengguna dan kualitas lingkungan kerja.



Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan ditunjukkan melalui pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan yang komprehensif. Laboratorium mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk penggunaan energi terbarukan, konservasi air, pengurangan limbah, serta edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan bagi seluruh personel. Program-program inovatif untuk mendukung keberlanjutan terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya².

BAB

2



Perencanaan Kinerja

- Uraian Singkat Renstra
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Metode Pengukuran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Visi & Misi Badan POM RI Tahun 2025-2029

“ Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 **”**

Visi

Misi

- “**
- Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
 - Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- ”**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, BBPOM di Palangka Raya menyusun Renstra 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Renstra BBPOM di Palangka Raya 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Palangka Raya bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Renstra 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari periode Renstra tahun 2020-2024, yang telah menjadi landasan bagi BBPOM di Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029, visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih dari itu, BBPOM di Palangka Raya berkomitmen untuk menyelaraskan perencanaan strategis ini dengan delapan misi utama (Asta Cita) yang dicanangkan oleh Presiden pada sektor kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. RKT tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26 %
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	kerja UPT		
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.02
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.18
		Nilai AKIP UPT BPOM	85.77
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91.30
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.4

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025- 2029 serta alokasi anggaran sesuai DIPA BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 22.128.308.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan diwujudkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 10.102.234.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan Evaluasi Internal untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Berikut RAPK Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025.

Pada tanggal 22 Mei 2025 dengan nomor surat B-PR.07.01.16A.05.25.368 perihal Usulan Revisi RAPK BBPOM di Palangka Raya mengusulkan revisi target RAPK untuk dua Indikator Kinerja yaitu, Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Dan telah disetujui ditanggapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dengan surat no B-PR.07.21.06.25.179 tanggal 04 Juni 2025 sehingga per 12 Juni 2025 RAPK BBPOM di Palangka Raya menjadi sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768.855.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41.950.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204.620.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37.842.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204.620.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51.722.500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10.344.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10.344.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163.552.750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163.552.750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23.290.000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.208.000
3.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan			69,5	69,5	69,5	71	71	71	72	72	72	72,5	7.479.574.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kerja UPT	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	272.628.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344.372.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501.455.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137.071.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8,5	19	31,67	47	61	73	78	87	91	92	82,8	43.762.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	28	33,33	33,33	38	51	61	71	85	96	358.335.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kerja UPT														
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72.439.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145.537.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,83	9.001.834.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,87	83.990.550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.867.427.650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134.981.300
Total															22.128.308.000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai manual indikator kinerja, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
 - 1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
 - 2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.
- b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Untuk mengukur capaian periodik dari Kinerja Organisasi dilakukan dengan menjumlahkan Indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi dan dibagi dengan Indikator kinerja yang terdapat target pada periode tersebut. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))						$\frac{518,41\%}{5}$ =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.

- b. Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c. Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e- Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- d. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - i. valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - ii. reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

BBPOM di Palangka Raya mengatur penanggung jawab pengumpulan data dalam rangka mendukung pengukuran dan pelaporan data yang akuntabel dalam Surat Keputusan Pembentukan TIM Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025 dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Susunan Tim SAKIP terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua I (perencanaan dan pengukuran), Ketua II (evaluasi internal), Ketua III (Laporan Kinerja), Ketua IV (Laporan Tahunan), Sekretaris, Anggota I (perencana target dan penyusun analisis capaian kinerja), Anggota II (mereviu analisis capaian kinerja), Anggota III (operator RHPK), dan Anggota IV (sekretariat tim laporan).
2. Tugas Pengarah (Kepala Balai): memberikan arahan pelaksanaan SAKIP dan memimpin rapat SAKIP.
3. Tugas Penanggung Jawab: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.
4. Tugas Ketua I (perencanaan dan pengukuran): mengkoordinir penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja sesuai pedoman, memastikan perencanaan kinerja menantang, dapat dicapai, dan realistis, mensosialisasikan manual IKU, memastikan data kinerja tertelusur dan andal, serta memastikan anggota tim mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP.
5. Tugas Ketua II (evaluasi internal): mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal program dan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjut sesuai pedoman, dan memastikan laporan evaluasi internal disusun sesuai pedoman dan tepat waktu.
6. Tugas Ketua III (Laporan Kinerja): mengkoordinir penyusunan laporan kinerja sesuai pedoman dan memastikan pengiriman laporan kinerja interim dan tahunan tepat waktu.
7. Tugas Ketua IV (Laporan Tahunan): mengkoordinir penyusunan laporan tahunan sesuai pedoman dan memastikan pengirimannya tepat waktu.
8. Tugas Sekretaris: bertanggung jawab atas data kinerja, membuat format database, verifikasi dan mengolah data kinerja, menginput data kinerja dan analisis kendala pada aplikasi monev BPOM, serta menyediakan data kinerja untuk penyusunan laporan.
9. Tugas Anggota I (perencana target dan penyusun analisa capaian kinerja): verifikasi data output dan kinerja sebelum input RHPK, reviu capaian output dan indikator kinerja, menyusun rencana target indikator kinerja tahunan dan turunannya, melakukan evaluasi

- dan menyusun analisis (pelaksanaan kegiatan dan anggaran, capaian output dan indikator kinerja, identifikasi kendala, rekomendasi rencana aksi tindak lanjut) untuk berbagai laporan, serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut.
10. Tugas Anggota II (mereview analisis capaian kinerja): mereview dan menganalisis Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, dan input data Simetris, serta mereview analisis Anggota I dalam Laporan Kinerja per Bab.
 11. Tugas Anggota III (operator RHPK): mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari pelaksana kegiatan, melakukan input data pada RHPK, serta mengumpulkan dan mengkompilasi analisis untuk Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
 12. Tugas Anggota IV (sekretariat tim laporan): mengumpulkan dan mengkompilasi analisis capaian kinerja yang telah diverifikasi dan direview, memastikan kesesuaian data kinerja dan kriteria, menyunting, mengolah, dan menyusun laporan kinerja interim dan tahunan, membuat desain tampilan laporan yang mudah dimengerti dan menarik, mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite BBPOM Palangka Raya tepat waktu, dan mengirimkan laporan kinerja ke esr.menpan.go.id, subsite BBPOM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan tepat waktu.
 13. Data kinerja output dan indikator digunakan untuk mengisi data monev stakeholder dan membuat laporan: RHPK BPOM, Monev Capaian Output SAKTI Kemenkeu, RAPK, E-performance SIMETRIS BPOM, BAPPENAS, evaluasi internal bulanan dan triwulanan, laporan kinerja interim dan UPT BPOM (triwulan), dan laporan kinerja tahunan.
 14. Pengisian data kinerja, pembuatan evaluasi capaian kinerja, dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai jenis laporan.
 15. Tim SAKIP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya.

BAB

3



Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Organisasi
- Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
- Pemanfaatan Informasi Kinerja
- Realisasi anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya di tahun 2025 memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan melakukan pengukuran capaian per sasaran strategis dengan menghitung rata-rata capaian dalam sasaran kinerja, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya triwulan II tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	90,38	103,59	103,59
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Belum ada target bulan ini	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,24	115,58	110
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,29	108,58	108,58
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72,22	100,31	100,31
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	110
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,04	108,8	108,8
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	99,25	134,34	110

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112,5	110
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99,92	113,55	110
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71	75,3	106,06	106,06
4	Meningkatnya efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	91,88	105,38	105,38
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	35	50	142,86	110
		Jumlah desa pangan aman	70	70	100	100
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	80	114,29	110
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	61	62,33	102,18	102,18
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38	33,33	87,71	87,71
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	Belum ada target bulan ini	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian
	optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	
	Total Capaian PK					1992,6
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)					104,87
	Predikat NKO					Istimewa

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di triwulan II tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO senilai 104,87% dari hasil rata-rata 16 Indikator kinerja yang dapat dinilai capaiannya di triwulan II tahun 2025 dengan predikat **Istimewa**. Berikut pembahasan capaian setiap Sasaran Kegiatan di Balai Besar POM di Palangka Raya di Triwulan II tahun 2025. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan
Produk Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan di Wilayah Kerja UPT

Sasaran Kegiatan I yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87.25	87.25	90.38	103.59	103.59	▲ Tercapai	Sangat Baik
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
3.	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	85	98.24	115.58	115.58	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
4.	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	▲ Tercapai	Baik
5.	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	85	92.29	108.58	108.58	▲ Tercapai	Sangat Baik
6.	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	84	72	72.22	85.98	100.31	▲ Akan Tercapai	Sangat Baik
7.	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	87	100	114.94	114.94	▲ Tercapai	Sangat Baik
8.	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	87.04	108.80	108.80	▲ Tercapai	Sangat Baik
9.	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	73.88	73.88	99.25	134.34	134.34	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
10.	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	80	90	112.50	112.50	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
11.	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	88	88	99.92	113.55	113.55	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Sasaran Kegiatan					109.79	111.22	Tercapai	N/A

1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dalam menentukan capaian terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewajiban melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Berikut adalah perhitungan sehingga diperoleh persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	=	$\frac{A + B + C + D}{4}$
--	---	---------------------------

Unsur-unsur perhitungan :

- A** = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B** = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C** = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- D** = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi “Sesuai Ketentuan” untuk masing-masing komoditi berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Komoditi Obat:
 - Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
 - Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
 - Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
 - Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 - Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
2. Komoditi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (bobot sama):
 - Pemenuhan target pengawasan
 - Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - Kesesuaian parameter uji
 - Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
 - Tanggapan atas surat tindak lanjut
3. Komoditi Kosmetik (bobot sama):
 - Pemenuhan target pengawasan
 - Kesesuaian pelaksanaan sampling
 - Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 - Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
 - Tanggapan atas surat tindak lanjut

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	90.38	103.59	Sangat Baik

Pada triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya mengembalikan target yang sebelumnya telah dilakukan re-targeting di triwulan I dikarenakan adanya relaksasi anggaran. Jumlah sampel yang akan disampling pada tahun 2025 adalah sebanyak 985 sampel sediaan farmasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sampel Obat = 274 sampel
2. Sampel Obat Tradisional = 227 sampel
3. Sampel Kosmetik = 424 sampel
4. Sampel Suplemen Kesehatan = 60 sampel

Jumlah Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar merupakan faktor utama yang mendukung indikator kinerja ini. Pada triwulan II ini telah dilakukan sampling terhadap sediaan farmasi dengan total sejumlah 369 sampel adapun yang telah dilakukan pengujian sejumlah 331 sampel.

Perhitungan realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan tabel RHPK yang telah ditetapkan yang telah mengakomodir semua

aspek penilaian masing-masing komoditas dari indikator ini, maka diperoleh realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90,38 %. Target indikator ini bersifat *flat* pada tahun 2025 yaitu sebesar 87,25%. Jika realisasi triwulan II dibandingkan terhadap target triwulan II akan memberikan angka capaian sebesar 103,59% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	100	116.41
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87.25	90.38	103.59

Realisasi indikator kinerja pada triwulan II tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja triwulan sebelumnya, mengalami penurunan sekitar 9,62%. Hal ini terjadi disebabkan adanya pengembalian target ke target awal tahun yang sebelumnya telah dilakukan re-targeting pada triwulan I.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	90.38	103.59	▲ Tercapai/ Melampaui

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target kinerja tahunan menunjukkan capaian dengan kriteria tercapai/melampaui, yaitu sebesar 103,59 %. Jika realisasi pelaksanaan sampling dan pengujian dapat terlaksana seperti yang direncanakan sebagaimana realisasi pada triwulan II, maka dapat dipastikan target tahunan akan tercapai/melampaui pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Relaksasi anggaran pada triwulan II secara langsung memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja. Adanya relaksasi anggaran ini membuat target yang pada triwulan I dilakukan re-targeting menjadi hanya sekitar 20-25% atau 197-245 sampel dikembalikan ke target awal yaitu 100 % atau sejumlah 985 sampel sediaan farmasi yang diperiksa dan diuji.

Rekomendasi perbaikan kinerja :

1. Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya supaya bisa masuk ke laboratorium di awal bulan
2. Melakukan pengujian sampel dan melaporkan melalui SIPT sesuai dengan timeline yang ditetapkan
3. Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan untuk mencapai target

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Adanya komunikasi yang optimal antara petugas sampling dan petugas pengujian. Terutama dalam hal menyusun rencana pelaksanaan sampling dan pengujian serta realisasinya. Rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dibuat dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Pengisian RHPK bersama sehingga dapat saling mengevaluasi antara petugas sampling dan petugas pengujian terhadap data yang disajikan. RHPK tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk spreadsheets yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
4. Efektivitas dalam pencapaian target indikator kinerja sangat berpengaruh terhadap sasaran kegiatan, jika capaian indikator kinerja memenuhi target maka dapat disimpulkan jika efektivitas sasaran kegiatan meningkat.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113.38	Rp. 184.861.940	Rp. 125.719.725	68.01	1.67	0.67	Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp718.855.000. Selama triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp576.203.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya realisasi anggaran karena adanya kendala dalam mencapai target realisasi dalam kurun waktu tiga bulan pasca relaksasi pemblokiran.

2

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Dalam pengawasan keamanan obat beredar, salah satu program yang dilaksanakan BPOM adalah farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas terkait deteksi dini, penilaian, pengkajian dan upaya pencegahan terhadap dampak risiko merugikan sehubungan dengan penggunaan obat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini melibatkan banyak *key player*

penting, antara lain tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, industri farmasi selaku pemegang izin edar dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPOM dalam program farmakovigilans, BPOM melakukan upaya penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini.

Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya adalah sebesar 26% yang diukur pada akhir tahun 2025.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT BPOM adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing *catchment area* UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Indikator ini diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM} = (A / B) \times 100\%$$

Keterangan:

- A** : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B** : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Belum ada target triwulan ini	-

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan target sebesar 26 %. Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelaporan KTD/ESO setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans. Pada Triwulan II ini, KIE Farmakovigilans baru dilaksanakan sehingga pengukuran indikator belum dapat dilakukan di Triwulan II tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Belum ada target
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum ada target1

Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru BPOM yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029, sehingga perbandingan capaian terhadap realisasi kinerja triwulan sebelumnya belum dapat dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran kinerja indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	Belum dapat dinilai capaiannya	N/A

Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru BPOM yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan. BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* dari tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengintensifkan peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis tersebut melalui kegiatan peningkatan kompetensi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan sebaran sarana pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan dukungan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilakukan oleh Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional namun juga oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM di daerah. Salah satu dukungan kegiatan peningkatan kompetensi melalui KIE farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM adalah berupa Bimbingan Teknis/KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Pada Triwulan II, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebanyak 48 sarana (target 45 sarana) dari 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, berdasarkan pemantauan terhadap pelaporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans, selama periode triwulan II terdapat 3 (tiga) fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelaporan KTD/ESO melalui pelaporan online : <https://e-meso.pom.go.id/ADR>.

Atas capaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, untuk perbaikan kinerja pada triwulan 2 direkomendasikan: melakukan pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan dan aktif melakukan komunikasi dengan para petugas pelapor untuk mendorong peningkatan kesadaran dalam pelaporan e-MESO.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pada triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan yaitu sebanyak 48 sarana (target 45 sarana), tanggal 24 April 2025. Kegiatan KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan ini menghadirkan pakar farmakovigilans yang berkompeten di bidangnya. Sebagai evaluasi, pengukuran tingkat pemahaman peserta dilakukan melalui *pre test* dan *post test* dengan persentase kelulusan peserta di atas nilai 70 sebanyak 95,16%.
- Berdasarkan monitoring, fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sarana.
- Melakukan Monitoring Evaluasi Farmakovigilans Triwulan II pada poin kegiatan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut regulatori di lapangan berdasarkan hasil kajian keamanan obat beredar, seperti perubahan penandaan dan penarikan obat (recall obat) periode triwulan II tahun 2025.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	Rp4.300.000	Rp4.294.280	99.87	0.00	-1.00	Tidak efisien

Pengukuran Efisiensi belum dapat dilakukan pada Indikator ini, tetapi untuk progres RO pendukung telah selesai dilaksanakan. Pagu awal untuk yang dianggarkan untuk pencapaian target IKU ini adalah Rp41.950.000,- dan dilakukan Blokir mandiri senilai Rp37.650.000,- sehingga pagu yang dapat digunakan adalah Rp4.300.000,-. Per bulan April kegiatan KIE Farmakovigilans telah dilaksanakan dan anggaran yang digunakan Rp 4.294.280,- hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan kegiatan KIE yang awalnya luring menjadi daring seluruhnya, sehingga pada IKU ini telah dilakukan efisiensi penghematan anggaran sebesar 89% dari pagu awal IKU.



Indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah salah satu indikator yang mengukur sejauh mana pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya berdasarkan kajian analisis risiko. Ruang lingkup pangan olahan dalam indikator ini ialah pangan olahan yang terdaftar dengan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM MD dan BPOM ML maupun pangan lainnya terkait kasus, pendampingan UMKM, emerging issues, termasuk pangan fortifikasi baik yang disampling di sarana produksi maupun di sarana peredaran. Dengan kata lain, ruang lingkup pangan olahan disini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pengertian pangan olahan itu sendiri adalah makanan atau minuman yang telah mengalami proses pengolahan tertentu. Proses ini bisa melibatkan berbagai metode, seperti pengeringan, pemanasan, pendinginan, fermentasi, penambahan bahan pengawet atau perasa, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk meningkatkan daya simpan, mengubah rasa dan tekstur, atau menciptakan produk baru yang lebih praktis dan beragam. Adapun pengertian sampel pangan olahan berisiko adalah sampel pangan yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Selanjutnya, pengertian “ditindaklanjuti sesuai ketentuan” adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Dengan demikian, pengertian “diperiksa dan diuji” sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi antara pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Capaian atau realisasi dari indikator kinerja “ Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan :

A = Kesesuaian target sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian parameter uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C = Ketepatan pengambilan keputusan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E = Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F = Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.24	115.58	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja pada TW II dibandingkan dengan target termasuk pada kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel telah disampling sesuai Pedoman Sampling dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) sampling serta diinput dan dilaporkan pada SIPT tepat waktu. Dengan target 85% pada TW II serta realisasi sebesar 98.24% menjadikan capaian sebesar 115.58%. Dengan demikian pada TW berikutnya dapat dilakukan evaluasi dan pembahasan kembali terkait dengan penetapan target yang dilaksanakan dengan unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan, maupun Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sampling dan pengujian pada TW selanjutnya dapat dilakukan lebih baik serta masuk pada kategori capaian **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.69	116.11
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	85	98.24	115.58

Target realisasi TW II dan TW I tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 85% sedangkan realisasi TW II dibandingkan dengan TW I juga relatif tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 98% (perbedaan dua digit dibelakang koma) hal ini menunjukkan bahwa realisasi TW II masih konsisten dengan TW I. Dalam hal persentase capaian juga pada kedua TW masih berada pada rentang >110% sehingga keduanya masuk pada kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Dengan demikian, usulan adanya perubahan target menjadi hal yang penting dilakukan agar capaian pada TW berikutnya masuk pada kategori yang diharapkan tidak melewati jauh dari target yang ditetapkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.24	115.58	 Tercapai/ Melampaui

Target realisasi tahun 2025 sebesar 85 % sedangkan realisasi TW II sebesar 98,24% sehingga kriteria capaian terhadap target tercapai/melampaui. Namun demikian, dengan adanya penyesuaian target tahun 2025 yang dilakukan bersamaan dengan revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya maka tetap perlu dijaga konsistensi kinerja yang telah dilakukan agar capaian akhir terhadap target tahunan tetap tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan oleh kinerja sampling dan pengujian yang telah dilakukan sesuai pedoman baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pelaporan. Kesesuaian parameter uji dan tindak lanjut atas hasil pengujian juga menjadi faktor penting penentu keberhasilan capaian indikator ini. Dengan adanya perubahan (kenaikan) target sesuai revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya, maka konsistensi kinerja yang telah dicapai perlu tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kompetensi petugas sampling agar tidak terjadi pemilihan sampel dalam hal kategori ataupun jenis sampel perlu diperhatikan selain juga kesiapan laboratorium dalam hal reagensia, peralatan maupun sumber daya lainnya agar pengujian dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu sehingga capaian kinerja dapat sesuai target yang telah ditetapkan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa hal yang menjadi faktor penunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini ialah:

- Adanya rencana pelaksanaan sampling, monitoring dan evaluasi capaian sampling dan pengujian yang dilakukan setiap bulan sehingga meminimalisir adanya ketidaksesuaian capaian kinerja sampling dan pengujian.
- Adanya pendampingan (coaching) dalam pengambilan sampel bagi petugas sampling yang baru sehingga kesalahan dalam pemilihan jenis/kategori pangan dan jumlahnya dapat diminimalisir.
- Adanya percepatan dalam input dan pelaporan SIPT sampel maupun hasil pengujian sehingga mengurangi keterlambatan pelaporan.
- Adanya komunikasi yang efektif antara tim sampling dan pengujian, terutama berkaitan dengan hasil uji yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga meminimalisir adanya ketidaksesuaian dalam tindak lanjut hasil uji.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi i Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.79	Rp.86.779.658	Rp38.829.469	44.74	2.43	1.43	80% (Tidak Efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja yang melampaui target namun realisasi anggaran yang tidak mencapai target, dengan capaian hanya 44,74%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp243.541.000. Selama triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp212.101.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya realisasi anggaran karena adanya kendala dalam mencapai target realisasi dalam kurun waktu tiga bulan pasca relaksasi pemblokiran.



Persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar adalah salah satu indikator kinerja BBPOM di Palangka Raya yang bertujuan untuk memotret bagaimana penanganan KLB-KP di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya apakah telah sesuai dengan pedoman sehingga dapat diperoleh informasi terkait agen penyebab keracunan untuk selanjutnya dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan kejadian tersebut.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan indikator yaitu persentase sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) yang diuji sesuai standar, dapat dijelaskan bahwa “sampel KLB-KP” yaitu sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan hasil investigasi ataupun analisis epidemiologi. Sampel KLB-KP yang diperiksa tidak terbatas pada Pangan Olahan Dalam Kemasan namun juga termasuk Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan tak menutup kemungkinan termasuk Pangan Segar, baik Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) maupun Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sampel KLB-KP dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Pengertian “sesuai standar” adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Tambahan khusus untuk sampel pangan jenis Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) yang menjadi tugas utama Badan POM perlu juga diperhatikan

kesesuaian terhadap standar atau regulasi terkait seperti misalnya parameter uji lainnya sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Kesesuaian terhadap standar lainnya ialah dalam hal pengambilan sampling yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; serta dalam melakukan investigasi penyebab keracunan yaitu sesuai dengan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan Tahun 2023.

Secara ringkas, pengukuran indikator ini dilakukan melalui perhitungan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$30\% \times A1, A2, \dots, A_n + 35\% \times B1, B2, \dots, B_n + (35\% \times C1, C2, \dots, C_n) \times n$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- e. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- f. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	Baik

Sampai dengan akhir Triwulan II telah dilakukan pengujian terhadap sampel KLB-KP yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, yaitu berupa puding susu yang merupakan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) dan diproduksi oleh salah satu pelaku usaha UMK Jasa Boga di Kasongan, Kabupaten Katingan. Sampel tersebut telah dilakukan pengujian secara mikrobiologi dengan 4 (empat) parameter yaitu *Bacillus cereus*, *Salmonella*, *E. coli* dan *Staphylococcus aureus*. Pengujian hanya dilakukan secara mikrobiologi dikarenakan berdasarkan kajian epidemiologi tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan pada penyebab keracunan disebabkan agen kimia.

Dari hasil pengujian diperoleh satu parameter yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu parameter uji *Salmonella*. Hasil tersebut telah sesuai dengan referensi etiologi meliputi gejala yang dialami oleh korban, masa inkubasi, maupun kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan serta kesesuaian dengan permintaan parameter uji oleh dinas kesehatan berdasarkan kajian epidemiologi yang telah dilakukan. Pelaporan atas definisi kasus, kajian epidemiologi, hingga laporan hasil uji juga telah dilaporkan ke Badan POM melalui aplikasi SPIMKER KLB-KP. Dengan demikian capaian terhadap target Triwulan II sebesar 100.00% dengan kriteria capaian Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	-
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	100	100.00	100.00

Realisasi sampai akhir Triwulan II sebesar 100.00% dan realisasi kinerja sebesar 100.00% sehingga diperoleh persentase capaian 100.00%. Pada Triwulan I tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan hingga akhir Triwulan I belum selesai dilakukan pembahasan Definisi Operasional (DO) oleh unit pengampu maupun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, pada Triwulan I tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan sehingga tidak ada realisasi pada periode tersebut. Oleh karena itu, belum dapat dilakukan perbandingan capaian antara Triwulan I dan Triwulan II.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	 Tercapai

Berdasarkan target tahunan yaitu sebesar 100.00% diharapkan dapat dipertahankan agar capaian tetap **Baik** sehingga perlu ditekankan kembali pentingnya penetapan parameter uji yang tepat agar hasil uji yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat digunakan dalam menentukan agen penyebab KLB-KP.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Koordinasi yang baik dan efektif secara internal BBPOM di Palangka Raya melalui TGC Balai serta secara eksternal dengan TGC Daerah atau Dinas Kesehatan setempat dalam penelusuran informasi/kasus, pengambilan sampel, penerimaan sampel dan penentuan parameter uji serta analisis epidemiologi penyebab keracunan.
- Kesiapan laboratorium dalam pengujian agen penyebab keracunan, meliputi ketersediaan reagensia dan peralatan serta sumber daya manusia petugas penguji agar pengujian dapat selesai tepat waktu dan hasil uji dapat mendukung kajian epidemiologi yang telah dilakukan.
- Pelaporan hasil pemantauan KLB-KP melalui aplikasi SPIMKER secara cepat dan tepat agar dapat segera dilakukan *monitoring* oleh Badan POM.
- Adanya jadwal *on call* pada hari Sabtu/Minggu/Libur sebagai petugas penerima laporan kejadian keracunan yang telah dibuat sebagai hasil rekomendasi evaluasi internal juga perlu dilaksanakan dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun keterlambatan dalam penanganan laporan kasus.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tidak adanya laporan Kejadian Luar Biasa akibat Keracunan Pangan (KLB-KP) belum tentu menunjukkan tidak adanya kasus keracunan di masyarakat. Perlu upaya lebih berkesinambungan terutama dengan tim terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) agar sering mengingatkan kepada masyarakat dalam pemilihan, penyiapan dan penyimpanan pangan yang aman maupun dalam konsumsinya sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Jika terjadi keracunan akibat makanan juga diharapkan masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkannya pada Puskesmas terdekat. Tindakan tersebut dilakukan agar KLB-KP lebih cepat tertangani dan investigasi penyebabnya dapat dilakukan dengan baik sehingga menjadi pembelajaran. Untuk mendukung keberhasilan capaian indikator ini, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Koordinasi dan komunikasi yang jelas dan efektif dengan petugas dinas kesehatan setempat jika kejadian keracunan merupakan pangan olahan siap saji dan berasal dari kabupaten/kota (daerah) dalam pengambilan sampel maupun dalam penentuan parameter uji dikaitkan dengan analisis epidemiologi yang dilakukan oleh petugas dari dinas kesehatan.
- Koordinasi dan komunikasi yang cepat dan terarah dengan TGC Badan POM jika kejadian keracunan berasal dari Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) dalam menentukan parameter uji agar hasil pengujian dapat mendukung dalam penentuan agen penyebab keracunan.
- Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam TGC Daerah agar berikutnya tetap siap dan waspada jika sewaktu-waktu terdapat laporan kejadian keracunan dari masyarakat.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100.00	Rp. 32,193,400	Rp. 11,561,760	35.91	2.78	1.78	78% (Tidak Efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien. Hasil analisis capaian target kinerja sesuai target, namun realisasi anggaran tidak tercapai dengan capaian hanya 35.91%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp 37.842.000. Kasus keracunan memengaruhi indikator ini sehingga penyerapan anggarannya tidak dapat direncanakan secara pasti, dan ini menjadi kendala dalam pencapaian target anggaran.



Sampling Pangan Industri rumah Tangga (PIRT) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, yang dikemas dalam kemasan pangan, yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Sampling ini merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian indikator untuk persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kategori sampling PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan.

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 85% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian dari 35 sampel yang diambil dan dilaporkan sampai dengan akhir Triwulan I. Pengambilan sampel dilakukan pada triwulan I tahun berjalan dengan tujuan agar tidak terjadi sampling berulang (*double sampling/double counting*) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan menu post market dalam program Bantuan Operasional Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) TA 2025.

Keberhasilan kinerja untuk indikator ini dipengaruhi oleh jumlah produk PIRT yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dan ketersediaan reagen serta kesiapan alat untuk melakukan pengujian sampel PIRT. Selain itu, kinerja pada indikator ini juga didukung oleh ketepatan perencanaan, kejelian petugas dalam mengambil kesimpulan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian dan evaluasi penandaan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

$$\text{Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

dimana :

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan:

$$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.29	108.58	Sangat Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target sebesar 85 % memperoleh

realisasi sebesar 92.29%. Dengan realisasi tersebut, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh capaian sebesar 108.58%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

Dengan adanya kebijakan pembukaan blokir anggaran untuk Pengawasan Obat dan Makanan pada akhir Triwulan I berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor BPR.05.03.1.2.03.25.84 hal Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran TA 2025 terutama untuk bidang Inspeksi maka target sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kembali sesuai target yang telah ditetapkan di awal tahun sebanyak 35 sampel. Realisasi indikator kinerja pada Triwulan II ini telah dihitung menggunakan *baseline* target tahunan sesuai dengan kebijakan pembukaan blokir tersebut.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	85	92.29	108.58

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan dan bersifat flat sampai dengan akhir tahun 2025. Realisasi pada Triwulan II mengalami penurunan dan capaian kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II menurun. Hal ini disebabkan karena ketidaktepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, di mana di dalam Pedoman Sampling Tahun 2025 harus dilaksanakan pada Triwulan I. Namun dengan adanya efisiensi anggaran pada bulan Februari dan disusul relaksasi efisiensi anggaran, pada bulan berikutnya menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda dan dapat dilaksanakan pada Triwulan II. Selain itu, adanya ketidaktepatan kategori pangan pada 1 sampel teh kering menyebabkan penurunan pada kriteria ketepatan target sampel sesuai dengan pedoman sampling.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.29	108.58	 Tercapai/ Melampaui

Sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025, sampling dan pengujian produk PIRT berisiko hanya dilakukan pada Triwulan I, namun dengan adanya efisiensi anggaran yang diterapkan pada Bulan Februari sampling PIRT berisiko hanya dapat dilakukan sebanyak 12 sampel pada Triwulan I dan dengan adanya relaksasi efisiensi anggaran yang berlaku di bulan Maret maka sisa sampel yang menjadi target tahun 2025 diselesaikan pada Triwulan II sehingga realisasi pada Triwulan II sebesar 92.29% jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 85% maka akan diperoleh capaian sebesar 108.58% dengan kriteria **Tercapai**.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dari *tools* penilaian mandiri untuk menghitung realisasi kinerja indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 92.29% dan capaian sebesar 108.58% dengan kriteria **Sangat Baik**. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pengambilan kesimpulan yang tepat terhadap hasil uji dengan parameter sesuai Pedoman sampling yang telah ditetapkan
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

1. Pembahasan definisi operasional dan cara pengisian *tools* penilaian mandiri yang dilakukan pada bulan April
2. Jumlah sampel yang tidak mencukupi untuk pengujian.
3. Perubahan pada *tools* pelaporan hasil sampling yang belum final
4. Kompetensi petugas sampling masih kurang dalam penentuan kategori pangan pada sampel sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025
5. *Feedback* tindak lanjut hasil pengawasan yang belum optimal baik dari pelaku usaha maupun dari lintas sektor pengampu pembinaan IRTP.

Untuk meningkatkan kinerja kedepannya maka perlu adanya perbaikan pada :

1. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM Lokal dalam penerapan CPPOB IRT dan kesesuaian label pangan olahan
2. jalur komunikasi dalam melakukan *feedback* tindak lanjut hasil pengawasan
3. pengawasan berjenjang dalam pemilihan kategori pangan olahan sebelum sampel masuk ke pengujian.
4. Koordinasi dengan penguji terkait jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk dilakukan pengujian

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Program pengawalan BOK POM TA 2025 dengan bimtek penilaian mandiri SPPIRT oleh Dinas Kesehatan kabupaten/Kota yang meningkatkan pembinaan pelaku usaha PIRT untuk dapat memenuhi komitmen izin penerapan SPPIRT.
2. Program UMKM Berdikari yang bersinergi tidak hanya untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan BPOM MD namun juga mendampingi pelaku usaha PIRT
3. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk PIRT
4. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan khususnya pelaku usaha PIRT.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.58	86,779,658	38,829,469	44.74	2.43	1.43	80% (Tidak Efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien. Hasil analisis capaian target kinerja melampaui target, namun realisasi anggaran yang tidak mencapai target, dengan capaian hanya 44.74%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien.

Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp. 243.541.000. Selama triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp. 212.101.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya realisasi anggaran karena adanya kendala dalam mencapai target realisasi dalam kurun waktu tiga bulan pasca relaksasi pemblokiran.



Indikator kinerja ini sama dengan indikator kinerja pada periode renstra sebelumnya dengan definisi yang sama (tidak ada perubahan Definisi Operasional).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

$$A : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

$$B : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi dan Pemeriksaan Sarana Pelayanan Farmasi (saryanfar) baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	72	72.22	100.31	Sangat Baik

Terdapat kesalahan input data pada RHPK bulan Januari sampai dengan Mei 2025 sehingga menyebabkan kesalahan penghitungan nilai indikator kinerja dan sedang dalam proses koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk revisi realisasi. Data yang digunakan pada laporan ini telah menggunakan data *update*. Pada Triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah memberikan keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan kepada *stakeholder* yaitu pelaku usaha sebanyak 91 rekomendasi termasuk rekomendasi *carry over* tahun 2024. Sampai dengan Triwulan II terdapat 40 rekomendasi yang mendapatkan *feedback* dari pelaku usaha, dan rekomendasi ke lintas sektor sebanyak 1 rekomendasi telah mendapatkan *feedback*. Realisasi indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian **100.31%** termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	64	72.41	113.14
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	72	72.22	100.31

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada triwulan II jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I mengalami penurunan dengan capaian 100.31% kriteria **Sangat Baik**. Capaian ini terlihat menurun karena target yang ditetapkan pada triwulan II lebih besar dari pada triwulan I, serta karena terdapat perubahan data RHPK pada indikator ini.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	72.22	85.98	 Akan Tercapai

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 84% maka akan memberikan angka capaian sebesar 85.98% dengan kategori **Akan Tercapai**. BBPOM di Palangka Raya akan melakukan perbaikan yang berkesinambungan serta *monitoring* dan evaluasi yang ketat agar dapat mencapai target akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada *stakeholder* yaitu pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 91 rekomendasi termasuk rekomendasi *carry over* tahun 2024. Sampai dengan Triwulan II terdapat 40 rekomendasi yang mendapatkan *feedback* dari pelaku usaha, dan rekomendasi ke lintas sektor sebanyak 1 rekomendasi telah mendapatkan *feedback*.

Rekomendasi perbaikan kinerja agar pelaku usaha/ lintas sektor memberikan *feedback* terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yaitu :

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat inspeksi, agar memberikan *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dan pola tindak lanjut hasil pengawasan.
- Aktif berkoordinasi dengan IAI untuk melakukan sosialisasi tentang pembuatan CAPA dari hasil pemeriksaan BBPOM di Palangka Raya
- Petugas aktif melakukan konfirmasi sekaligus memberikan konsultasi secara terus menerus melalui telepon dan *whatsapp* ke pelaku usaha terkait *progress* CAPA yang harus dikirimkan.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap *timeline feedback* CAPA dari surat tindak lanjut yang telah diterbitkan.
- Menerapkan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis masing-masing kedeputian/komoditi.
- Melakukan sosialisasi Pola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka sinergisme pengawasan obat dan makanan dan memaksimalkan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan) masing-masing kabupaten/kota.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha dan lintas sektor terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu, koordinasi yang baik dengan lintas sektor juga menunjang keberhasilan dari indikator ini. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM mendorong pelaku usaha untuk secara aktif melakukan tindakan perbaikan melalui penyusunan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- *Monitoring* dan evaluasi *feedback* dari *stakeholder* yang ketat

- Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha/penanggung jawab
- Melaksanakan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis pedoman Tindak Lanjut.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100.31	Rp. 30,252,500	Rp. 30,888,556	102.10	0.98	-0.02	Tidak efisien

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 0.98 dan termasuk dalam kegiatan yang tidak efisien dengan tingkat efisiensi -0,02 dan kriteria capaian efisiensi 98% (tidak efisien). Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 22.332.000.

7

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Ruang lingkup dari sarana produksi sediaan farmasi sendiri terdiri dari :

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (seperti: Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, dan Industri Suplemen Kesehatan
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu Industri Kosmetik Golongan A dan Industri Kosmetik Golongan B.

Indikator ini merupakan indikator baru namun serupa dengan indikator tahun lalu yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dimana perbedaan mendasar ada pada ruang lingkup sarana produksi yang diperiksa dan juga cara pengukuran yang ditetapkan dalam manual IKU.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana produksi (Sarprod) Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah: rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

$$\% \text{ Sarprod Obat} = \text{Rata-rata (A+B+C)}$$

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 87% yang diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian *ouput* sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	Tidak Dapat Disimpulkan

Target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra BPOM yang telah ditetapkan adalah sebesar 87% sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase ini diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian *output* sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Sampai dengan akhir Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sebanyak 1 sarana dari target 3 sarana yang diperiksa. Dari target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 yaitu 87% terealisasi 100% pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 114,94% dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87	100	114,94

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan sedangkan realisasinya dibandingkan dengan Triwulan I mengalami peningkatan signifikan dari 0% menjadi 100% karena adanya realisasi pengawasan sarana produksi farmasi sebanyak 1 sarana yaitu UMOT (sarana produksi Obat Tradisional) dari 3 sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pada tahun 2025 ini. Namun demikian, capaian jika dibandingkan dengan target Triwulan II 87% adalah 114,94% dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW Tahun II 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114.94	 Melampaui

Target indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat sama (*flat*) sampai dengan akhir tahun. Pengukuran kinerja hingga Triwulan II tahun 2025 di BBPOM di Palangka Raya memperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian 114,94% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**. Capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya tercapai / melampaui disebabkan karena penetapan target pada awal Renstra rendah berdasarkan analisis realisasi kinerja tahun sebelumnya sebesar 70%.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis capaian hasil kinerja yang menyebabkan capaian pada indikator ini memperoleh kriteria **Tercapai / Melampaui** adalah karena:

1. Telah terlaksananya pengawasan 1 sarana produksi sediaan farmasi (UMOT) pada bulan April dari 3 target sarana produksi sediaan farmasi pada tahun 2025.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan sarana produksi farmasi pada forum komunikasi inspektur OBA pada bulan Juni 2025 .

Untuk dapat memperbaiki kinerja pada triwulan selanjutnya maupun perbaikan kinerja untuk tahun depan akan dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi hasil Forum Komunikasi Inspektur OBA kepada seluruh petugas Inspeksi untuk peningkatan kompetensi petugas inspeksi yang akan ditugaskan pada pengawasan sarana produksi sediaan farmasi berikutnya.
2. Membuat usulan revisi target indikator kinerja beserta justifikasi untuk perbaikan capaian pada triwulan berikutnya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
2. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi sediaan farmasi dalam tindak lanjut hasil pengawasan dan perizinan.
3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian kinerja.
4. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Evaluasi/Bimtek/Pelatihan di Bidang Pemeriksaan.
5. Hasil monitoring dan evaluasi pusat setiap triwulan.
6. Pendampingan pelaku usaha sediaan farmasi melalui Inovasi UMKM Berdikari guna menumbuhkan pelaku usaha sediaan farmasi.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.94	Rp6,384,000	Rp6,032,833	94.50	1.22	0.22	95% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil **Efisien**, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp10.344.000. Selama Triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp6.684.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025.

8

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) dilakukan berdasarkan kajian analisis risiko sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Fasilitas produksi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar PIRT serta pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Ketentuan “diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” ialah dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut.

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara perhitungan indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
 - d. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK);
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka *grading* sebagai B (TMK); dan
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka *grading* sebagai C (TMK).

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87.04	108.80	Sangat Baik

Target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra BPOM yang telah ditetapkan adalah sebesar 80% sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase ini diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian output sebanyak 23 sarana sesuai dengan cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Sampai dengan akhir Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan sebanyak 18 sarana dari target 23 sarana yang diperiksa. Dari target realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 yaitu 80% terealisasi 87,04% pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,80% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	80	87.04	108.80

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan sedangkan realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan I dikarenakan berdasarkan pedoman penilaian kinerja dari unit pengampu Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Badan POM RI indikator ini

masih dikecualikan dari perhitungan kinerja Triwulan I sehingga realisasi dianggap 0%. Namun demikian, realisasinya telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebanyak 1 (satu) sarana yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara umum, capaian kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II mengalami peningkatan dalam hal jumlah sarana yang diperiksa dari 1 sarana menjadi 18 sarana yang telah diperiksa hingga akhir Triwulan II. Dari cakupan wilayah kabupaten/kota juga mengalami penambahan dari sebelumnya 1 (satu) kabupaten/kota yaitu di Kotawaringin Timur bertambah menjadi 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Selatan, dengan demikian cakupan wilayah yang diperiksa juga bertambah.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW Tahun II 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87.04	108.80	 Melampaui

Target indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat sama (*flat*) sampai dengan akhir tahun. Pengukuran kinerja hingga Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya memperoleh realisasi sebesar 87,04% dengan capaian 108,80% atau kriteria **Tercapai/ Melampaui**. Hal ini disebabkan target tahunan BBPOM di Palangka Raya merupakan *baseline* dari target capaian Renstra hingga tahun 2029, sehingga target pada tahun 2025 merupakan target paling realistis untuk dicapai disebabkan adanya metode pengukuran kinerja yang baru. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan jumlah petugas inspektur pangan yang tersedia, kompetensi dan kemampuan petugas, komposisi petugas dalam surat tugas serta pemahaman petugas terhadap pedoman tindak lanjut.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Mengingat penilaian kinerja indikator ini diperoleh dari hasil pemeriksaan, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut, maka untuk mencapai target capaian perlu dilakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai pedoman yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.04.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) bagi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan.

Berdasarkan acuan dan pedoman ketentuan yang berlaku, dari 18 (delapan belas) sarana terdiri dari 5 (lima) sarana memiliki izin edar produk BPOM MD dan 13 (tiga belas) sarana memiliki izin edar produk PIRT yang telah diperiksa, terdapat 8 (delapan) sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), yaitu terdiri 2 sarana MD dan 6 sarana IRTP. Dari hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan, ketepatan waktu pengiriman laporan serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat 6 sarana IRTP yang masih belum sesuai

dalam hal administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, khususnya terhadap hasil pemeriksaan IRTP yang memiliki penilaian pada level III dan IV maupun TMK label.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan, jika dari hasil pemeriksaan sarana IRTP diperlukan tindak lanjut, maka mekanisme tindak lanjutnya berupa rekomendasi yang dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan setempat sedangkan jika hasil pemeriksaan berupa ketidaksesuaian label, maka tindak lanjutnya mengacu pada tindak lanjut pemeriksaan TMK label bukan pemeriksaan sarana. Hal ini perlu menjadi perhatian pada pemeriksaan selanjutnya agar dalam melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan. Meski demikian, adanya ketidaksesuaian ini masih dapat ditolerir mengingat realisasi capaian masih dalam range 100-110% yaitu 108,80% sehingga masih masuk dalam kategori sangat baik.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan kajian tingkat risiko jenis produk maupun riwayat pemeriksaan sebelumnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan. Dari hasil pemeriksaan sarana jika masih ditemukan hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti, maka untuk sarana MD dapat dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha sesuai dengan pedoman Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan sedangkan pada sarana IRTP maka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan setempat dalam bentuk surat rekomendasi untuk melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan rating penilaian III atau IV, baik dari hasil penilaian sarana tempat produksi (higienitas dan sanitasi) maupun penilaian label. Dengan demikian, maka penilaian kinerja selanjutnya dapat ditingkatkan, selain juga dipertahankan dari sisi kesesuaian pemeriksaan sarana serta ketepatan waktu pelaporan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.80	Rp6,384,00	Rp6,032,83	94.50	1.15	0.15	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil **Efisien**, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp10.344.000. Selama Triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp6.684.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025.

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $A + B + C3$

Keterangan :

A	:	Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
B	:	Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
C	:	Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Namun demikian perhitungan indikator ini masih dikecualikan dari perhitungan kinerja Triwulan I tahun 2025, karena masih dalam tahap pembahasan Definisi Operasional (DO).

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	99.25	134.34	Tidak dapat Disimpulkan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF, Instalasi Farmasi Provinsi dan Instalasi Farmasi Kabupaten), obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat dan fasilitas lain). Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 73,88%. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan sarana sebagai berikut:

- Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 56 sarana
- Sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 13 sarana
- Sarana distribusi kosmetik sebanyak 25 sarana
- Sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 4 sarana

Faktor yang mempengaruhi penilaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Sarana Distribusi Obat:

- Persentase pemenuhan target pemeriksaan
- Kesesuaian *timeline* penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Hasil *review* kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor*

Sarana distribusi OBA, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan:

- Persentase Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi
- Persentase kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
- Persentase akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

- Persentase kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

Sampai dengan Triwulan II ini, diperoleh realisasi indikator sebagai berikut :

- Sarana distribusi Obat 97,77%
- Sarana distribusi OBA 93,75%
- Sarana distribusi Suplemen Kesehatan 108,33%
- Sarana distribusi Kosmetik 97,16%

Rata-rata dari realisasi 4 jenis sarana tersebut adalah merupakan nilai realisasi indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 99,25%. Jika dibandingkan dengan target maka akan memberikan angka capaian 134,34% dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**. Hal ini sesuai dengan perubahan kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan Surat Edaran Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	0	0
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	73.88	99.25	134.34

Realisasi Triwulan I dan Triwulan II tidak dapat dibandingkan, karena pada Triwulan I indikator ini belum bisa dilakukan perhitungan dan sedang dalam proses pembahasan Definisi Operasional.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW Tahun II 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	99.25	134.34	 Melampaui

Realisasi Triwulan II jika dibandingkan dengan target tahun 2025 telah **Tercapai / Melampaui**. Hal ini disebabkan karena target 73,88% yang ditetapkan dalam RAPK sangat rendah. Target pengawasan sarana distribusi kosmetik sebesar 90% belum masuk dalam perhitungan indikator ini pada penetapan target awal. Berdasarkan surat Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor T-PW.03.04.16A.05.25.370 tanggal 20 Mei 2025 perihal Permohonan Revisi Target IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025, telah dilakukan usulan perubahan. Jika komponen target sarana distribusi kosmetik dimasukkan, maka seharusnya seharusnya target indikator ini sebesar 96,38%. Jika dibandingkan dengan target 96,38%, maka capaian Triwulan II adalah sebesar 102,97% dengan kriteria **Tercapai / Melampaui**. Realisasi yang didapatkan telah melampaui dipengaruhi juga oleh faktor jumlah realisasi pengawasan sarana melebihi target sesuai renlak untuk sarana distribusi suplemen kesehatan dan kosmetik yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penghitungan realisasi indikator ini.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi meliputi sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, obat bahan alam dan suplemen kesehatan dengan total sebanyak 123 sarana. Seluruh tahapan dari kegiatan pemeriksaan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mengikuti petunjuk teknis pemeriksaan dari masing-masing Direktorat / Kedeputan.

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja:

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi meliputi kesesuaian dengan target, kesesuaian pelaksanaan dengan juknis, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan pelaporan.
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan agenda *sharing session* kegiatan inspeksi / hasil pelatihan / pertemuan secara berkala.
- Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan pada fungsi pemeriksaan.
- Revisi target pada RAPK, menjadi 96,38%

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

- Realisasi melebihi target sampai dengan bulan Juni karena adanya instruksi intensifikasi pengawasan dari pusat.
- Meningkatnya pemahaman petugas terhadap juknis Tindak Lanjut.
- Monev yang ketat realisasi output terhadap target.
- Ketepatan pelaporan sesuai *timeline*.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	134.34	Rp22,778,31	Rp26,361,87	115.73	1.16	0.16	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil **Efisien**, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp189.165.500 . Selama Triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp174.329.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025.

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu serta apakah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman.

Fasilitas sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya meliputi fasilitas distributor/gudang pangan olahan, sarana ritel baik modern maupun tradisional yang tersebar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya. Ketentuan “diperiksa sesuai ketentuan” ialah dilihat dari jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Dalam rumus perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan} = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
 $A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
 $B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
 $C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Target realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra BPOM yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Namun setelah dilakukan evaluasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM serta unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, target tersebut akan disesuaikan menjadi 85% mengingat capaian pada Triwulan I dan Triwulan II telah lebih dari 110%. Target 85% mulai berlaku setelah ditetapkan dalam revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya yaitu pada Triwulan III. Persentase ini diukur menggunakan *tools assesment* mandiri dengan rincian *output* sebanyak 87 sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan cakupan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112.50	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja pada Triwulan II dibandingkan dengan target pada Triwulan berjalan masuk pada kriteria capaian **Tidak dapat Disimpulkan**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan telah dilakukan sesuai dengan pedoman yaitu Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan target realisasi sebesar 80% hingga akhir Triwulan II dan realisasinya sebesar 90% menjadikan capaian sebesar 112.50% atau termasuk dalam kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**, Capaian 90% diperoleh dari 3 (tiga) komponen, yaitu ketepatan pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman dan jumlah sarana sesuai Rencana Pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut serta ketepatan waktu pelaporan. Dari tiga komponen tersebut, proporsi penilaian tertinggi terdapat pada ketepatan tindak lanjut (70%), kesesuaian pemeriksaan (20%) dan ketepatan waktu pelaporan (10%). Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan selanjutnya perlu lebih menitikberatkan pada ketajaman pengawasan, serta kesesuaian tindak lanjut dan perbaikan terhadap temuan oleh para pelaku usaha maupun lintas sektor terkait.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	80	90	112.50

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan yaitu 80%, realisasi mengalami peningkatan dari 88.57% menjadi 90% dan capaian kinerja antara Triwulan I sebesar 110.71% menjadi 112.50% pada Triwulan II tetap dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan yang berbeda dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah yang menyebabkan capaian menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan.

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan yaitu masih sesuai dengan Renstra BBPOM di Palangka Raya. Disisi lain, realisasi Triwulan II mengalami peningkatan dari Triwulan I sehingga capaian kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pedoman yaitu dari 50% pada Triwulan I menjadi 61,60% pada Triwulan II. Secara umum dari total keseluruhan 25 (dua puluh lima) sarana yang telah diperiksa, terdapat 22 (dua puluh dua) sarana yang telah memenuhi kesesuaian dalam tindak lanjut serta 3 (tiga) sarana yang tidak memenuhi kesesuaian dalam tindak lanjut, yaitu 2 (dua) sarana pada Triwulan I dan 1 (satu) sarana pada Triwulan II sehingga nilai realisasi kinerja menjadi bertambah.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	80	90	112,50	 Melampaui

Realisasi kinerja pada Triwulan II dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Dengan demikian pada Triwulan berikutnya dapat dievaluasi kembali target realisasi indikator pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan agar capaian pada Triwulan berikutnya dapat ditingkatkan kembali sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator ini merupakan indikator baru sehingga masih perlu penyesuaian terhadap pencapaian target maupun realisasi dan rencana kenaikannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dari sisi pemahaman petugas dan kompetensinya, metode pengukuran dan pelaksanaannya di lapangan maupun strategi pencapaiannya. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan atas tercapainya realisasi pada indikator ini, yaitu:

- Sampai akhir Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan, baik distributor, ritel modern dan tradisional sebanyak 25 (dua puluh lima) sarana yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin maupun bersamaan dengan kegiatan intensifikasi pengawasan menjelang hari raya.
- Tindak lanjut yang dilakukan dari 25 (dua puluh lima) sarana yang telah diperiksa tersebut ialah dilakukan terhadap 6 (enam) sarana (24%) yang memiliki rating penilaian C. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap hasil pemeriksaan pada sarana gudang/distributor ataupun ritel modern yang memiliki *rating* penilaian B perlu juga diberikan surat tindak lanjut. Sampai dengan Triwulan II terdapat 1 (satu) sarana distributor yang memiliki *rating* penilaian B namun belum diberikan surat tindak lanjut, sehingga ke depan perlu diperhatikan kembali adanya pedoman ini.
- Ketepatan waktu terkait dengan pelaporan, sampai akhir Triwulan II terdapat 4 (empat) sarana yang melewati *timeline* sehingga perlu diperhatikan oleh petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tercapainya realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan pada Triwulan II tidak lepas dipengaruhi dari penetapan target sebesar 80% yang masih dapat ditingkatkan kembali sehingga perlu dilakukan pembahasan terhadap penetapan target tersebut bersama stakeholder terkait seperti Biro Perencanaan dan Keuangan Badan

POM serta unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan Badan POM.

Hasil evaluasi tersebut perlu ditetapkan kembali dan revisi Renstra BBPOM di Palangka Raya. Dari hasil pembahasan tersebut, telah disepakati adanya penyesuaian kenaikan target dari 80% menjadi 85% sehingga diharapkan pada Triwulan III realisasi dapat memperoleh kategori sangat baik. Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam capaian kinerja indikator ini ialah dikarenakan adanya konsistensi pelaksanaan pemeriksaan terhadap rencana pelaksanaan serta ketepatan waktu dalam pelaporan SIPT. Faktor penunjang keberhasilan lainnya ialah kesesuaian terhadap pedoman dalam pemeriksaan yaitu mengacu pada ketentuan atau formulir pemeriksaan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CDPOB) yang sering disebut sebagai form 33. Faktor penunjang lainnya yang tak kalah penting ialah kesesuaian dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112.50	Rp. 22,778,313	Rp. 26,361,871	115.73	0.97	-0.03	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah melampaui target namun capaian realisasi anggaran juga melebihi target dan lebih tinggi dari capaian target sebesar 3,23%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi menjadi kurang dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Untuk hal ini, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan sehingga capaian anggarannya tidak lebih tinggi dari capaian kinerja indikator ini.

11

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Persentase sarana iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Defenisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Presentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi Sesuai Ketentuan adalah:

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.

- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan

= $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \right) \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \right) \times 100\%$

c. Akurasi pengambilan keputusan = $\left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \right) \times 100\%$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

a. Pemenuhan target pengawasan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \right) \times 100\%$

b. Ketepatan waktu pelaporan = $\left(\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \right) \times 100\%$

c. Akurasi pengambilan keputusan = $\left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \right) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (4)}}$

b. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\left(\frac{\text{capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}} \right) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$
- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
 - Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru yang tidak ada pada periode Renstra sebelumnya. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 88% dengan jumlah 913 iklan yang diukur menggunakan *Tools Assesment* mandiri dengan rincian *output* sebagai berikut:

- iklan Obat 163
- iklan Obat Bahan Alam 85
- iklan Obat Kuasi 15
- iklan Suplemen Kesehatan 50
- iklan Kosmetik 330
- iklan pangan 270

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan *tools* penilaian mandiri sesuai dengan rumus perhitungan diatas dan pada Triwulan I ini Balai besar POM di Palangka Raya 112,74%.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.92	113.55	Tidak dapat Disimpulkan

Pada Triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebanyak jumlah 913 iklan yang diukur menggunakan *Tools Assesment* mandiri dengan rincian ouput sebagai berikut:

- Iklan Obat 163
- Iklan Obat Bahan Alam 85
- Iklan Obat Kuasi 15
- Iklan Suplemen Kesehatan 50
- Iklan Kosmetik 330
- Iklan pangan 270

Jika dihitung menggunakan semua aspek penilaian masing-masing komoditi dari indikator ini, maka diperoleh realisasi persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan sebesar 99,92%. Target indikator ini bersifat *flat* yaitu sebesar 88%. Jika realisasi Triwulan II dibandingkan terhadap target Triwulan II akan memberikan angka capaian sebesar **113,55%** dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.21	112.74
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	88	99.92	113.55

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan yaitu 88%, realisasi mengalami peningkatan dari 112.74% menjadi 113.55% dan capaian kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II tetap dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan**. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan yang berbeda dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah yang menyebabkan capaian menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.92	113.55	 Melampaui

Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 88% sehingga target tahun 2025 sama sebesar 88%. Pada triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pengawasan iklan dengan jumlah 913 iklan yang diukur menggunakan *Tools Assesment* mandiri dengan rincian *output* sebagai berikut:

- Iklan Obat 163
- Iklan Obat Bahan Alam 85
- Iklan Obat Kuasi 15
- Iklan Suplemen Kesehatan 50
- Iklan Kosmetik 330
- Iklan Pangan 270

Seluruh hasil pengawasan iklan tersebut telah dilaporkan melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dengan tepat waktu. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan upaya dan pengawalan yang ketat untuk indikator ini sehingga dapat memperoleh capaian sangat baik.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hal yang menyebabkan capaian tidak dapat disimpulkan adalah dengan perubahan metode pengukuran pada periode renstra ini dibanding dengan periode Renstra sebelumnya sehingga menetapkan target terlalu rendah.

Untuk dapat memperbaiki kinerja pada triwulan selanjutnya akan dilakukan antara lain:

1. Mengusulkan peningkatan target indikator kinerja pada indikator ini.
2. Memperhatikan realisasi perencanaan yang telah disusun setiap bulannya untuk masing-masing komoditi baik target pengawasan iklan secara online, media sosial, internet dan media lainnya.

3. Memperhatikan *timeline* input SIPT karena yang dihitung jadi capaian adalah hasil pengawsan iklan yang sudah di kirimkan dari akun SIPT kepala UPT.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Kegiatan Pengawasan iklan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun setiap bulannya.
- Kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya.
- Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Kegiatan Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	113.55	Rp. 10,643,000	Rp. 2,655,000	24.95	4.55	3.55	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja yang sesuai target namun realisasi anggaran yang tidak tercapai, dengan capaian hanya 24,95%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp29.610.000 mengalami peningkatan akibat adanya buka blokir anggaran yang dilakukan di bulan April, kondisi ini berkontribusi pada rendahnya realisasi anggaran karena adanya kendala dalam mencapai target realisasi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan pasca relaksasi pemblokiran.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Efektivitas
Pengawasan Sarana Produksi
Pangan Fortifikasi

Sasaran Kegiatan II yaitu Meningkatkan efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
12.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	▲ Akan Tercapai	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					100	100	▲ Akan Tercapai	Baik

12

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian yang telah ditetapkan dalam manual IKU.

Wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, maka cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi hanya dilakukan terhadap 1 sarana tersebut.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti

sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Tindak lanjut yang dilakukan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan olahan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100,00	Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target sebesar 100 % memperoleh realisasi sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh Capaian sebesar 100%, dengan kriteria **Baik**.

Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan pada bulan Februari dan telah dilaporkan sebagai capaian kinerja pada triwulan I, dikarenakan target pada tahun 2025 sebesar 1 sarana, maka capaian tersebut akan menjadi hasil kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya pada tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	100	100	100

Target Triwulan I dan Triwulan II tidak mengalami perubahan dan bersifat *flat* sampai dengan akhir tahun 2025. Realisasi pada triwulan II tidak terjadi perubahan dan capaian kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II Tetap hal ini disebabkan karena kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi telah dilaksanakan pada Triwulan I dimana telah ditargetkan sarana produksi pangan fortifikasi adalah 1 sarana.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100.00	 Akan Tercapai

Sesuai dengan definisi operasional dalam manual IKU untuk cakupan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja dimana Balai Besar POM di Palangka Raya hanya memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi dengan target tahun 2025 adalah 100%. Realisasi pada Triwulan II adalah 100% tidak terjadi perubahan dari Triwulan I sehingga capaian pada indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan kinerja pada indikator persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengambilan kesimpulan yang tepat terhadap hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan.
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

Meski capaian indikator telah memenuhi kriteria Baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh :

1. Penyesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan akibat adanya efisiensi anggaran.
2. Pembahasan definisi operasional yang dilakukan pada bulan Maret.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

1. Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan.
2. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk.
3. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
4. Kerjasama Lintas Sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi pangan fortifikasi.
5. Program pengembangan kompetensi petugas pada bidang pemeriksaan terutama pengawasan pangan fortifikan melalui Bimtek Nasional Pengawas Pangan mengenai Fortifikasi pangan yang diselenggarakan oleh Direktorat pengawasan produksi pangan olahan pada tanggal 19 - 20 Februari 2025 sebagai upaya peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan agar dapat dilakukan dengan tepat sesuai pedoman.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	Rp. 4,208,000	Rp. 4,208,000	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang sama dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Untuk indikator kinerja ini telah selesai dilakukan kegiatan pemeriksaannya karena hanya ada 1 sarana di wilayah BBPOM Palangka raya, ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran telah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Sasaran Kegiatan Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan ketiga yaitu Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
12.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5	71	75.3	103.86	106.06	 Tercapai / Melampaui	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					103.86	106.06	 Tercapai / Melampaui	Sangat Baik

13 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. *Grand Design* Penguatan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan 2024-2025 menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM salah satunya melalui penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Standar Kemampuan Laboratorium adalah standar yang ditetapkan Badan POM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM pada 4 komponen penilaian antara lain pemenuhan Standar Ruang Lingkup, pemenuhan Standar Kompetensi, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Pemenuhan SKL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 dengan pembagian dan fungsi sebagai berikut :

a. **Tingkat 4 : Laboratorium Balai Regional**

Terdiri dari 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan

Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya.

b. Tingkat 3 : Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi

Terdiri dari sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang berada di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya termasuk dalam laboratorium tingkat 3.

c. Tingkat 2 : Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Komponen dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan laboratorium tingkat 3 sebagai berikut :

- 1) Standar Ruang Lingkup (SRL);
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
- 4) Standar Metode Analisis yang terverifikasi.

Cara perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 =

$$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL Biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71	75.3	106.06	Sangat Baik

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Obat dan Makanan Nasional. Pada triwulan II 2025 didapatkan hasil penilaian sebesar 75.3 dengan capaian sebesar 106.06% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 71 dengan kriteria **Sangat Baik**

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69.50	75.00	107.91
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	71	75.3	106.06

Terdapat peningkatan realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II jika dibandingkan dengan triwulan I yaitu sebesar 0.3 namun terjadi penurunan capaian pada triwulan II sebesar 0.85 disebabkan adanya peningkatan target dari triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.50	75.3	103.86	 Tercapai/Melampaui

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah melebihi target tahunan sebesar 72.50 dengan capaian 103.86% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan perhitungan, nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan mendapat realisasi sebesar 75.3 dan capaian sebesar 106.06% dengan kriteria capaian terhadap target **Sangat Baik**.

Komposisi penilaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium yang diperoleh sebagai berikut :

- Nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 78.1
- Nilai pemenuhan Peralatan sebesar 78.6
- Nilai pemenuhan Kompetensi sebesar 90
- Nilai pemenuhan Metode terverifikasi 25.0

Pencapaian target kinerja didukung oleh perencanaan pemenuhan standar kemampuan Laboratorium yang disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti tersedianya reagensia, media, baku pembanding, alat laboratorium, ketersediaan suku cadang, bahan habis pakai serta program pemeliharaan alat.

Perencanaan ini disusun dalam bentuk Roadmap pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang akan dilaksanakan setiap bulan dan dievaluasi setiap akhir triwulan.

Selain perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap roadmap yang disusun juga telah dilakukan untuk memastikan pencapaian target indikator sesuai dengan yang direncanakan.

Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk mengendalikan faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator. Pada triwulan II terdapat verifikasi metode yang hasilnya belum memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga untuk memenuhi realisasi verifikasi metode dilakukan penambahan judul verifikasi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan antara lain

Terselenggaranya program uji verifikasi metode pada triwulan II 2025 sesuai dengan perencanaan pada roadmap pemenuhan standar kemampuan laboratorium, hal ini meningkatkan nilai pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Standar Kemampuan Laboratorium	Realisasi TW II 2025
Ruang Lingkup	-
Peralatan	Pengadaan 1 unit alat GCMS
Kompetensi	-
Metode Analisis Terverifikasi	OBA : penambahan 1 metode analisis terverifikasi Pangan : penambahan 1 metode analisis terverifikasi Mikrobiologi : penambahan 3 metode analisis terverifikasi

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW II 2025	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025 (%)	Capaian IK TW II 2025 (%)	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp. 4.786.337.900	Rp. 4.389.826.603	91.72	106.06%	1.16	0.16	100% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp 7.479.574.000. Selama triwulan II tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp 3.050.135.000 yang telah dibuka pada bulan April 2025.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing Wilayah Kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan tersebut, diperoleh capaian sasaran kegiatan pada Triwulan II sebesar **115.63**. Hasil selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
14.	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	87.19	91.88	105.38	105.38	▲ Tercapai/ Melampaui	Sangat Baik
15.	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	35	50	N/A	142.86	N/A	Tidak dapat disimpulkan
16.	Jumlah Desa Pangan Aman	3	70	70	N/A	100.00	N/A	Baik
17.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	70	80	N/A	114.29	N/A	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Sasaran Kegiatan					N/A	115.63	N/A	N/A



Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan, Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) kepada masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran KIE BPOM mewakili kumpulan individu atau komunitas seperti komunitas lokal/masyarakat adat, komunitas sekolah, komunitas profesi, organisasi masyarakat dan atau komunitas berbasis kepentingan tertentu lainnya.

Tujuan Pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan BPOM;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan pembagian peran dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih informasi Obat dan Makanan dari BPOM sebagai sumber informasi yang valid dan terpercaya;

4. Meningkatkan pengetahuan serta mendorong sikap dan perilaku positif masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan KIE yang dilaksanakan oleh BPOM diukur melalui indikator kinerja Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Tingkat Efektivitas KIE adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE yang dilaksanakan meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Pengukuran Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE;
2. Konten atau Informasi KIE;
3. Pemahaman Audiens KIE;
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan/atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 (satu) bulan terakhir. Teknik survei berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online* survei dan jumlah responden dihitung berdasarkan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel Krejcie Morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap Triwulan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	91.88	105.38	Sangat Baik

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE pada Triwulan II tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diperoleh nilai 91.88 dengan capaian sebesar 105.38% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	89.83	92.72
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	87.19	91.88	105.38

Apabila dilakukan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi triwulan sebelumnya yaitu Triwulan I Tahun 2025, capaian Triwulan II Tahun 2025 meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai Indeks KIE Media menjadi 93.22.

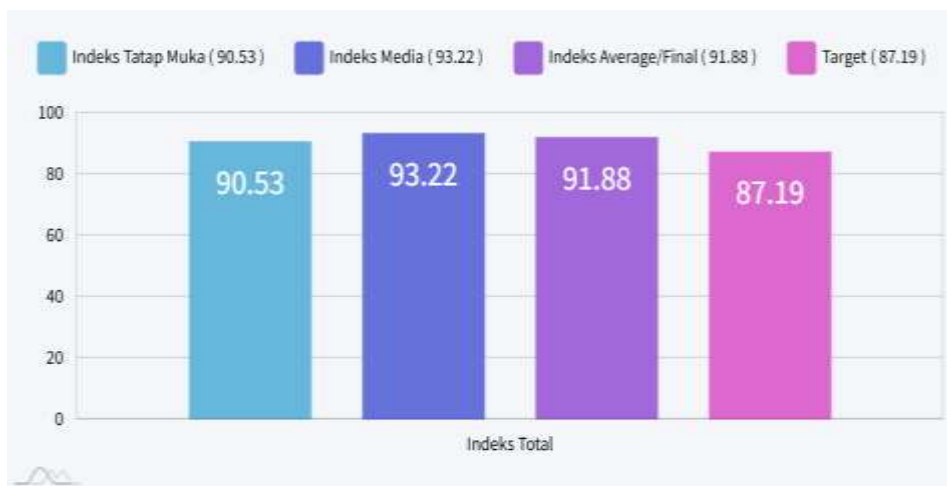
C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	91.88	105.38	▲ Tercapai/ Melampaui

Capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Triwulan II Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahun 2025, telah tercapai sebesar 105.38% dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II tahun 2025, tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) responden yang terdiri dari 196 (seratus sembilan puluh enam) responden survei KIE Tatap Muka dan 93 (sembilan puluh tiga) responden KIE Media. Tingkat efektivitas KIE Triwulan II diperoleh dengan capaian sebagai berikut:



Pengukuran kriteria penilaian pada masing-masing jenis KIE adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, rata-rata responden menilai narasumber/petugas KIE/sumber informasi yang disajikan bagus sehingga audiens dapat memahami materi dengan baik dan merasakan manfaatnya. Responden juga menilai konten/materi yang disajikan sangat menarik, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi KIE merupakan kunci penting untuk menjangkau masyarakat luas dari berbagai generasi sesuai dengan media sosial yang digemari.

Materi KIE yang sangat diingat oleh responden adalah:

1. Tugas dan wewenang BPOM;
2. Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan;
3. Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM Mobile;
4. Tanya HALOBPOM/Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan;
5. Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM;
6. Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan;
7. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Responden juga memberikan masukan materi KIE yang dibutuhkan, antara lain:

1. Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi Obat dan Makanan yang aman;
2. Penjelasan Berita/isu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat;
3. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Atas capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Palangka Raya tahun 2025, untuk perbaikan kinerja pada Triwulan II direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE Obat dan Makanan melalui pengembangan ragam kegiatan sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal, melibat *influencer/public figure* serta mitra strategis BPOM lainnya;
2. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda *Setting* Nasional Tahun 2025;
3. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41.4%), media sosial (13.9%), dan webinar/daring (9.5%).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa agenda KIE dan pemberdayaan masyarakat yang sudah berlangsung dan dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II Tahun 2025, antara lain:

1. KIE Sosialisasi Keamanan Pangan Siap Saji bagi SPPG dalam Rangka Program MBG di lokasi SPPG Jl. Borneo Kota Palangka Raya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang;
2. Bimtek Kader Keamanan Pangan bagi Kelompok Rentan di Palangka Raya, sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
3. KIE Pada Kalteng Expo 2025 dengan jumlah pengunjung 105 (seratus lima) orang;
4. Forum Konsultasi Publik dalam rangka Wujudkan Pelayanan Publik Prima melalui Keterbukaan Informasi dan Pengawasan Pelayanan Publik yang Efektif dan Partisipatif, dengan jumlah peserta 52 (lima puluh dua) orang.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	105.38	Rp 48.216.600	Rp 40.971.200	84.97	1.24	0.24	95% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 272.628.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 170.411.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 102.217.000.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	35	50	142.86	Tidak dapat disimpulkan

Jumlah sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota target kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dalam Program Terpadu Prioritas Nasional. Penetapan pemilihan wilayah pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap Triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan II 2025 tahapan kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman yang telah dilakukan adalah tahapan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi tahun 2025. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor merupakan tahapan awal rangkaian pelaksanaan Program Terpadu Prioritas Nasional yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor terkait dalam upaya mensukseskan program, yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025. Selain itu pada Triwulan II ini, juga telah dilaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah baik target intervensi maupun target perluasan. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) sekolah yang menjadi target intervensi, yaitu SKHN 2 Palangka Raya, SDN 3 Tanjung Pinang, MIS Noor Al-Banjari Palangka Raya, MIN 3 Kota Palangka Raya, SMPN 4 Palangka Raya, SMPN 7 Palangka Raya, SMPN 12 Palangka Raya, dan SMKN 5 Palangka Raya dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 secara daring. Sedangkan Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah terhadap 15 (lima belas) sekolah yang menjadi target perluasan pada tanggal 21 Mei 2025 di Kabupaten Pulang Pisau secara luring.

Persentase realisasi tahapan Program Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman pada Triwulan II ini sebesar 50% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 142.86% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	35	50	142.86

Target kinerja Triwulan II (35%) mengalami peningkatan sebesar 30% apabila dibandingkan dengan target Triwulan I (5%) sedangkan realisasi Triwulan II (50%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 45% dibandingkan dengan realisasi Triwulan I (5%). Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 50% apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya (Triwulan I) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Tingginya capaian pada Triwulan II dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan dikarenakan kegiatan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan sebelum libur sekolah. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan target tahapan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di tahun selanjutnya dengan memperhatikan *event* yang secara rutin dilaksanakan oleh sekolah.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	50	N/A	N/A

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 50% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II tahun 2025, capaian BBPOM di Palangka Raya melampaui target yang telah ditetapkan. Atas capaian indikator Jumlah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Palangka Raya Triwulan II tahun 2025, untuk peningkatan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor terkait;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan II tahun 2025 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Sekolah dengan Pembudayaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman antara lain:

1. Melaksanakan tahapan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 di Aula Kantor Walikota Palangka Raya dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah serta Lintas Sektor terkait untuk mensukseskan Program Terpadu Prioritas Nasional menuju kemandirian pangan;
2. Melaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah terhadap 8 (delapan) sekolah target intervensi di Kota Palangka Raya pada tanggal 30 April 2025 secara daring;
3. Melaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah terhadap 15 (lima belas) sekolah target perluasan di Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 21 Mei 2025 secara luring.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	142.86	Rp 21.495.000	Rp 22.937.000	106.71	1.34	0.34	95% (Efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 344.372.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 311.747.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 32.625.000.

Sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui Program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi *stunting*, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dalam Program Desa Pangan Aman, desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu desa yang menjadi target adalah desa *stunting*. Tahapan Program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan Advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi Keamanan Pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada Program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Desa Pangan Aman	70	70	100.00	Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Penetapan pemilihan wilayah/lokus intervensi pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-

PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan II 2025 tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang telah dilakukan adalah tahapan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi. Kegiatan ini merupakan tahapan awal pelaksanaan rangkaian kegiatan dari Program Terpadu Nasional Desa Pangan Aman yang dilaksanakan pada bulan April 2025. Persentase realisasi tahapan program Desa Pangan Aman pada Triwulan II ini sebesar 70% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Desa Pangan Aman	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	70	70	100.00

Target kinerja Triwulan II (70%) mengalami peningkatan sebesar 65% apabila dibandingkan dengan target Triwulan I (5%) sedangkan realisasi Triwulan II (70%) secara signifikan juga mengalami peningkatan sebesar 65% dibandingkan dengan realisasi Triwulan I (5%). Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 70% apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya (Triwulan I) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kriteria Baik.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan evaluasi dan analisis keberhasilan guna menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Desa Pangan Aman	3	70	N/A	N/A

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 70% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan II ini, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Atas capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Palangka Raya Triwulan II tahun 2025 ini, untuk peningkatan kinerja pada triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan Lintas Sektor terkait;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program Desa Pangan Aman di Triwulan II ini antara lain:

1. Dampak efisiensi anggaran dirasakan cukup signifikan terhadap pelaksanaan bimtek komunitas dimana petugas BBPOM di Palangka Raya mendapatkan kesulitan untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan Bimtek Komunitas yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan secara mandiri. Hal ini karena tingkat pemahaman yang masih dirasa kurang untuk melakukan bimtek komunitas secara mandiri;
2. Laporan pelaksanaan Bimtek Komunitas masih belum dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh terkait dokumentasi kegiatan;
3. Koordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya secara daring dengan Desa/Kelurahan dirasa kurang efektif.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan II 2025 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Desa Pangan Aman antara lain:

1. Melaksanakan tahapan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sektor terkait untuk mensukseskan program Terpadu Prioritas Nasional menuju kemandirian pangan;
2. Melaksanakan tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia unggul yang berkualitas dan kompeten dalam membantu tugas pengawasan keamanan pangan di desa/kelurahannya demi mewujudkan kemandirian pangan serta membantu upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka *stunting* di daerah;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Komunitas yang dilakukan secara mandiri oleh Kader Keamanan Pangan.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	100	Rp. 23.145.000	Rp. 9.553.389	41.28	2.42	1.42	80% (Tidak Efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja yang sesuai target namun realisasi anggaran yang tidak tercapai, dengan capaian hanya 41.28%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 501.455.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 461.650.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 39.805.000.

17

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Sedangkan komunitas pasar adalah kelompok yang meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar dan anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar di Pasar Rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70	80	114.29	Tidak dapat disimpulkan

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pada Triwulan II Tahun 2025 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilakukan adalah tahapan Advokasi Komitmen Lintas Sektor di Kota Palangka Raya yang

menjadi lokus intervensi tahun 2025 ini, Bimtek & Penyuluhan Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar. Persentase Realisasi tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II ini sebesar 80% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 114.29% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5	5	100
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	70	80	114.29

Target kinerja Triwulan II (70%) mengalami peningkatan sebesar 65% apabila dibandingkan dengan target Triwulan I (5%) sedangkan realisasi Triwulan II (80%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 75% dibandingkan dengan realisasi Triwulan I (5%). Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 80% apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (Triwulan I) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Tingginya capaian pada Triwulan II dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan ini dikarenakan pelaksanaan seluruh tahapan ditargetkan 100% di bulan Juli 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan dimajukan di Triwulan II untuk mengantisipasi apabila ada kendala/hambatan apabila dilaksanakan di Triwulan III. Hal ini kedepannya akan dijadikan bahan evaluasi dan analisis dalam menetapkan target tahapan dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun selanjutnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	80	N/A	N/A

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 80% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi Triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I tahun 2025, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian triwulan II dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Atas capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Palangka Raya Triwulan II tahun 2025, untuk peningkatan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target *output* dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan II tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas antara lain:

1. Melaksanakan tahapan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sektor terkait untuk mensukseskan program Terpadu Prioritas Nasional menuju kemandirian pangan;
2. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Rajawali bersama dengan komunitas pasar dalam rangka penyebaran informasi terkait keamanan pangan berupa pembuatan konten keamanan pangan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Pasar di Pasar Rajawali pada tanggal 7 Mei 2025;
4. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2025 dalam upaya untuk memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar melalui penyebaran informasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada pedagang pasar.

F. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	114.29	Rp14,700,000	Rp10,299,383	70.06	1.63	0.63	90% (efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil efisien, berdasarkan hasil analisis capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kinerja. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 137.071.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 110.536.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 26.535.000.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pendampingan
UMKM dalam Pemenuhan Standar
Keamanan dan Mutu

Keberhasilan sasaran kegiatan Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu diukur dari 1 (satu) indikator inerja Utama (IKU) sebagaimana dapat terlihat dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
18.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82.80	61	62,33	N/A	102,18	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	Sangat Baik
Nilai Kinerja Organisasi					N/A	114.05	N/A	Sangat Baik

18

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Selaku institusi pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai salah satu misi dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Badan POM berperan penting dalam pendampingan pelaku usaha untuk memenuhi aspek keamanan, mutu dan khasiat/manfaat sehingga dapat memenuhi ketentuan izin edar. Dalam menjalankan misi tersebut maka ditetapkanlah pengukuran indikator kinerja terhadap Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan.

BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM telah melaksanakan kegiatan pendampingan UMKM guna mendukung indikator tersebut dengan realisasi sebesar 62.33%. Indikator ini merupakan indikator yang sama dengan indikator yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (2024) namun dengan definisi operasional yang berbeda sesuai dengan Petunjuk Teknis pendampingan yang telah ditetapkan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	61	62.33	102.18	Sangat Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 dengan target sebesar 61 % memperoleh realisasi sebesar 62.33%. Dengan realisasi tersebut, BBPOM di Palangka Raya memperoleh Capaian sebesar 102.18%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19	21,67	114,05
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	61	62,33	102,18

Target Triwulan I dan Triwulan II meningkat karena merupakan persentase tahapan pendampingan yang dilakukan sesuai juknis pendampingan dari Unit pengampu masing-masing komoditi. Realisasi pada triwulan II mengalami peningkatan namun capaian kinerja antara Triwulan I dan Triwulan II menurun hal ini disebabkan karena adanya pengajuan perubahan target bulanan pada awal Triwulan II menjadi lebih tinggi dari perencanaan awal tahun, hal ini dilakukan dikarenakan tahapan pendampingan UMKM Kosmetik telah selesai di bulan April dibuktikan dengan telah terbitnya SPA CPKB UMKM Kosmetik yang didampingi.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82.80	62.33	N/A	N/A

Realisasi Triwulan II yang merupakan hasil penilaian terhadap pemenuhan tahapan pendampingan UMKM sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan yang merupakan hasil penilaian jumlah UMKM yang memenuhi standar yang dibuktikan dengan terbitnya Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan, karena kedua penilaian tersebut berbeda satuan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi tahapan pendampingan pada Triwulan II sebesar 62,33% dan telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya *carry over* pendampingan UMKM Kosmetik pada tahun sebelumnya, yang tetap dilanjutkan pada tahun berjalan hingga terselesaikannya tahapan pendampingan pada bulan April dengan terbitnya SPA CPKB;
2. Komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pendaftaran menguat dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan komitmen pelaku usaha ;
3. Kesadaran pelaku usaha dalam mengurus legalitas produk meningkat;
4. Kapasitas dan kompetensi fasilitator/pendamping UMKM meningkat dengan mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Unit Pengampu.
5. Dilaksanakannya coaching dan mentoring dalam penyusunan dan perbaikan denah UMKM OBA PT. Berkah Mama Noniah oleh PIC pendampingan OBA Direktorat PMPU OBA secara daring pada tanggal 25 Juni 2025
6. Terselenggaranya Bimtek CPPOB sebagai salah satu tahapan pendampingan UMKM Pangan Olahan secara hybrid pada tanggal 14-16 Mei 2025 bekerjasama dengan Rumah BUMN Pertamina

Meski capaian indikator Sangat Baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

1. Penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran;
2. Pembahasan definisi operasional dan sosialisasi juknis yang dilaksanakan pada bulan April, yang mengakibatkan perubahan pada tahapan pendampingan UMKM pangan olahan yang telah dilaksanakan secara tidak berurutan.
3. Tidak berjalannya mekanisme pendampingan UMKM menggunakan Fasilitator Mahasiswa dengan skema praktek lapangan mata kuliah kewirausahaan.

Dengan capaian kinerja pada Triwulan II Sangat Baik, dirasa masih perlu adanya perbaikan kinerja antara lain:

1. Mengikuti sosialisasi juknis pendampingan yang dilakukan oleh Unit Pengampu;
2. Pelaksanaan tahapan pendampingan yang berurutan sesuai dengan petunjuk teknis;
3. Pelibatkan lintas sektor yang memiliki program serupa guna peningkatan kinerja dan efisiensi kegiatan;
4. Mengubah skema pendampingan UMKM menggunakan Fasilitator Mahasiswa dari praktek lapangan mata kuliah kewirausahaan menjadi skema mahasiswa magang untuk dapat meningkatkan kualitas dokumen dari para pelaku usaha.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan antara lain:

1. Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha UMKM;
2. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan pendaftaran produk;
3. Kegiatan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dibidang obat dan makanan khususnya dalam pemenuhan legalitas usaha;
4. Kegiatan koordinasi Lintas sektor terutama dalam pembentukan Fasilitator eksternal (fasilitator Mahasiswa) guna pendampingan pelaku usaha secara mandiri.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	102,18	Rp3.500.000	Rp5.780.000	165,14	0,62	-0,38	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah melampaui target namun capaian realisasi anggaran juga melebihi target dan lebih tinggi dari capaian target sebesar 62,96%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi menjadi kurang dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. untuk hal ini yang perlu kami perbaiki adalah perencanaan yang lebih baik lagi sehingga capaian anggarannya tidak lebih tinggi dari capaian kinerja indikator ini.



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan Keenam yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja UPT. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
19.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	96	38	33,33	34.72	87.71	▼ Perlu Upaya Keras	Cukup
Capaian Sasaran Kegiatan					34.72	87.71	▼ Perlu Upaya Keras	Cukup

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut :

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$(Jumlah\ perkara\ SPDP \times 0.15 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ I \times 0.55 + Jumlah\ perkara\ P21 \times 0.85 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ II \times 1) / Jumlah\ Target\ Perkara \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut termasuk di dalamnya tahapan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

19

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	38	33.33	87.71	Cukup

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan II sebesar 33.33%. Jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 38% akan memberikan angka capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 87.71% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	18	33.33	185.17
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	38	33.33	87.71

Pada Triwulan I Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya mencatat realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar **33.33%**. Realisasi yang sama juga tercatat pada **Triwulan II Tahun 2025**, yakni sebesar **33.33%**, tanpa adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan **target kinerja tahunan sebesar 96%**, capaian hingga Triwulan II baru menyentuh **sepertiga dari target**, atau **baru memenuhi 87.71% dari target semester I** apabila target dicapai secara proporsional per semester. Stagnasi capaian ini menunjukkan bahwa **belum terdapat progres signifikan dalam peningkatan efektivitas penyidikan** antara Triwulan I dan II sehingga upaya penyidikan masih perlu ditingkatkan guna mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	96	33.33	34.72	 Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan II sebesar 33.33%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 96% akan memberikan angka capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 34.72% dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**. Indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya merupakan gambaran *progress* penanganan perkara sekaligus pencapaian output perkara. Target sebesar 96% pada akhir tahun tercapai jika target sebanyak 3 (tiga) perkara dapat diselesaikan seluruhnya sampai dengan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada pihak kejaksaan).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan periode Triwulan II tahun 2025 dengan nilai capaian 87.17% dan kriteria **Cukup**.

Pencapaian ini didukung oleh target penanganan perkara sebanyak 1 (satu) perkara dalam Triwulan I tahun 2025, progres penanganan perkara telah mencapai tahap 2 dan terdakwa telah dinyatakan bersalah serta mendapatkan vonis pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Pada Triwulan II tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya belum menambah jumlah capaian perkara penyidikan atau stagnan, stagnansi capaian ini menunjukkan bahwa belum terdapat progres signifikan dalam peningkatan efektivitas penyidikan antara Triwulan I dan II.

Analisis penyebab capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Besar POM di Palangka Raya periode Triwulan II tahun 2025 dengan kategori **Cukup**, antara lain :

1. Pada Triwulan II tahun 2025, target penanganan perkara direncanakan penambahan sebanyak 1 (satu) perkara hingga tahap SPDP. Namun dalam realisasinya, belum didapatkan penambahan perkara sampai tahap SPDP, hal ini dikarenakan kasus/target operasi penindakan yang ditangani tidak naik menjadi *Pro Justitia* namun mendapatkan sanksi administratif (pembinaan)
2. Belum didapatkan kasus yang naik menjadi perkara pada Triwulan II (Selama periode pelaporan, dilakukan operasi intelijen dan pengawasan terhadap pelaku usaha sediaan farmasi. Ditemukan pelanggaran administratif yang belum memenuhi unsur formil dan materiil tindak pidana, sehingga tidak dilanjutkan ke penyidikan. Sebagai penegakan kepatuhan, diberikan sanksi administratif berupa pembinaan, surat peringatan, dan kewajiban perbaikan. Kegiatan ini mendukung kinerja penindakan non justitia dan memperkuat pendekatan persuasif dalam pengawasan)

3. Dalam pelaksanaan operasi intelijen didapatkan kasus yang diduga melakukan pelanggaran di bidang Kesehatan namun diperlukan pendalaman informasi terkait pemenuhan unsur pasal dan ketersediaan Barang Bukti
4. Jaringan intelijen/informan belum memberikan informasi A1 terkait pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan keenam, yaitu *"Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya"*, BBPOM di Palangka Raya melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui satu kegiatan utama yang tertuang dalam POK tahun 2025, yaitu: Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Palangka Raya Mata Anggaran QCD)

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021, yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, termasuk pelaksanaan kegiatan intelijen serta penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Palangka Raya pada triwulan II tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan penyidikan serta pendampingan proses hukum, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan/Operasi intelijen terhadap dugaan informasi tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sumber pengaduan Masyarakat, hasil patroli siber maupun kegiatan intelijen rutin
2. Selama bulan pelaporan, telah dilaksanakan kegiatan operasi intelijen dan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan) terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran di bidang sediaan farmasi. Dari hasil kegiatan tersebut, ditemukan pelanggaran yang belum memenuhi unsur pidana, namun terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan administratif seperti izin edar, atau sarana distribusi. Berdasarkan hasil klarifikasi dan analisis, pelanggaran tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena belum memenuhi unsur formil maupun materiil tindak pidana. Namun, sebagai bentuk penegakan kepatuhan, terhadap pelaku usaha diberikan sanksi administratif berupa pembinaan, surat peringatan, dan kewajiban melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas ini turut mendukung capaian target kinerja penindakan non justitia serta memperkuat pendekatan persuasif dalam pengawasan, meskipun tidak berkontribusi terhadap jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan dengan tindak lanjut pemusnahan barang temuan berupa obat keras Tanpa Keahlian dan Kewenangan, Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan rekomendasi PSK
3. Pemberian Layanan Keterangan Ahli, yang diberikan atas permintaan Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum Kalimantan Tengah guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara terkait sediaan farmasi dan pangan olahan

Rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Peningkatan kegiatan/operasi intelijen dalam pulbaket(pengumpulan bahan keterangan) informasi terkait pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan APH lain nya dan instansi lain pengemban fungsi intelijen dalam upaya pengumpulan bahan keterangan dan pengungkapan tindak pidana bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Tengah
3. Pembentukan, pembinaan jaringan intelijen sediaan farmasi dan pangan olahan

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	87.71	Rp179,167,500	Rp72,659,500	40.55	2.16	1.16	86% (tidak efisien)

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja mencapai target dengan capaian 87.71% dan realisasi anggaran yang tidak tercapai, dengan capaian hanya 40.55%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi anggaran untuk indikator ini adalah Rp 358,335,000. Selama Triwulan I tahun 2025, terjadi pemblokiran anggaran senilai Rp 285,711,000 yang telah dibuka pada bulan April 2025. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya realisasi anggaran karena adanya kendala dalam mencapai target realisasi dalam kurun waktu tiga bulan pasca relaksasi pemblokiran.



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
20.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	55.56	100.00	▼ Perlu upaya Keras	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					55.56	100.00	▼ Perlu upaya Keras	Baik



Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling Siber*) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Cara perhitungan dan Formula :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	Baik

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan II sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 50% akan memberikan angka capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	50	50	100.00

Realisasi indikator kinerja pada Triwulan II tahun 2025 ini 50% jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Triwulan sebelumnya yaitu Triwulan I tahun 2025 akan memberikan gambaran stagnasi atau tetap, hal ini dikarenakan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan di tahun 2025. Stagnasi antar Triwulan dapat disebabkan oleh proses adaptasi terhadap indikator baru, baik dari sisi pemahaman, metode pengukuran, maupun pelaksanaan di lapangan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55.56	 Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan II sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 90% akan memberikan angka capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2025 sebesar 55.56% dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**. Indikator kinerja persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di BBPOM di Palangka Raya merupakan gambaran *progress* pembuatan laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan sekaligus pencapaian *output* Laporan Analisis. Target sebesar 50% pada akhir Triwulan II didapatkan jika terpenuhinya laporan analisis penelusuran siber yaitu Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan setiap bulan berjalan dan dilaporkan. Target sebesar 90% pada akhir tahun tercapai jika terselesaikannya laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di ranah siber dan cegah tangkal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di BBPOM di Palangka Raya periode Triwulan II tahun 2025 dengan nilai capaian 100% dan kriteria **Baik**.

Analisis pendukung penyebab capaian persentase keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Besar POM di Palangka Raya periode TW II tahun 2025 dengan kategori **Baik**, antara lain :

1. Capaian Target Laporan Analisis Triwulan II tahun 2025
Pada Triwulan II Tahun 2025, target penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditetapkan sebesar 50%. Target ini dihitung berdasarkan persentase ketepatan waktu pelaporan hasil Analisis Penelusuran Siber yang dilakukan selama periode April hingga Juni 2025. Ketepatan waktu pelaporan menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja dan efektivitas proses analisis siber yang dilaksanakan;
2. Komitmen dan dukungan pimpinan
Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kegiatan Analisis Penelusuran Siber (meliputi Patroli Siber dan Penjejak Digital/Profiling Siber) berjalan dengan baik berkat komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan.

Dukungan tersebut tercermin dalam arahan strategis, fasilitasi sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas fungsi, yang secara signifikan berkontribusi terhadap kualitas dan ketuntasan laporan yang disusun;

3. Dukungan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI

Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan patroli siber dan profiling kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Palangka Raya. Dukungan ini memperkuat tindak lanjut rekomendasi *takedown* terhadap konten ilegal melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan *Indonesian E Commerce Association* (IdEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing, sehingga mempercepat proses penanganan pelanggaran di platform digital;

4. Dukungan dan Kerja Sama Internal di BBPOM di Palangka Raya

Sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring, BBPOM di Palangka Raya membentuk Tim Patroli Siber (Patroli Siber) lintas fungsi. Tim ini dibentuk atas inisiatif Kepala BBPOM di Palangka Raya dan melibatkan berbagai unit kerja di luar fungsi penindakan, seperti Tata Usaha, Infokom, Pemeriksaan, dan Pengujian. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat antara fungsi penindakan dan fungsi-fungsi lainnya, mempercepat pengumpulan informasi, serta memperkaya basis data pengawasan. Melalui kerja sama ini, pengawasan daring dapat dilakukan secara lebih optimal, akurat, dan responsif terhadap ancaman kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Pembentukan Patroli Siber menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi lintas fungsi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menegaskan komitmen BBPOM di Palangka Raya dalam melindungi masyarakat dari produk ilegal dan berbahaya. Namun kualitas hasil patroli siber oleh Tim Patroli Siber Lintas Fungsi tidak semuanya memenuhi standar yang ditetapkan.

Rekomendasi yang diberikan adalah :

Monitoring dan revidi secara berkelanjutan terhadap hasil patroli siber yang sudah dilakukan oleh tim patroli siber.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan ketujuh, yaitu "*Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif*", BBPOM di Palangka Raya melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui satu kegiatan utama yang tertuang dalam POK tahun 2025, yaitu: Koordinasi (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Palangka Raya Mata Anggaran AEA)

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021, yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, termasuk pelaksanaan cegah tangkal, dan analisis penelusuran siber terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam rangka Penyusunan laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan II tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. *Patroli Siber* terhadap pelanggaran atau kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring merupakan salah satu upaya strategis yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh Tim Patroli Siber BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau, mendeteksi, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum di dunia maya yang berkaitan dengan peredaran produk obat dan makanan. Hasil dari patroli ini kemudian dilaporkan dalam bentuk link atau tautan melalui Aplikasi *Dashboard Crawler* (ADC) yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan *takedown* kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI, sebagai bagian dari langkah perlindungan masyarakat terhadap produk ilegal atau berisiko
2. *Profiling* kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring merupakan langkah lanjutan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim Patroli Siber BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri secara lebih mendalam berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan di dunia maya, serta menggali informasi yang lebih komprehensif. Melalui *profiling* ini, akan dianalisis apakah pelanggaran yang terjadi memenuhi unsur pasal dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditentukan langkah tindak lanjut yang tepat, baik berupa tindakan *Pro Justitia* (penegakan hukum melalui jalur pidana) maupun *Non Pro Justitia* (penanganan administratif atau lainnya). *Profiling* menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kasus mendapatkan respons yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Pelaksanaan penyusunan Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui analisis penelusuran Siber Triwulan II tahun 2025 yang telah dilakukan tindak lanjut oleh Direktorat Siber Obat dan makanan berdasarkan hasil monev bulanan, dengan data sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah Link yang dilaporkan	Rekomendasi Pengajuan		Keterangan
			<i>Takedown</i>	<i>Profiling</i>	
1	Januari	18	18	3	Link/akun/tautan
2	Februari	18	18	3	Link/akun/tautan
3	Maret	29	29	4	Link/akun/tautan
4	April	30	30	6	Link/akun/tautan
5	Mei	19	19	5	Link/akun/tautan
6	Juni	26	26	8	Link/akun/tautan

4. Pelaksanaan penyusunan Laporan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan pada BBPOM di Palangka Raya yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan : Pada semester 1 tahun 2025 atau sampai dengan Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil analisis dan *policy brief* Direktorat Cegah Tangkal Obat dan Makanan sebanyak 9 (sembilan)
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan : Pada semester 1 tahun 2025 atau sampai dengan Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemetaan kerawanan kejahatan dan pelaporan melalui ADP sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) data dengan persentase yang disetujui adalah 100%

- Penggalangan pemangku kepentingan : Pada semester 1 tahun 2025 atau sampai dengan Triwulan II tahun 2025 telah dilakukan penggalangan pemangku kepentingan kepada 5 (lima) *stakeholder* yaitu Bea Cukai Palangka Raya, Kepolisian Resor Pulang Pisau, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, IAI Kabupaten Kapuas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
- Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan dengan status on progress sampai dengan akhir tahun 2025

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	Rp600,000	Rp100,000	16.67	6.00	5.00	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah sesuai target namun realisasi anggaran yang tidak mencapai target, dengan capaian hanya 16.67%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1, yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 7,439,000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 71,339,000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 1,100,000. Yang perlu diperbaiki adalah perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dana yang menjadi target realisasi anggaran di triwulan III ini.



Sasaran Kegiatan

Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran Kegiatan 8 yaitu Layanan Publik UPT yang Prima di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
21.	Layanan Publik UPT yang Prima	4.7	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
Capaian Sasaran Kegiatan					0	0	N/A	N/A

21

Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di instansi pemerintah merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Untuk memantau kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan BPOM dilaksanakan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Implementasi PEKPPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023, memiliki peran krusial sebagai bagian integral dari indikator kinerja bagi UPT BPOM dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Mengukur Efektivitas dan Akuntabilitas Pelayanan:** PEKPPP menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengukur sejauh mana UPT BPOM telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator-indikator yang diukur dalam PEKPPP, seperti kepuasan pengguna layanan, waktu penyelesaian layanan, dan penanganan pengaduan, secara langsung mencerminkan efektivitas operasional dan akuntabilitas UPT BPOM kepada masyarakat.

2. **Identifikasi Area Peningkatan:** Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, UPT BPOM dapat mengidentifikasi area-area dalam penyelenggaraan pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil PEKPPP menjadi *feedback* berharga untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan infrastruktur pelayanan. Dengan demikian, PEKPPP bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi dan Kepercayaan Publik:** Informasi mengenai kinerja pelayanan publik yang dihasilkan melalui PEKPPP dapat menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data kinerja pelayanan, mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh UPT BPOM. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
4. **Keselarasan dengan Tujuan Strategis Nasional:** Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan PEKPPP secara efektif, UPT BPOM turut berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
5. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Data dan informasi yang dihasilkan dari PEKPPP menjadi landasan yang kuat bagi pimpinan UPT BPOM dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan. Keputusan yang didasarkan pada data kinerja yang valid akan lebih terukur dampaknya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan kepada seluruh unit pelayanan publik di Lingkungan BPOM dan diukur berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya dilakukan pada triwulan III s.d IV tahun 2025 dengan target sebesar 4,7. Pada Triwulan II belum dilaksanakan PEKPPP Tahun 2025, sehingga pengukuran indikator belum dapat dilakukan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target bulan ini
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum ada target bulan ini

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya diperoleh setelah mengikuti PEKPPP Tahun 2025, sehingga capaian terhadap realisasi kinerja triwulan sebelumnya belum dapat dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran kinerja yang berkesinambungan, capaiannya dapat dilihat melalui program/kinerja yang menunjang capaian kinerja. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	4.7	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya diperoleh setelah mengikuti PEKPPP Tahun 2025, sehingga capaian realisasi kinerja triwulan II terhadap target target tahunan belum dapat diperoleh.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dalam mengawal pelaksanaan Pelayanan Publik yang prima di BBPOM di Palangka Raya, strategi keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Mendalam Terhadap Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, dilakukan dengan :

- Survei dan Konsultasi : Melakukan survei berkala, forum diskusi, atau kotak saran untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
- Analisis Data Pengaduan : Memanfaatkan data pengaduan sebagai sumber informasi berharga untuk mengidentifikasi area layanan yang perlu diperbaiki (misalnya terkait sarana prasarana, koneksi internet dan digitalisasi layanan).
- Segmentasi Pengguna Layanan : Memahami dan menyediakan layanan publik bagi kelompok rentan/pelanggan prioritas.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayan Publik, dilakukan dengan:

- Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi : Memberikan pelatihan yang relevan terkait keterampilan pelayanan, komunikasi, teknologi informasi, dan pemahaman peraturan perundang-undangan baik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan dan sosialisasi
- Penilaian Kinerja dan Sistem Penghargaan : Menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik dalam memberikan pelayanan publik
- Membangun Budaya Pelayanan Prima : Mendorong nilai-nilai empati, responsivitas, profesionalisme, dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan.

3. Optimalisasi Proses dan Prosedur Pelayanan, dilakukan dengan:

- Penyederhanaan Alur Layanan : Mengidentifikasi dan menghilangkan tahapan yang tidak efisien atau berbelit-belit.
- Digitalisasi Layanan : Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan secara daring (*online*), mempermudah akses, mengurangi waktu dan biaya.
- Standarisasi Layanan : Menyusun standar pelayanan yang jelas, terukur, dan transparan bagi setiap jenis layanan.
- Implementasi Sistem Manajemen Mutu : Menerapkan standar mutu seperti ISO 9001 atau standar pelayanan publik yang ditetapkan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten.

4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas, dilakukan dengan:

- Mekanisme Pengaduan yang Efektif : Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan transparan dalam penanganannya melalui kanal resmi BBPOM di Palangka Raya
- Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pelayanan : Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur melalui survei SKM dan Layanan Petugas
- Transparansi dan Akses Informasi : Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait jenis layanan, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian.
- Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan : Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan dengan:

- Pengembangan Aplikasi Layanan Publik: Membangun aplikasi yang *user-friendly* untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan secara daring.
- Penyediaan Informasi Melalui *Website* dan Media Sosial: Memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi penting terkait layanan kepada masyarakat.
- Sistem Informasi Manajemen Pelayanan: Mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk mengelola data pelayanan, memantau kinerja, dan menghasilkan laporan yang akurat
- Pemanfaatan Data Analitik : Menganalisis data pelayanan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perbaikan.

Atas capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya, untuk perbaikan kinerja pada triwulan II direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan
2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik
3. Mengawal implementasi Inovasi Layanan Publik SMART LAURA secara berkesinambungan
4. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang Layanan Publik sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan review Standar Layanan Publik dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.26 TAHUN 2025 tentang Standar Layanan Publik di BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya
- Telah dilakukan review Maklumat Pelayanan dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor : OT.03.04.16A.01.25.27 Tahun 2025 dengan menambahkan komitmen dalam memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta anak-anak) serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya
- Telah membuat publikasi hasil SKM Mandiri bulan Januari-Juni tahun 2025 pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya
- Telah memperhatikan kebijakan jam pelayanan/kerja bagi pelanggan dan aturan pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan
- Telah menerapkan aturan terkait penerapan 5S di di area layanan publik
- Telah melaksanakan sosialisasi terkait konsultasi dan pengaduan menggunakan SP4N-LAPOR kepada masyarakat/publik
- Melaksanakan pelaporan layanan melalui www.simpellpk.pom.go.id
- Menyusun Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagai PPID Pelaksana BBPOM di Palangka Raya
- Melakukan publikasi Keamanan Obat dan Makanan pada media luar ruang (Baliho) pada jalan protokol dengan materi : Cek Produk Kosmetik Aman, BPOM Mobile, SKM 2024 & Maklumat Pelayanan
- Melaksanakan Bimtek Penyediaan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan kepada seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya, tenaga kontrak, sekuriti dan resepsionis pada bulan Mei 2025
- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh stake holder pelayanan publik, pengguna layanan, pakar, dan perwakilan organisasi masyarakat pada bulan Juni 2025
- Melaksanakan perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya dalam memenuhi standar layanan publik bagi kelompok rentan
- Melaksanakan dan memantau Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kab/Kota melalui Inovasi SMART LAURA di kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas dan Kota Palangka Raya (layanan tatap muka sesuai jadwal).

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025 (%)	Capaian Indikator Kinerja TW II Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	11.200.000	1.280.000	11.43	0.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan diakhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggarannya, di triwulan II ini realisasinya belum mencapai target dengan capaian 11.43%. Perlu dilakukan perbaikan perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dananya, agar diakhir tahun nanti capaiannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp145.537.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp127.812.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp17.725.000.



Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah
Unit Organisasi yang Optimal

Sasaran Kegiatan 9 yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW II		1 Tahun	TW II	1 Tahun	TW II
22.	Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
23.	Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
24.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
25.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
Capaian Sasaran Kegiatan					0	0	N/A	N/A

22

Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM

Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup berbagai aspek, seperti organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi melibatkan perubahan fundamental dalam cara pemerintah beroperasi, termasuk struktur organisasi, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan.

Reformasi birokrasi mencakup berbagai aspek penting, seperti :

- **Organisasi:** Memastikan kelembagaan pemerintah efisien dan terstruktur.
- **Tata Laksana:** Menyederhanakan prosedur kerja dan meningkatkan efisiensi.
- **Peraturan Perundang-undangan:** Memastikan adanya dasar hukum yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
- **Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur negara.
- **Pengawasan:** Memperkuat mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan.
- **Akuntabilitas:** Menegakkan prinsip pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- **Pelayanan Publik:** Meningkatkan kualitas dan menjangkau masyarakat.
- **Pola Pikir dan Budaya Kerja:** Mengubah mindset dan perilaku aparatur negara menuju yang lebih positif dan berintegritas.

Tujuannya adalah :

- **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel** : Melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- **Birokrasi yang Efektif dan Efisien** : Meningkatkan produktivitas dan hasil kerja.
- **Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas** : Menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17.5 %

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan Zona Integritas	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada Triwulan II dibandingkan dengan target pada Triwulan berjalan masuk pada kriteria capaian Belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan Indikator Kinerja ini memiliki target yang bersifat tahunan yang capaiannya akan diketahui pada Triwulan III - Triwulan IV. Terdapat perubahan kriteria dari pengukuran sebelumnya dimana kriteria Tidak Dapat Disimpulkan mulai pada capaian di atas 120% diturunkan menjadi di atas 110% disesuaikan dengan SE terbaru untuk Pengukuran dan pelaporan Kinerja 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Nilai Pembangunan Zona Integritas	0	0	Belum ada target bulan ini
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum ada target bulan ini

Realisasi kinerja pada Triwulan II dibandingkan dengan target pada Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 Tidak Dapat Dilakukan (N/A) akibat belum adanya realisasi pada Triwulan II maupun Triwulan I dikarenakan Indikator Kinerja ini memiliki target yang bersifat tahunan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan Zona Integritas	87.83	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada Triwulan II dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian Belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan belum adanya realisasi pada Triwulan II sebagaimana sudah dijelaskan di poin A di atas. Mempertimbangkan progres kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja RB di tiap Pokja dan pemenuhan persyaratan yang tertuang pada LKE disertai data dukungannya, maka indikator ini kemungkinan akan tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun pada Triwulan II belum ada realisasi pada indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas dikarenakan indikator ini realisasinya bersifat tahunan, namun Implementasi Zona Integritas akan dilakukan secara kontinyu sepanjang tahun. Implementasi ZI berarti BBPOM di Palangka Raya berkomitmen melaksanakan program yang ada di area perubahan yang ada pada 6 kelompok kerja (Pokja), yaitu :

Pokja I Manajemen Perubahan

Pokja II Penataan Tata Laksana

Pokja III Penataan Sistem SDM Aparatur

Pokja IV Penguatan Akuntabilitas

Pokja V Penguatan Pengawasan

Pokja VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Implementasi ZI juga dilakukan dengan menyusun rencana kerja prioritas dan disusun berdasarkan *road map* oleh setiap Pokja yang bertujuan mengoptimalkan pembangunan ZI sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa terwujud dan meningkat sehingga dampak positifnya bisa dirasakan.

Pada Triwulan II ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan/program kerja yang mendukung indikator ini. Hal ini terlihat dengan dukungan peran aktif setiap anggota pokja dan *Agent of Change* (AoC), rencana kerja yang disandingkan dengan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai jadwal dan berjalan lancar, pengisian LKE dan data dukung yang tidak melebihi *deadline* dan sosialisasi aktif di berbagai *platform* media kepada masyarakat dan lintas sektor merupakan hal positif yang telah dilaksanakan BBPOM di Palangka Raya.

BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2024 berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pada Surat Inspektur Utama Badan POM No : B-PI.06.06.7.11.24.657 tanggal 28

November 2024, Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Palangka Raya yang memuat saran perbaikan/rekomendasi untuk dibuat rencana dan tindak lanjutnya sebagai berikut :

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Belum seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilakukan dan hasil pemantauan secara berkala belum dilengkapi dengan kendala serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL tersebut;	Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta RATL dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun tersebut	Menyusun ulang rencana kerja (Renja) Pembangunan ZI sesuai yang memuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk tahun 2025. Akan disusun format pemantauan Renja yang baru versi tahun 2025, yang lebih lengkap dengan menambahkan kolom berisikan kendala serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL.
2	Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Menyusun peta kompetensi dan gap kompetensi kebutuhan organisasi dan existing sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi Pemenuhan SDM pengelola pengembangan kompetensi dimana pada tahun 2024, pengembangan kompetensi belum optimal dikelola karena ketidaksesediaan Analisis SDM Aparatur
3	Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat belum dilakukan secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara berkala	Refreshment terhadap SOP Monitoring dan Evaluasi pengaduan masyarakat agar dapat dilaporkan secara konsisten. Melakukan monitoring berkala elamahamen dan bajakah oke
4	Belum terdapat reviu standar pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan FKP Tahun 2023	Melakukan reviu standar pelayanan berdasarkan hasil FKP	Melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan berdasarkan rekomendasi hasil Forum Konsultasi Publik. Telah dilakukan reviu terhadap standar Pelayanan Publik berdasarkan hasil FKP tanggal 25 September 2024 yang menghasilkan SK Standar Pelayanan Publik No OT.03.04.16A.01.25.26 tanggal 02 Januari 2025
5	Belum seluruhnya	Melaksanakan	<i>Continuous improvement</i> dilaksanakan

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Inovasi yang dikembangkan didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak dari penerapan inovasi tersebut	continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	antara lain dengan melakukan : 1. Penyempurnaan tampilan inovasi Kahayan Tutu Bahalap untuk pemberian informasi terkait jenis parameter uji, tarif layanan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan PMK No. 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan pengawas Obat dan Makanan, 2. Melakukan identifikasi penambahan parameter uji dengan timeline 1x24 jam 3. Penyempurnaan tampilan Learning Center Inovasi Elamahamen (E-Commerce dan pelaku Usaha Nakal Masyarakat Harap Melaporkan) terus dipertahankan dengan terus dilakukannya publikasi pada media daring milik BBPOM di Palangka Raya dan pada kegiatan-kegiatan <i>offline</i> yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya. Dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kemanfaatan dan keefektifan inovasi Elamahamen itu sendiri. Inovasi Elamahamen pada bulan November 2024 dikembangkan oleh tim AoC dengan mekanisme "jemput bola" yakni menempelkan poster Elamahamen di Sarana Distribusi diawali dengan Sarana Distribusi Kosmetik untuk semakin membumikan Elamahamen pada masyarakat di Kalimantan Tengah agar berani melaporkan jika ada pelanggaran di bidang obat dan makanan latarbelakang dan <i>Continuous improvement</i> dalam inovasi Monelaku dilakukan upaya peningkatan ketelusuran data terkait pelaporan kinerja dan output yang dihasilkan dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. dengan cara sheet kertas kerja akan dibuatkan tautan yang terkoneksi dengan laporan kertas kerja sehingga data tertelusur dengan jelas 11 Inovasi yang dikembangkan oleh AOC telah didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak dari penerapan inovasi tersebut yang tertuang dalam Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Aksi (Inovasi) AOC Tahun 2024
6	Telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat namun belum direplikasi.	Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi. Inovasi diharapkan	1. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, telah mulai diluncurkan inovasi unggulan yang baru yaitu inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat namun belum direplikasi, inovasi tersebut adalah SMART LAURA (Sistem Manajemen Layanan Publik yang Akurat, Responsif,

No	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut	Transparan, Lengkap, Aman dan User-Friendly). 2. Dengan berkolaborasi bersama AOC akan diciptakan inovasi-inovasi pada seluruh area perubahan serta mendokumentasikan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi tersebut. 3. Inovasi-inovasi tiap area perubahan yang akan disusun kedepannya bersama AoC, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain serta melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan inovasi tersebut.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Implementasi ZI merupakan indikator kinerja yang program kegiatannya tersebar di setiap fungsi/bagian, sehingga pengukuran capaian keberhasilan mempertimbangkan banyak aspek. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi agar tercapai realisasi melebihi target. Inventarisir kegiatan tersebut dituangkan dan dievaluasi oleh masing-masing Pokja agar pengukuran terhadap indikator bisa terlihat.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian indikator ini, pada triwulan II telah dilaksanakan berbagai kegiatan/aktivitas yang diinisiasi oleh Balai maupun kegiatan pusat yang diikuti Balai, sebagai berikut :

1. Adapun kegiatan yang menunjang implementasi ZI pada Triwulan II ini adalah :
2. Pengisian LKE dan pemenuhan data dukung Triwulan I 2025 sampai dengan Triwulan II 2025
3. Desk evaluasi implementasi ZI oleh Tim Penilai Internal
4. Sharing session meraih WBK di BPOM Jambi (daring)
5. Sharing session dengan BBPOM Aceh dalam rangka ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) untuk Inovasi Smart Laura (daring)
6. Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) dan Core Values BerAKHLAK pegawai BBPOM di Palangka Raya
7. Melanjutkan pelaksanaan rencana kerja/kegiatan/inovasi dan melengkapi data dukung LKE Triwulan II 2025
8. Menjalankan program kerja AoC sebagai wujud komitmen BBPOM di Palangka Raya dalam implementasi ZI secara konsisten dan berkelanjutan

Atas pelaksanaan kegiatan di atas, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- Benchmark dengan BBPOM di Pangkal Pinang yang berturut-turut juara 1 Tim AOC, direncanakan jadwal pelaksanaannya dengan BPOM Pangkal Pinang

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Capaian Indikator Kinerja TW II Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai Pembangunan Zona Integritas	3.455.237.035	3.621.622.199	104.82	0.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan diakhir tahun sehingga yang dapat analisis adalah capaian realisasi anggarannya, di Triwulan II ini realisasinya telah melampaui target dengan capaian 104.82%.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp8.994.600.900 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp1.009.548.150 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp7.985.052.750.

23

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Palangka Raya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka raya dengan rentang sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2025 diperoleh hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi penilaian AKIP yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target pada TW I Tahun 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Pada triwulan I 2025 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum dapat dinilai capaian indikatornya karena belum terdapat target indikator serta realisasi.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	83.37	0	Belum ada realisasi pada TW I Tahun 2025

Realisasi kinerja pada triwulan I 2025 Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) belum dapat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan IV tahun 2024 disebabkan pada triwulan I 2025 belum terdapat target indikator serta realisasi.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	83.87	0	Belum ada realisasi pada TW I Tahun 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada triwulan I 2025 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 disebabkan pada triwulan I 2025 belum terdapat target indikator serta realisasi.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam pelaksanaan SAKIP. Berdasarkan evaluasi capaian Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2024 belum berhasil mencapai target, namun terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Penilaian tahun 2024 terhadap masing-masing komponen SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Dokumen revisi RAPK tanggal 8 Mei 2024 dan laporan evaluasi paruh waktu Renstra belum dipublikasikan pada subsite BBPOM di Palangka Raya
- Terdapat perubahan Kepala BBPOM di Palangka Raya pada bulan September 2024 namun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 belum dilakukan proses perubahan

2. Pengukuran Kinerja

Pemenuhan kriteria komponen pengukuran kinerja berupa tersedianya manual IKU dan SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja. namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- SOP Mikro Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan telah mencantumkan tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan data, namun belum mencantumkan tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan setelah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja capaian indikator tidak dapat ditelusur/ berbeda dengan dokumen monev (sumber data).
- Perbedaan realisasi indikator kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
- Belum tertib dalam mengisi kolom kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024
- Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum optimal yaitu belum mencantumkan kendala yang memadai atas kegagalan pencapaian target.

3. Pelaporan Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja pada laporan kinerja telah disajikan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Belum disajikan perbandingan realisasi kinerja yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya pada laporan kinerja triwulan II dan III tahun 2023 dan 2024.
 - b. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja pada SKP pimpinan, SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
 - c. Laporan kinerja tahun 2023 tidak menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.
 - d. Terdapat realisasi indikator kinerja periode berjalan dengan capaian menurun terus menerus namun belum disusun rencana aksi secara memadai.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Laporan evaluasi internal telah disusun setiap triwulan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
- a. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP
 - b. Laporan evaluasi internal triwulan I dan III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
 - c. Laporan evaluasi internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan
 - d. Laporan evaluasi internal triwulan III tahun 2024 belum menyajikan identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjutnya per indikator kinerja
 - e. Perbedaan penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut pada SIMETRIS B09 tahun 2024, laporan evaluasi internal triwulan III tahun 2024 dan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024.
 - f. Laporan evaluasi internal belum menyajikan identifikasi kendala untuk indikator yang belum mencapai target dan/atau kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target.
 - g. Laporan evaluasi internal belum menyajikan rencana aksi yang spesifik/relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi

Atas capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2024, untuk perbaikan kinerja pada tahun 2025, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite satuan kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat
 - b. Melakukan pemutakhiran Perjanjian Kinerja saat terjadi perubahan pimpinan unit kerja
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Menyempurnakan SOP Mikro pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mencantumkan tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan saat terjadi kesalahan/perubahan data
 - b. Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/ sesuai dengan dokumen monev (sumber data)
 - c. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
 - d. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
 - e. Menyusun identifikasi kendala pada aplikasi SIMETRIS secara memadai

3. Pelaporan Kinerja
 - a. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya
 - b. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
 - c. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran
 - d. Menyusun rencana aksi yang memadai terhadap realisasi indikator kinerja yang menurun terus menerus tiap triwulannya
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Merencanakan pengembangan kompetensi personel Tim Monitoring dan evaluasi kinerja terkait implementasi SAKIP
 - b. Menyusun laporan evaluasi internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
 1. Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
 2. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan
 3. Identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjut per indikator kinerja secara memadai
 - c. Memastikan keselarasan penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut pada SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2025 merupakan tahun pertama penyusunan dokumen perencanaan Renstra 2025-2029, dimana terdapat perubahan sesuai dengan visi misi Presiden terpilih dan perubahan alat manajemen yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard (BSC) menjadi logical frame. Pada triwulan I telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung penerapan SAKIP antara lain:

- Penyelesaian pengukuran dan pelaporan kinerja tahunan 2024 berupa pelaporan capaian kinerja tahun 2024, pelaksanaan evaluasi internal, penyusunan laporan kinerja tahunan 2024
- Penyusunan dokumen perencanaan berupa dokumen PK-RAPK 2025 dan draft rancangan awal Renstra 2025-2029
- Penyusunan target tahun 2026
- Reviu target tahun 2025 pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025
- Pelaksanaan bimtek SAKIP dan pelaporan kinerja

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, sampai dengan triwulan I Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah menindaklanjuti sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja. Melakukan penyusunan perencanaan strategis tahun 2025-2029, mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite satuan kerja
2. Pengukuran Kinerja. Belum dilakukan aktivitas pengukuran kinerja pada triwulan I.
3. Pelaporan Kinerja. Melakukan penyusunan laporan kinerja tahun 2024
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Melakukan evaluasi internal tahun 2024.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Capaian Indikator Kinerja TW II Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	Rp. 90.000	Rp. 90.000	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan II TA 2025, untuk penilaian IKPA TW II dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi nya karena perhitungan output baru dapat dinilai diakhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 87.373.400 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 84.673.400 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 2.700.000.

24

Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian EKA pada tingkat Satuan Kerja dilakukan terhadap aspek kinerja perencanaan anggaran diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran”(capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), dimana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran.

Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian IKPA dilakukan terhadap 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran (25%), aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran (50%) dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%), sebagai berikut:



Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

Nilai NKA	Kategori	Konversi
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50.01 s.d 60	Kurang	2
60.01 s.d 80	Cukup	3
80.01 s.d 90	Baik	4
90.01 s.d 1000	Sangat Baik	5

Pada tahun 2025 terdapat perubahan frekuensi pengukuran pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, dimana pada tahun-tahun sebelumnya, dilakukan penilaian setiap bulan, pada tahun 2025, pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada akhir tahun.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target pada TW I Tahun 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan target yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024	Kriteria Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	92.01	0	Belum ada realisasi pada TW I Tahun 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi untuk triwulan IV Tahun 2024 adalah 92,03. Untuk triwulan I Tahun 2025, belum ada realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran karena penilaian pada akhir tahun sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan IV Tahun 2024.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	5	0	Belum ada realisasi pada TW I Tahun 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan target yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur pada akhir tahun 2025. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa kali revisi anggaran sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang

diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 yang ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan RI dengan diterbitkannya Surat Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Penyampaian Data Besar Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 oleh Sekretaris Utama BPOM tanggal 4 Februari 2025. Berdasarkan surat tersebut dari total alokasi anggaran sebesar Rp 22.128.308.000,- efektif menjadi Rp 8.877.527,-.

Sebelumnya, setelah DIPA Tahun Anggaran 2025 terbit tanggal 2 Desember 2024, telah dilakukan revisi blokir mandiri belanja perjalanan dinas sebesar Rp 1.294.901.000,- sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Sekretaris Utama BPOM tentang Penyampaian Data Pemblokiran dalam rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2024. Setelah beberapa kali mengalami revisi dengan revisi terakhir pada triwulan I berdasarkan Surat Sekretaris Utama tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 tanggal 21 Maret 2025, terhadap blokir belanja barang dan belanja modal, pagu anggaran BBPOM di Palangka Raya yang efektif dapat digunakan menjadi Rp 17.235.978.000,-.

Sebagai tindak lanjut atas dinamika pelaksanaan anggaran pada triwulan I dengan dilakukannya beberapa kali revisi anggaran berupa pemblokiran mandiri pada belanja barang, belanja modal dan pemenuhan gaji PPNPN calon PPPK, terbit surat Direktur Pelaksana Anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 pada tanggal 20 Februari 2025 dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama triwuln I TA 2025.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : MARET													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sarker	Uraian Sarker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran				Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengetahuan UP dan TUP	Capaian Output	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
1	043	063	432872	BALAI BESAR PENSAWAS : OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00	

Sebagai perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran TW I 2025, direkomendasikan beberapa hal :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulan dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.
2. Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.
3. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan perencanaan kegiatan.
4. Melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan memastikan dokumen telah sesuai.
5. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

6. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun 2025, namun komponen penilaiannya yang berasal dari IKPA dinilai setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain :

- Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai perencanaan sehingga berdasarkan surat Direktur Pelaksana Anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 sehingga semua satker mendapatkan nilai 100
- Percepatan penyelesaian belanja modal pada triwulan I tahun 2025.

Kegiatan yang belum efektif dilaksanakan dan menjadi kendala dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Adanya efisiensi anggaran sehingga terjadi perubahan nilai UP yang belum memperhitungkan penggunaan KKP, penyediaan uang pelaksanaan menggunakan mekanisme LS
- Adanya perubahan proses pengadaan yang beralih dari e-katalog versi 5 menjadi e-katalog versi 6 sehingga dibutuhkan penyesuaian sistem.
- Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun;

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW II Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW II 2025	Capaian Indikator Kinerja TW II Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	461.215.174	461.215.174	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan II TA 2025, untuk penilaian IKPA TW II dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi nya karena perhitungan output baru dapat dinilai diakhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 1.876.549.600 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 842.201.350 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 1.034.348.250.

25

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interim Pemerintah (SPIP) mengatur kerangka kerja dan proses yang digunakan pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasional dan sumber daya yang dimilikinya. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini mencakup identifikasi dan analisis risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada Renstra tahun 2025-2029, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, manajemen risiko menjadi salah satu indikator kinerjanya.

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Dalam penerapannya dilakukan penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi mengimplementasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Tingkat maturitas risiko digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Lima kategori tingkat maturitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dalam tabel berikut:

Kategori Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	0-16	1	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	17-32	2	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	33-48	3	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai diatur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	49-64	4	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Risk Enabled	65-80	5	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan.

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Dengan Target Triwulan Yang Bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW II Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	NA	NA	Belum ada target pada TW II 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya
	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Dengan Target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW Tahun II 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	83,87	0	0	 Perlu Upaya Keras

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya diukur pada akhir tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya merupakan indikator kinerja baru pada dokumen Renstra 2025-2029 untuk mengukur tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang mulai diukur menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025. Meskipun demikian, Manajemen Risiko telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tingkat

maturitas manajemen risiko tahun 2024 BBPOM di Palangka Raya adalah 2.938 dengan tingkat maturitas *Risk Aware*, di dalamnya masih menunjukkan terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- Belum seluruh tim yang mengelola manajemen risiko mengikuti pelatihan manajemen risiko dan belum terdapat perencanaan pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai
- Belum menyusun kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak dan belum terdapat kertas kerja yang disertai dengan justifikasi penentuan level risiko
- Masih terdapat tindakan mitigasi pada Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang sama dengan aktivitas pengendalian yang telah dilakukan (*existing control*)
- Belum memanfaatkan Rapat Evaluasi Kinerja maupun Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan reviu/pembahasan manajemen risiko yang dikaitkan dengan capaian kinerja
- Belum menindaklanjuti masukan Auditor Internal sistem manajemen terintegrasi terkait manajemen risiko

Terhadap beberapa kelemahan penerapan Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya tahun 2024, direkomendasikan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- Menyusun rencana pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai secara berkesinambungan, serta memastikan seluruh tim yang mengelola manajemen risiko telah mendapatkan pelatihan terkait manajemen risiko
- Menyusun kriteria kemungkinan dan dampak dan kertas kerja yang disertai dengan justifikasi penentuan level risiko
- Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- Melakukan pembahasan manajemen risiko dikaitkan dengan capaian kinerja pada rapat evaluasi misalnya pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau rapat evaluasi kinerja
- Menindaklanjuti seluruh masukan Auditor Internal terkait manajemen risiko

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Atas rekomendasi perbaikan pada penilaian tahun 2024, beberapa hal yang telah diindaklanjuti oleh BBPOM di Palangka Raya pada triwulan II adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi risiko pada masing-masing Indikator kinerja utama tahun 2025
- Melakukan integrasi manajemen risiko dengan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN
- Memberikan pelatihan untuk pegawai yang belum mengikuti pelatihan manajemen risiko
- Menyusun rencana pelatihan manajemen risiko bagi pegawai baru (PPPK)
- Membagi peran aktivitas pengendalian risiko bagi seluruh pegawai dan menuangkannya pada SKP

Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas aktivitas pengendalian risiko dari daftar risiko yang sudah ada dan mengidentifikasi potensi risiko yang belum terpetakan sebagai bahan masukan pada identifikasi daftar risiko pada triwulan IV tahun 2025.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja TW II	Target Realisasi Anggaran TW II	Realisasi Anggaran TW II	Capaian Realisasi Anggaran TW II	Indeks Efisiensi	Capaian efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00	Rp90.000	Rp1.505.160	1672,40	0,00	-1,00	Tidak Efisien

Pengukuran belum dapat dilakukan pada indikator kinerja ini, karena penilaian kinerjanya dilakukan diakhir tahun. Jadi yang bisa analisis adalah capaian realisasi anggarannya, di triwulan 2 ini realisasinya telah melampaui target dengan capaian 1672.40%. Perlu dilakukan perbaikan perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dananya, agar diakhir tahun nanti capaiannya dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp87.373.400 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp84.673.400 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp2.700.000.

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang diindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Retargeting sampel akibat adanya efisiensi anggaran	1. Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya supaya bisa masuk kelaboratorium di awal bulan 2. Melakukan pengujian sampel sesuai dengan timeline yang ditetapkan 3. Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan untuk mencapai target	TW II	Menjaga konsistensi realisasi sesuai dengan perencanaan dan menyusun ulang perencanaan karena pengembalian anggaran dan pengembalian target			Capaian indikator kinerja tidak dapat disimpulkan (>110%)
		Capaian tidak dapat disimpulkan	Konsisten menjaga realisasi dan perencanaan sesuai target	TW II	Menjaga konsistensi realisasi sesuai dengan perencanaan dan menyusun ulang perencanaan karena pengembalian anggaran dan pengembalian target			Capaian sangat baik
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTDESO		1. Menyusun rencana pelaksanaan KIE Farmakovigilans 2. Melaksanakan KIE Farmakovigilans pada Triwulan II 3. Melakukan Pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan	TW II	Menyusun rencana pelaksanaan KIE Farmakovigilans			Telah dilakukan persiapan KIE Farmakovigilans yang akan dilaksanakan tanggal 24 April 2025, dengan mengundang 45 peserta tenaga kesehatan/tenaga medis.
					Pelaksanaan KIE Farmakovigilans			

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			1. Melakukan Pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan	TW IV		Pemantauan Pelaporan e-MESO	s.d TW IV	1. Telah dilaksanakan KIE PV bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 48 sarana, tanggal 24 April 2024 2. Terdapat 1 sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD ESO di Bulan April : RSUD dr. Murdjani Sampit
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampling pangan targeted dan PIRT dilakukan bersamaan oleh petugas yang sama	Sampling pangan targeted MD/ML dan sampel pangan PIRT dilakukan dalam waktu yang berbeda atau oleh petugas berbeda untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kategori sampling.	TW III	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.	Manajemen dalam pembagian penugasan sampling antar indikator agar tidak tumpang tindih	TW III	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	Belum diperoleh angka capaian indikator kinerja	Mengikuti progress pembahasan DO	TW II	Mempersiapkan sarana prasarana untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan			Sudah dapat dinalukan penilaian untuk IK ini dengan hasil 100%
					Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu			

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran	Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM Lokal dalam penerapan CPPOB IRT dan kesesuaian label pangan olahan	TW IV		1. pembinaan pelaku usaha PIRT dalam pembuatan label bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) 2. pengembangan inovasi terkait pembuatan label yang benar menurut peraturan perundang-undangan	TW IV	Sampling produk PIRT yang Berisiko terlaksana sesuai target pada Triwulan 2
			Retargeting sampel PIRT	TW I	Retargeting sampling			
		Retargeting sampel sesuai pembukaan blokir anggaran	Percepatan sampling dan pelaporan agar memperpendek timeline pengujian	April	sampling dan pelaporan sampling dilakukan dalam 1 hari			Sampling produk PIRT yang Berisiko terlaksana sesuai target pada Triwulan 2
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	1. Persentase pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebesar 27,59% pada akhir TW 1 2. Persentase pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebesar 27,80 pada akhir TW 2	Meningkatkan monev	TW IV		Melakukan desk/konsultasi/monev CAPA secara berkala dengan pelaku usaha/penanggung jawab	TW IV	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi oleh pelaku usaha
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum melakukan pengawasan ke sarana produksi karena cuma ada 3 target direncanakan di TW2	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW II	Segera melakukan pengawasan ke saran produksi pada bulan April			Telah dilakukan pemeriksaan sarana

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		Capaian tidak dapat disimpulkan, karena jumlah sarana yang diperiksa sedikit	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW IV		Melakukan pemeriksaan saran setiap TW	TW IV	
			Mengusulkan revisi target IKU ke unit pengampu menjadi 92% supaya capaian masuk kriteria sangat baik	TW II	Usulan untuk menaikkan target renstra			Usulan kenaikan target telah disetujui di tahun 2025 target dari 87 menjadi 92
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana industri pangan olahan	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW II	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi pangan olahan di Kab. Kotawaringin Timur pada bulan April 2025	Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan di tiap TW hingga TW 3	TW III	Jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah diperiksa sebanyak 7 sarana.
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum bisa dihitung capaian IK	Mengikuti progress pembahasan DO	TW II		Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu	TW II	dikecualikan dari perhitungan kinerja TW I tahun 2025,
		Capaian tidak dapat disimpulkan	Meningkatkan monev	TW IV	menyampaiakn usulan perubahan target pada desk renstra tanggal 23-24 Juni 2025	Melakukan perencanaan inspeksi sesuai dengan brekdown renlak perbulan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dimasing-masing komoditi supaya capaian tidak melebihi 110% dan memperhatikan timeline SIPT dan kesesuaian tindak lanjut sarana dengan juknis/pedoman TL	TW IV	

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	Terdapat 1 laporan inspeksi sarana yang belum dilaporkan melalui SIPT	Monev pelaporan melalui SIPT segera setelah selesai melakukan pemeriksaan sarana	TW IV		Melaporkan hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan yang belum dilaporkan melalui SIPT	TW IV	Semua laporan telah dilaporkan ke SIPT sesuai timeline
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan		Konsisten dengan realisasi perencanaan untuk mencapai target	TW IV		Memperhatikan realisasi dan target yang ditetapkan supaya capaian baik/sangat baik	TW IV	Capaian indikator kinerja tidak dapat disimpulkan (>110%)
		Capaian realisasi tidak dapat disimpulkan	Mengusulkan kenaikan target	TW II	Mengusulkan revisi target ke unit pengampu menjadi 92.4% supaya capaian masuk kriteria sangat baik			Usulan kenaikan target telah disetujui di tahun 2025 target dari 88 menjadi 92,4
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan pengawasan dilakukan hanya pada 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang berada diwilayah kerja	- melakukan efisiensi perjadin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan-meningkatkan pembinaan dan pengawasan produk pangan fortifikasi yang beredar di Provinsi Kalimantan Tengah	TW I	Efisiensi perjadin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan	-	-	pengawasan terlaksana sesuai juknis dengan metode Luring

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" merupakan lanjutan penilaian Indikator Kinerja terkait Standar Kemampuan Laboratorium pada periode renstra sebelumnya yaitu "Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP". Namun kedua indikator ini mempunyai cara perhitungan dan formula yang berbeda yang terletak pada baseline perhitungan serta persentase komposisi penilaian yang dimana sebelumnya dihitung menggunakan rata-rata namun pada tahun 2025 perhitungan menggunakan proporsi penilaian yang berbeda pada masing-masing komponen. Nilai realisasi indikator "Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP" pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,57 % dengan capaian 102,49 % telah mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan.	Diperlukan strategi untuk mencapai target indikator dengan menyusun perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengendalikan faktor-faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator.	TW I-TW IV	1. Pembuatan roadmap pemenuhan SKL tahun 2025 2. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW 1 3. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW 2	1. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW II-TW IV	TW II-TW IV	Nilai realisasi indikator pada TW 1 sebesar 75 telah mencapai target triwulan I sebesar 69,5 dengan capaian 107,91 dan telah melampaui target tahunan sebesar 72,5 dengan Capaian 103,45 %

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Realisasi melampaui target dengan kriteria sangat baik	1. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025. 2. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41,4%), media social (13,9%), dan webinar/daring (9,5%)	TW IV	1. Menyusun perencanaan KIE sesuai dengan Juknis KIE tahun 2025 2. Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE triwulan I tahun 2025 (nilai: 89,83)	1. Melakukan pengukuran tingkat efektivitas KIE secara berkala 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIE secara berkala 3. Meningkatkan social media management melalui konten yang menarik dan selaras dengan Agenda Setting 2025 4. Melaksanakan KIE dan menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, influencer, dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik. 5. Meningkatkan penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan tagline “bukan kata orang pastikan kataBPOM”	TW IV	1. Telah tersusun rencana KIE Tahun 2025 2. Telah dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Triwulan I 3. Telah dilaksanakan KIE dan publikasi media sosial sesuai dengan agenda setting 2025 periode Januari - Maret 2025
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap TW 1 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap TW 2	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi TW I mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap TW 12. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap TW 2	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi TW I mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap TW 1 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap TW 2	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi TW I mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
18	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. adanya carry over pendampingan UMKM Kosmetik dari tahun sebelumnya 2. perubahan tahapan pendampingan UMKM Pangan Olahan	Mengikuti Sosialisasi Juknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan	TW IV	Melanjutkan pendampingan UMKM kosmetik yang carry over dari tahun sebelumnya	melaksanakan tahapan pendampingan yang terlompati	TW IV	1. Telah terlaksananya pendampingan UMKM kosmetik sesuai juknis 2. telah terlaksananya tahapan pendampingan sesuai juknis

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Belum adanya Informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bernilai A1 untuk di Tindak Lanjuti 2. Tindak Lanjut Informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan gagal saat dilakukan Operasi penindakan 3. Capaian indikator penyidikan TW 1 terkait penanganan perkara melebihi target TW 1	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan pihak2 lain, dalam menentukan cara bertindak yang lebih terukur, waspada, dan sesuai prosedur untuk menjamin keberhasilan operasi serta keselamatan personel di lapangan terutama ketika informasi menunjukkan bahwa target operasi merupakan seorang residivis, 3. Monev laporan Kemajuan Penyidikan	TW IV	-	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan pihak2 lain 3. Monev laporan Kemajuan Penyidikan rutin	TW IV	Telah tercapai 1 (satu) perkara dan telah sampai tahap 2 pada akhir TW 1 tahun 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		bahan keterangan pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan minim info dan belum A1	1. Peningkatan kegiatan/operasi intelijen dalam pulbaket informasi terkait pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan APH Lain nya dan instansi lain pengemban fungsi intelijen dalam upaya [pengumpulan bahan keterangan dan pengungkapan tindak pidana bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Tengah 3. Pembentukan, pembinaan jaringan intelijen sediaan farmasi dan pangan olahan	TW IV		1. Menyusun kalender kegiatan operasi intelijen minimal 1 kali per bulan di wilayah rawan peredaran produk ilegal 2. Menyusun laporan hasil kegiatan operasi intelijen setiap operasi dan evaluasinya dalam rapat tim dan Ka Balai setiap akhir bulan 3. Menjadwalkan pertemuan/koordinasi lintas sektoral (APH dan intelijen) dalam pertukaran informasi intelijen 4. Mengidentifikasi dan merekrut orang mitra/jaringan intelijen dari masyarakat, profesi, atau pelaku usaha.	TW III s.d. TW IV	1. Telah dilaksanakan kegiatan/operasi intelijen pada wilayah rawan peredaran produk ilegal 2. Telah dilaksanakan rapat evaluasi hasil kegiatan/operasi intelijen sd bulan Juni 2025 3. telah dilakukan komunikasi/koordinasi dengan APH dan intelijen lintas sektor guna pertukaran informasi intelijen 4. Telah dilakukan pembentukan jaringan intelijen dari masyarakat dan pelaku usaha
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Kualitas hasil Patroli Siber oleh Tim Patber Lintas Fungsi tidak semuanya memenuhi standar yang ditetapkan	dilakukan monitoring dan reviu secara berkelanjutan terhadap hasil patroli siber	TW IV	-	Monev dan reviu secara rutin dari hasil Patroli Siber	TW IV	Telah tercapai hasil patroli siber sesuai standar yang ditetapkan sd akhir TW 1 tahun 2025
		Tidak semua hasil Patroli Siber bisa langsung dilakukan takedown oleh Komdigi atau idEA melalui dit Siber Obat dan Makanan BPOM	Monev berkelanjutan hasil patber	TW IV	Melakukan reviu terhadap target platform patroli siber dan monev terhadap pencapaian hasil patber		TW III s.d. TW IV	1. Telah dilakukan reviu terhadap hasil laporan patroli siber yang dilaporkan ke Dit Siber 2. Telah dilakukan perubahan target dan variasi platform patroli siber

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		Pelaporan link/akun yang teridentifikasi melakukan pelanggaran di bidang kesehatan/perlindungan konsumen sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan	Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala pada hasil patroli siber guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di media daring.	TW IV	1. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi hasil patroli siber secara rutin setiap akhir periode patroli siber bulan berjalan.2. Mengarsipkan seluruh hasil Monev dan dokumentasi tindak lanjut ke dalam sistem digital aplikasi internal yang dapat di akses seluruh anggota tim patroli siber		TW III s.d. TW IV	1. Telah dilakukan monev terhadap hasil patber sebelum dilakukan pelaporan ke Dit Siber BPOM melalui aplikasi : inawebcrawler.id2. Seluruh hasil Monev laporan hasil patber anggota tim patber bisa di akses dan dijadikan bahan perbaikan tim patroli siber

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
21	Indeks Pelayanan Publik UPT		1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik 4. Mengembangkan Inovasi Layanan Publik 5. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan	TW IV	1. Melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2025 pada berbagai media (SP dan Maklumat Layanan) pada area layanan publik, media sosial, media luar ruang, dan sub site BBPOM di Palangka Raya 2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan prioritas/kelompok rentan 3. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MMP Target (Kab Barito Selatan, Kab. Pulang Pisau) dan kabupaten potensial lainnya	1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayan publik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoring 2. Melaksanakan pemberdayaan kelompok rentan melalui pembentukan kader, fasilitator UMKM dan KIE	TW IV	1. Telah terlaksana pengukuran SPAK, SPKP dan SKM mandiri Triwulan I dan telah dipublikasikan 2. Telah terlaksana sosialisasi SP Tahun 2025 pada kanal resmi BBPOM di Palangka Raya 3. Ruang Pelayanan Publik sedang dalam proses renovasi.

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		1. Implementasikan Road Map RB utk TW II 2025 2. Implementasikan Road Map AOC utk TW II 2025	TW IV	1. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas di tiap Pokja 2. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas oleh AoC 3. Survei dalam rangka menjangring minat pegawai terkait pokja yang diminati dan diharapkan mampu berkontribusi aktif	1. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas di tiap Pokja 2. Penetapan road map dan penyusunan rencana kerja prioritas oleh AoC 3. Survei dalam rangka menjangring minat pegawai terkait pokja yang diminati dan diharapkan mampu berkontribusi aktif mengimplementasikan ZI 4. Bimtek Implementasi Zona Integritas dengan narasumber Inspektorat Badan POM 5. Pengisian mandiri LKE ZI dan pemenuhan data dukungnya	TW IV	Tercapainya target Nilai pembangunan ZI dan telah disiapkan kan rencana untuk implemenasi WBBK tahun 2026
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Laporan evaluasi internal masih belum sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut masih belum selaras antara simetris, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja3. Belum semua SDM yang terlibat SAKIP mengikuti pelatihan implementasi SAKIP	1. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 20242. Memperbaiki kualitas pelaksanaan akuntabilitas Balai3. Perencanaan pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP	TW III	1. Pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP2. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 20243. Penyusunan lakip interim tw I 20254. Finalisasi tindak lanjut evaluasi SAKIP 2024	1. Persiapan penilaian indikator AKIP 2025 melalui SAPA APIP	TW III	rencana aksi yang dicanangkan pada triwulan I yaitu pengembangan kompetensi tim SDM telah tercapai

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		1. Renstra 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan draft 2. masih terdapat penambahan IKU baru 3. masih terdapat pengukuran IKU yang belum sesuai dengan manual IKU 4. masih belum lengkap data link pengolahan raw data dari fungsi teknis 5. rapat evaluasi internal dilaksanakan setiap 3 bulan	1. Penyusunan Draft Renstra Unit 2025-2029 2. desk pengukuran capaian pada IKU yang belum sesuai dengan manual IKU	TW IV		1. Penyusunan Draft Renstra Unit 2025-2029 2. desk pengukuran capaian pada IKU yang belum sesuai dengan manual IKU	TW IV	
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT	blokir anggaran perjadi, belanja barang dan belanja modal dalam rangka efisiensi anggaran	efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, perubahan sampling dan pengujian, digitalisasi	TW IV	perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, digitalisasi	pengawasan RPD halaman III DIPA, pengawasan pencapaian target output dan pengawasan pengelolaan UP dan TUP	TW IV	rencana aksi yang dicanangkan selesai pada triwulan IV
25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	Daftar risiko disusun sebelum penetapan PK 2025, cascading IKU pusat ke Balai dan IKU Direktif	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	TW II	1. Reviu Daftar Risiko awal tahun 2. cascading IKU ke seluruh pegawai			
		1. Daftar risiko belum dimutakhirkan 2. Seluruh pegawai belum menerima cascading aktivitas pengendalian risiko	Dilakukan pemutakhiran daftar risiko dan penurunan peran pengendalian risiko bagi seluruh pegawai	TW IV	1. Revisi SKP seluruh pegawai dengan peran aktivitas pengendalian risiko	1. Pemutakhiran daftar risiko secara berkala	TW IV	

3.3 Realisasi Anggaran

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 7 (tujuh) kali Revisi DIPA, terdiri dari 3 Revisi kewenangan KPA, 1 Revisi Kewenangan Kanwil dan 3 Revisi Kewenangan DJA sebagai berikut :

- Revisi pertama kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian anggaran dengan rencana kegiatan di tahun 2025.
- Revisi kedua kewenangan DJA dalam rangka Revisi Efisiensi Belanja BPOM Tahun Anggaran 2025. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Sekretaris Utama BPOM no B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 tanggal 04 Februari 2025. Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan Blokir anggaran mandiri senilai Rp Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola menjadi Rp 14.035.291.000,-
- Revisi ketiga kewenangan KPA dalam rangka penambahan anggaran untuk pembayaran gaji PPNN di tahun 2025.
- Revisi keempat Kewenangan DJA dalam rangka pemenuhan sesuai gaji PPNN dan Realokasi anggaran Reagensia dari Sediaan farmasi ke Pangan Rp 50.000.000,- Revisi anggaran dalam KRO yang sama sehingga tidak mempengaruhi total pagu.
- Revisi kelima Kewenangan DJA dalam rangka relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025, diusulkan buka blokir anggaran untuk 7 Rincian Output yang mendukung teknis kinerja pengawasan obat dan makanan dengan nilai relaksasi blokir senilai Rp 3.194.209.000,-

Pada akhir triwulan 2 tahun 2025 pagu yang dikelola Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 4.898.808.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 17.229.500.000,-

Program	Pagu Anggaran	Blokir anggaran	Pagu Aktif	Realisasi Anggaran	Persentase terhadap Pagu Awal	Persentase terhadap Pagu Aktif
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.026.074.000	3.254.742.000	8.771.332.000	5.211.630.119	43,34%	59,42%
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.102.234.000	1.644.066.000	8.458.168.000	4.303.472.442	42,60%	50,88%
Total	22.128.308.000	4.898.808.000	17.229.500.000	2.639.937.396	43%	55,23%

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2025 adalah Rp 4.303.472.442,- yang berarti 43% dari pagu awal dan 55.23% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya

Berikut realisasi anggaran per jenis belanja BBPOM di Palangka Raya sampai dengan triwulan 2 tahun 2025.

Jenis Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu Awal	5.530.734.000	10.694.106.000	5.903.468.000
Realisasi	2.663.004.670	2.337.824.371	4.509.736.470
Capaian	48%	22%	76%

Strategi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

- i. Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
- ii. Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.
- iii. Memastikan target tercapai dengan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil kerja output dan pengeluaran anggaran. Sehingga dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah yang bisa menghambat pencapaian target.
- iv. Dengan adanya anggaran yang direlaksasi maka dapat dilakukan upaya sharing anggaran kepada Rincian Output yang anggarannya masih diblokir, agar dapat memaksimalkan capaian output dan capaian realisasi anggaran.

B. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Output

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya didukung dengan 22 Rincian Output dan berikut hasil pengukuran realisasi output dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan 2 tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output			Anggaran				
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	d	e	f = e/d	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6	6	100,00%	72.439.000	600.000	100.000	16,67%	0,14%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	295	405	137,29%	145.537.000	11.200.000	1.280.000	11,43%	0,88%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	426	762	178,87%	193.733.000	41.385.000	36.255.000	87,60%	18,71%
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*	52,31%	52,31%	100,00%	736.000.000	79.222.853	88.230.378	111,37%	11,99%
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	13	18	138,46%	78.895.000	6.831.600	4.716.200	69,04%	5,98%
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1,00	100,00%	150.000.000	148.015.000	148.217.000	100,14%	98,81%
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	100,00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	44,68%	47,06%	105,33%	1.707.506.000	524.815.900	128.307.133	24,45%	7,51%
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	2	1	50,00%	358.335.000	179.167.500	72.659.500	40,55%	20,28%
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	35,00%	50,00%	142,86%	344.372.000	21.495.000	22.937.000	106,71%	6,66%
11	QDB.002 Desa Pangan Aman*	70,00%	70,00%	100,00%	501.455.000	23.145.000	9.553.389	41,28%	1,91%
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya*	70,00%	80,00%	114,29%	137.071.000	14.700.000	10.299.383	70,06%	7,51%
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	48	106,67%	41.950.000	4.300.000	4.294.280	99,87%	10,24%
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	55,00%	62,33%	113,33%	43.762.000	3.500.000	5.780.000	165,14%	13,21%
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	154	154	100,00%	447.082.000	205.752.715	89.220.698	43,36%	19,96%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output			Anggaran				
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	d	e	f = e/d	h	i	j	k=j/i	l=j/h
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	381	383	100,52%	768.855.000	184.861.940	125.719.725	68,01%	16,35%
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	19	21	110,53%	20.688.000	12.768.000	12.065.666	94,50%	58,32%
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	100,00%	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00%	100,00%
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	119	123	103,36%	402.118.000	86.452.125	86.267.297	99,79%	21,45%
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	91,12	1	1,10%	5.772.068.000	4.261.522.000	4.261.519.470	100,00%	73,83%
21	EBA.956 Layanan BMN*	49,98%	49,98%	100,00%	8.000.000	707.100	107.100	15,15%	1,34%
22	EBA.994 Layanan Perkantoran*	49,98%	49,98%	100,00%	10.094.234.000	3.965.431.884	4.303.365.342	108,52%	42,63%

C. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Kinerja

Balai Besar POM di Palangka Raya dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 memiliki 25 Indikator Kinerja berikut pencapaian Kinerja dan Anggaran di Triwulan 2 tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Outcome				Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c		d	e	f=(e/dx100)	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	90,38	103,59	718.855.000	184.861.940	125.719.725	68,01	17,49
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Belum ada target bulan ini	41.950.000	4.300.000	4.294.280	99,87	10,24
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,24	115,58	243.541.000	86.779.658	38.829.469	44,74	15,94
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100,00	10.000.000	32.193.400	11.561.760	35,91	115,62
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,29	108,58	243.541.000	86.779.658	38.829.469	44,74	15,94
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72,22	100,31	22.332.000	30.252.500	30.888.556	102,10	138,32
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	100	114,94	10.344.000	6.384.000	6.032.833	94,50	58,32
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan	80	87,04	108,80	10.344.000	6.384.000	6.032.833	94,50	58,32

No	Sasaran Kegiatan	Outcome				Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c		d	e	f=(e/dx100)	h	i	j	k=j/i	l=j/h
			yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	99,25	134,34	189.165.500	22.778.313	26.361.871	115,73	13,94
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	112,50	189.165.500	22.778.313	26.361.871	115,73	13,94
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99,92	113,55	1.455.000	10.643.000	2.655.000	24,95	182,47
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00	100,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71	75,3	106,06	7.479.574.000	4.786.337.900	4.389.826.603	91,72	58,69
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	91,88	105,38	272.628.000	48.216.600	40.971.200	84,97	15,03
		15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	35	50	142,86	344.372.000	21.495.000	22.937.000	106,71	6,66

No	Sasaran Kegiatan	Outcome				Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c		d	e	f=(e/dx100)	h	i	j	k=j/i	l=j/h
		16	Jumlah desa pangan aman	70	70	100,00	501.455.000	23.145.000	9.553.389	41,28	1,91
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	80	114,29	137.071.000	14.700.000	10.299.383	70,06	7,51
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	61	62,33	102,18	43.762.000	3.500.000	5.780.000	165,14	13,21
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38	33,33	87,71	358.335.000	179.167.500	72.659.500	40,55	20,28
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	72.439.000	600.000	100.000	16,67	0,14
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	Belum ada target bulan ini	145.537.000	11.200.000	1.280.000	11,43	0,88
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	8.994.600.900	3.455.237.035	3.621.622.199	104,82	40,26
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	87.373.400	90.000	1.505.160	1.672,40	1,72

No	Sasaran Kegiatan	Outcome				Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c		d	e	f=(e/dx100)	h	i	j	k=j/i	l=j/h
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	1.876.549.600	837.959.803	1.015.287.302	121,16	54,10
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	129.710.100	90.000	1.505.160	1.672,40	1,16

D. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain, efisiensi tercapai jika persentase capaian output sama atau lebih tinggi daripada persentase capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

1) Pengukuran Efisiensi Output

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	16,67%	6,00	5,00	75% (tidak efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	137,29%	11,43%	12,01	11,01	75% (tidak efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	178,87%	87,60%	2,04	1,04	86% (tidak efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	111,37%	0,90	-0,10	Tidak Efisien
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	138,46%	69,04%	2,01	1,01	86% (tidak efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00%	100,14%	1,00	0,00	Tidak Efisien
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	105,33%	24,45%	4,31	3,31	75% (tidak efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	50,00%	40,55%	1,23	0,23	95% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	142,86%	106,71%	1,34	0,34	95% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00%	41,28%	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	114,29%	70,06%	1,63	0,63	90% (efisien)
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	106,67%	99,87%	1,07	0,07	100% (efisien)
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	113,33%	165,14%	0,69	-0,31	Tidak Efisien
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	43,36%	2,31	1,31	84% (tidak efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,52%	68,01%	1,48	0,48	92% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	110,53%	94,50%	1,17	0,17	100% (efisien)
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	103,36%	99,79%	1,04	0,04	100% (efisien)
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,10%	100,00%	0,01	-0,99	Tidak Efisien
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00%	15,15%	6,60	5,60	75% (tidak efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00%	108,52%	0,92	-0,08	Tidak Efisien

Berdasarkan hasil pengukuran 22 (dua puluh dua) RO telah melaksanakan kegiatannya, 7 (tujuh) RO telah masuk dalam kriteria efisien dan 17 (lima belas) RO lainnya masuk dalam kriteria tidak efisien. Untuk pengukuran efisiensi output BBPOM Palangka raya di Triwulan 2 ini berdasarkan hasil rata-rata dari capaian efisiensi setiap RO didapat nilai **1,37 dan masuk dalam kriteria 84% tidak efisien**. Secara umum penyebab suatu RO masuk dalam kriteria Tidak efisien adalah karena capaian anggaran yang digunakan lebih besar dari output yang dihasilkan atau karena capaian anggaran yang digunakan jauh lebih kecil untuk mencapai output, dari RO yang tidak efisien tersebut 10 (sepuluh) RO masuk kategori tidak efisien karena capaian outputnya lebih besar dari capaian anggarannya. 5 (lima) RO masuk kriteria tidak efisien karena capaian output lebih rendah dari capaian anggarannya, diantaranya adalah :

- BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT
- CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT
- RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice
- EBA.994 Layanan Perkantoran

Lima RO diatas capaian outputnya lebih dari 100 hanya saja capaian anggarannya lebih tinggi, hal ini menandakan perencanaan dalam penggunaan anggarannya belum sesuai untuk mencapai target output yang ditetapkan. Jadi untuk kedepannya diperlukan perencanaan target penyerapan anggaran yang lebih baik lagi.

2) Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,59	68,01	1,52	0,52	92% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	99,87	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115,58	44,74	2,58	1,58	80% (tidak efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	35,91	2,78	1,78	78% (tidak efisien)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,58	44,74	2,43	1,43	80% (tidak efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,31	102,10	0,98	-0,02	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,94	94,50	1,22	0,22	95% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,80	94,50	1,15	0,15	100% (efisien)
9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	134,34	115,73	1,16	0,16	100% (efisien)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112,50	115,73	0,97	-0,03	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	113,55	24,95	4,55	3,55	75% (tidak efisien)
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	106,06	91,72	1,16	0,16	100% (efisien)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,38	84,97	1,24	0,24	95% (efisien)
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	142,86	106,71	1,34	0,34	95% (efisien)
16	Jumlah desa pangan aman	100,00	41,28	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	114,29	70,06	1,63	0,63	90% (efisien)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	102,18	165,14	0,62	-0,38	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	87,71	40,55	2,16	1,16	86% (tidak efisien)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	16,67	6,00	5,00	75% (tidak efisien)
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	11,43	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	104,82	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	1.672,40	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	121,16	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	1.672,40	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang tingkat efisiensi adalah dari - 0,38 hingga 5 dari 25 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya. 19 (Sembilan belas) Indikator telah dapat diukur efisiensinya sedangkan 6 (enam) lainnya belum dapat diukur karena capai kinerja baru diukur diakhir tahun. Untuk upaya efisiensi yang dilakukan per Indikator dibahas dalam Bab 3.1 masing-masing Indikator Kinerja.

3) Pengukuran Efisiensi per Sasaran Kegiatan

Pengukuran efisiensi per sasaran kegiatan dilakukan dengan merata-rata capaian efisiensi Indikator kinerja dalam sasaran kegiatannya, hasil pengukuran untuk efisiensi per sasaran kegiatan di BBPOM Palangka raya pada triwulan 2 ini sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0,94	88% (efisien)
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	0	100% (efisien)
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0,16	100% (efisien)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	0,66	90% (efisien)
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	-0,38	Tidak Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1,16	86% (tidak efisien)
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	5	75% (tidak efisien)
8	Layanan Publik UPT yang prima	belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan 2 Tahun 2025 diukur dengan 9 sasaran kegiatan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,38 sampai 5 dan dari rata-rata per sasaran kegiatan ini capaian efisiensi untuk BBPOM Palangka raya di Triwulan 2 ini adalah **1,08 dan masuk dalam kriteria 86% tidak efisien**. Berikut analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan dengan indikator kinerja :

- I. Sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” terdiri atas 11 Indikator kinerja, 10 Indikator kinerja telah dapat dinilai efisiensinya dan 1 indikator kinerja belum dapat dinilai. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini capaian efisiensinya adalah 0.94 dan masuk dalam kriteria efisien, namun dari 10 indikator kinerja yang dapat diukur tingkat efisiensinya 6 indikator tidak efisien. Secara umum penyebab tidak efisien indikator kinerja tersebut adalah capaian realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan capaian kinerjanya. Alokasi anggaran sasaran kegiatan ini adalah Rp 1.680.693.000 dengan blokir anggaran RP 37.650.000 sehingga pagu aktif yang dikelola menjadi Rp 1.643.043.000.
- II. Sasaran kegiatan 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi” pagu anggaran Rp 4.208.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di triwulan 1 dengan capain 100% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang digunakan.
- III. Sasaran kegiatan 3 “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 7.479.574.000, dengan blokir anggaran Rp 1.504.068.000 sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 5.975.506.000 terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di bulan ini dengan capain 106.06% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini efisien dimana output yang dihasilkan lebih

kecil dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 4.389.826.603.

- IV. Sasaran kegiatan 4 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 1.255.526.000. dengan Blokir anggaran Rp 1.054.344.000. sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 201.182.000. terdiri atas 4 indikator kinerja dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dengan Tingkat Efisiensi 0,66 dimana Output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 83.760.972.
- V. Sasaran kegiatan 5 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pagu anggaran Rp 43.762.000,- dengan blokir anggaran Rp 36.162.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 7.600.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dengan capaian kinerja 107,91% untuk pengukuran efisiensi belum dapat dilakukan karena belum ada anggaran yang digunakan dalam mencapai output. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 5.780.000 dan realisasi ini telah melebihi target realisasi anggaran dengan capaian 165,14% sehingga berdasarkan pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini tidak efisien dimana capaian kinerja lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggarannya.
- VI. Sasaran kegiatan 6 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 358.335.000 terdiri atas 1 Indikator Kinerja dengan capaian kinerja triwulan 2 ini 87,71.17% dan capaian realisasi anggaran 40,55% sehingga berdasarkan pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini tidak efisien dimana capaian kinerja jauh lebih besar dari capaian realisasi anggarannya.
- VII. Sasaran kegiatan 7 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” pagu anggaran Rp 72.439.000,- dengan blokir anggaran Rp 71.339.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 1.100.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja pengukuran efisiensi untuk indikator kinerja ini menunjukkan hasil tidak efisien, berdasarkan hasil analisis capaian target kinerja telah sesuai target namun realisasi anggaran yang tidak mencapai target, dengan capaian hanya 16,67%. Hal ini mengakibatkan indeks capaian efisiensi lebih dari 1 perencanaan dalam penetapan rencana penarikan dana yang menjadi target realisasi anggaran di triwulan 3 ini perlu diperbaiki sehingga hal ini tidak terulang.
- VIII. Sasaran kegiatan 8 “Layanan Publik UPT yang prima” pagu anggaran Rp 145.537.000,- dengan blokir anggaran Rp 127.812.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 17.725.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan untuk triwulan ini belum dapat dinilai capaiannya karena baru dilakukan penilaian Indikator di akhir tahun. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 1.280.000.
- IX. Sasaran kegiatan 9 “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” pagu anggaran Rp 11.088.234.000,- dengan Blokir anggaran Rp 2.063.433.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 9.024.801.000,- terdiri atas 4 Indikator Kinerja dan belum dapat dinilai capaiannya karena baru dinilai di akhir tahun. untuk realisasi anggaran sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 adalah Rp 4.639.919.821.

BAB

4



Penutup

- Kesimpulan
- Rekomendasi

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Renstra periode 2025-2029. Untuk mencapai tujuan strategis 2025-2029 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pencapaian BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan II Tahun 2025. Dari 25 indikator kinerja, 19 indikator kinerja dapat diukur pada triwulan II, dan 6 indikator kinerja diukur pada akhir tahun. Sembilan belas indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 103.59% dengan kriteria Sangat Baik.
2. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 115.58% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT berhasil tercapai dengan capaian 100.00% dengan kriteria Baik.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 108,58 % dengan kriteria Sangat Baik.
5. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder berhasil tercapai dengan capaian 100,31 % dengan kriteria Sangat Baik.
6. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 114,94% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
7. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 108,80 % dengan kriteria Sangat Baik.
8. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 134,34% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
9. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 112,50% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.
10. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 113,55 % dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
11. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

12. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berhasil tercapai dengan capaian 106,06% dengan kriteria Sangat Baik.
13. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 105,38% dengan kriteria Sangat Baik
14. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berhasil tercapai dengan capaian 142,86% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
15. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
16. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berhasil tercapai dengan capaian 114,29% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
17. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan berhasil tercapai dengan capaian 102,18 % dengan kriteria Sangat Baik.
18. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT belum berhasil tercapai dengan capaian 87,71% dengan kriteria Cukup.
19. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar berhasil tercapai dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

Enam indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT.
3. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
4. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM.
5. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
6. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan II tahun 2025, dari 9 sasaran kegiatan, 7 sasaran kegiatan dapat diukur, dan 2 sasaran kegiatan diukur pada akhir tahun. Tujuh sasaran kegiatan yang dapat diukur, 6 kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 1 kegiatan belum berhasil mencapai target. Tujuh sasaran kegiatan yang dapat diukur adalah sebagai berikut :

20. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai, dengan capaian 111.22% yang diukur dengan 11 indikator. Satu indikator diukur pada akhir tahun, 10 indikator dapat diukur. Dari 10 indikator yang dapat diukur, 4 indikator dapat dicapai dengan kriteria sangat baik, 1 indikator tercapai dengan kriteria Baik, 5 indikator dapat dicapai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

21. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.
22. Sasaran Kegiatan Ketiga, Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 106.06% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
23. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT berhasil tercapai dengan capaian 115.63% yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, 1 indikator tercapai dengan kriteria baik, dan 2 Indikator dengan capaian tidak dapat disimpulkan
24. Sasaran Kegiatan Kelima, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu berhasil tercapai dengan capaian 102.18% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
25. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT tidak berhasil tercapai dengan capaian 87.71% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
26. Sasaran Kegiatan Ketujuh, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif berhasil tercapai dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.

Dua Sasaran Kegiatan yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang prima.
2. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Dari hasil pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Palangka Raya adalah 104.87 dengan Predikat NKO Istimewa.

Pada akhir triwulan 2 tahun 2025 pagu yang dikelola Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 4.898.808.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 17.229.500.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 2 tahun 2025 adalah Rp 4.303.472.442,- yang berarti 43% dari pagu awal dan 55.23% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi secara keseluruhan Tingkat Efisiensi BBPOM Palangka Raya adalah **1.08** dengan kriteria capaian **tidak efisien** yang berarti capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran.

B. Rekomendasi.

BBPOM di Palangka Raya telah menunjukkan kinerja yang istimewa pada Triwulan II tahun 2025, yang merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2025-2029. Dari 25 indikator kinerja yang ditetapkan, 19 di antaranya dapat diukur pada triwulan ini. Secara keseluruhan, 7 dari 9 sasaran kegiatan telah terukur, dengan 6 sasaran berhasil mencapai target dan 1 sasaran belum tercapai.

Untuk capaian kinerja yang perlu ditingkatkan adalah Indikator kinerja Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, ini belum mencapai target yang ditetapkan, mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi yang lebih efektif dalam upaya penindakan.

Efisiensi Anggaran meskipun capaian kinerja secara keseluruhan sangat baik, tingkat efisiensi anggaran dinilai tidak efisien. Realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 43% dari pagu awal dan 55.23% dari pagu aktif, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran. Adapun yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang lebih baik lagi dengan menyesuaikan penetapan target dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara keseluruhan, BBPOM di Palangka Raya menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dengan mayoritas sasaran dan indikator kinerja menunjukkan hasil yang positif. Namun, perbaikan dalam efisiensi anggaran dan strategi penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan perlu menjadi fokus untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.



Lampiran

- Lampiran

Lampiran

A. Perjanjian Kinerja tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI YUDHI HARTANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya  ALI YUDHI HARTANTO	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  TARUNA IKRAR
--	--

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan DBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPQB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 02 - Nilai AKIP UPT BPOM 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	87.83 83.87 5 3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 22.128.308.000 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.028.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.102.234.000

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

B. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi bertsko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan bertsko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000
		04 - Persentase sampel KLS heracunian pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,842,000
		05 - Persentase sampel PRT bertsko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51,722,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,344,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10,344,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163,552,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163,552,750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dilaksanakan sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan diinspeksi sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	372,628,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	80	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8.5	19	29.5	29.5	55	65	78	85.5	90.5	96.5	82.8	43,762,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	28	33	39	52	62	67	72	85	96	358,335,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,439,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT											4,7	145,537,000	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM											87,83	9,001,834,500	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM											83,87	83,990,550	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	1,867,427,650	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM											3	134,881,300	
Total														22,125,308,000	

Palangka Raya, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya


ALI YULHE HARTANTO

C. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Revisi RAPK ke-1)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/RSO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	704,620,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,842,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51,722,360
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,344,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10,344,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163,552,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163,552,750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dilawati sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan dindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	03 - Mengurangi Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	8719	272,628,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan CBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOS pangan olahan	1	8.5	19	31.67	47	61	73	78	87	91	92	82.8	43,762,000
6.	06 - Terlaksananya Perindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	33.33	33.33	38	51	61	71	85	95	96	358,335,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,439,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARJET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145,537,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,83	9,001,834,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,87	83,990,550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,867,437,650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134,981,300

Palangka Raya, 12 June 2025

Kepala Balai Besar PCM di Palangka Raya


Adi Yudi Hariantio

D. Pengukuran Capaian Output triwulan 2 tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	6	100,00%	42,86%	72.439.000	600.000	100.000	16,67%	0,14%
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	510	295	405	137,29%	79,41%	145.537.000	11.200.000	1.280.000	11,43%	0,88%
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	426	762	178,87%	140,85%	193.733.000	41.385.000	36.255.000	87,60%	18,71%
4	<i>BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*</i>	1	52,31%	52,31%	100,00%	52,31%	736.000.000	79.222.853	88.230.378	111,37%	11,99%
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	13	18	138,46%	72,00%	78.895.000	6.831.600	4.716.200	69,04%	5,98%
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	1,00	100,00%	100,00%	150.000.000	148.015.000	148.217.000	100,14%	98,81%
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	8	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	100,00%
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	44,68%	47,06%	105,33%	47,06%	1.707.506.000	524.815.900	128.307.133	24,45%	7,51%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	2	1	50,00%	33,33%	358.335.000	179.167.500	72.659.500	40,55%	20,28%
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	8	35,00%	50,00%	142,86%	6,25%	344.372.000	21.495.000	22.937.000	106,71%	6,66%
11	QDB.002 Desa Pangan Aman*	3	70,00%	70,00%	100,00%	23,33%	501.455.000	23.145.000	9.553.389	41,28%	1,91%
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya*	1	70,00%	80,00%	114,29%	80,00%	137.071.000	14.700.000	10.299.383	70,06%	7,51%
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	48	106,67%	106,67%	41.950.000	4.300.000	4.294.280	99,87%	10,24%
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	13	55,00%	62,33%	113,33%	4,79%	43.762.000	3.500.000	5.780.000	165,14%	13,21%
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	154	154	100,00%	34,92%	447.082.000	205.752.715	89.220.698	43,36%	19,96%
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	985	381	383	100,52%	38,88%	768.855.000	184.861.940	125.719.725	68,01%	16,35%
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	19	21	110,53%	80,77%	20.688.000	12.768.000	12.065.666	94,50%	58,32%
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100,00%	100,00%	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00%	100,00%

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c	d	e	f = e/d	g = e/c	h	i	j	k=j/i	l=j/h
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	336	119	123	103,36%	36,61%	402.118.000	86.452.125	86.267.297	99,79%	21,45%
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	91,12	1	1,10%	100,00%	5.772.068.000	4.261.522.000	4.261.519.470	100,00%	73,83%
21	EBA.956 Layanan BMN*	1	49,98%	49,98%	100,00%	49,98%	8.000.000	707.100	107.100	15,15%	1,34%
22	EBA.994 Layanan Perkantoran*	1	49,98%	49,98%	100,00%	49,98%	10.094.234.000	3.965.431.884	4.303.365.342	108,52%	42,63%

E. Pengukuran Capaian Kinerja triwulan 2 tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c			d	e	f=(e/dx100)	g	h	i	j	k=j/i	l=j/h
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	90,38	103,59	103,59	718.855.000	184.861.940	125.719.725	68,01	17,49
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	0	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	41.950.000	4.300.000	4.294.280	99,87	10,24
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	98,24	115,58	115,58	243.541.000	86.779.658	38.829.469	44,74	15,94
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100,00	100,00	10.000.000	32.193.400	11.561.760	35,91	115,62
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,29	108,58	108,58	243.541.000	86.779.658	38.829.469	44,74	15,94
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	72	72,22	100,31	85,98	22.332.000	30.252.500	30.888.556	102,10	138,32
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	100	114,94	114,94	10.344.000	6.384.000	6.032.833	94,50	58,32
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	87,04	108,80	108,80	10.344.000	6.384.000	6.032.833	94,50	58,32

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c			d	e	f=(e/dx100)	g	h	i	j	k=j/i	l=j/h
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	99,25	134,34	134,34	189.165.500	22.778.313	26.361.871	115,73	13,94
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	90	112,50	112,50	189.165.500	22.778.313	26.361.871	115,73	13,94
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	99,92	113,55	113,55	1.455.000	10.643.000	2.655.000	24,95	182,47
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100,00	100,00	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00	100,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	71	75,3	106,06	103,86	7.479.574.000	4.786.337.900	4.389.826.603	91,72	58,69
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	87,19	91,88	105,38	105,38	272.628.000	48.216.600	40.971.200	84,97	15,03
		15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	35	50	142,86	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	344.372.000	21.495.000	22.937.000	106,71	6,66
		16	Jumlah desa pangan	3	70	70	100,00	Tidak dapat	501.455.000	23.145.000	9.553.389	41,28	1,91

No	Sasaran Kegiatan	Outcome						Anggaran					
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c			d	e	f=(e/dx100)	g	h	i	j	k=j/i	l=j/h
			aman					dibandingkan karena satuan berbeda					
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70	80	114,29	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	137.071.000	14.700.000	10.299.383	70,06	7,51
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82,8	61	62,33	102,18	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	43.762.000	3.500.000	5.780.000	165,14	13,21
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	38	33,33	87,71	34,72	358.335.000	179.167.500	72.659.500	40,55	20,28
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55,56	72.439.000	600.000	100.000	16,67	0,14
8	Layanan Publik UPT yang	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	0	0	Belum ada target	Penilaian dilakukan	145.537.000	11.200.000	1.280.000	11,43	0,88

No	Sasaran Kegiatan	Outcome							Anggaran				
		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Capaian thd Target Tahunan	Pagu Tahun 2025	Target Realisasi Anggaran Triwulan II	Realisasi Anggaran sd Triwulan II	Capaian triwulan II	Capaian thd Pagu Tahun 2025
a	b	c			d	e	f=(e/dx100)	g	h	i	j	k=j/i	l=j/h
	prima						bulan ini	diakhir tahun					
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,83	0	0	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	8.994.600.900	3.455.237.035	3.621.622.199	104,82	40,26
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	83,87	0	0	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	87.373.400	90.000	1.505.160	1.672,40	1,72
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	1.876.549.600	837.959.803	1.015.287.302	121,16	54,10
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	0	0	Belum ada target bulan ini	Penilaian dilakukan diakhir tahun	129.710.100	90.000	1.505.160	1.672,40	1,16

F. Pengukuran Capaian efisiensi Output triwulan 1 tahun 2025

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	16,67%	6,00	5,00	75% (tidak efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	137,29%	11,43%	12,01	11,01	75% (tidak efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	178,87%	87,60%	2,04	1,04	86% (tidak efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00%	111,37%	0,90	-0,10	Tidak Efisien
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	138,46%	69,04%	2,01	1,01	86% (tidak efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00%	100,14%	1,00	0,00	Tidak Efisien
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	105,33%	24,45%	4,31	3,31	75% (tidak efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	50,00%	40,55%	1,23	0,23	95% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	142,86%	106,71%	1,34	0,34	95% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00%	41,28%	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	114,29%	70,06%	1,63	0,63	90% (efisien)
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	106,67%	99,87%	1,07	0,07	100% (efisien)
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	113,33%	165,14%	0,69	-0,31	Tidak Efisien

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00%	43,36%	2,31	1,31	84% (tidak efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,52%	68,01%	1,48	0,48	92% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	110,53%	94,50%	1,17	0,17	100% (efisien)
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00%	100,00%	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	103,36%	99,79%	1,04	0,04	100% (efisien)
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,10%	100,00%	0,01	-0,99	Tidak Efisien
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00%	15,15%	6,60	5,60	75% (tidak efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00%	108,52%	0,92	-0,08	Tidak Efisien

G. Pengukuran Capaian efisiensi Kinerja triwulan 1 tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,59	68,01	1,52	0,52	92% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	99,87	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115,58	44,74	2,58	1,58	80% (tidak efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	35,91	2,78	1,78	78% (tidak efisien)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,58	44,74	2,43	1,43	80% (tidak efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,31	102,10	0,98	-0,02	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,94	94,50	1,22	0,22	95% (efisien)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108,80	94,50	1,15	0,15	100% (efisien)
9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	134,34	115,73	1,16	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112,50	115,73	0,97	-0,03	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	113,55	24,95	4,55	3,55	75% (tidak efisien)
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e - 1	g
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	106,06	91,72	1,16	0,16	100% (efisien)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105,38	84,97	1,24	0,24	95% (efisien)
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	142,86	106,71	1,34	0,34	95% (efisien)
16	Jumlah desa pangan aman	100,00	41,28	2,42	1,42	80% (tidak efisien)
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	114,29	70,06	1,63	0,63	90% (efisien)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	102,18	165,14	0,62	-0,38	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	87,71	40,55	2,16	1,16	86% (tidak efisien)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	16,67	6,00	5,00	75% (tidak efisien)
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	11,43	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	104,82	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	1.672,40	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	121,16	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	1.672,40	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

H. RHPK Indikator Kinerja triwulan 1 tahun 2025

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari		87,25	100,00	40,00	#DIV/0!	100,00	80,00
Februari		87,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret		87,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
April		87,25	100,00	100,00	100,00	96,83	99,21
Mei		87,25	98,80	87,22	88,33	89,14	90,87
Juni		87,25	98,92	68,99	94,27	99,33	90,38

2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Penilaian dilakukan diakhir tahun

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	35,00	85,00	48,57	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	39,00	85,00	76,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,09
Maret	39,00	85,00	93,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,69
April	38,00	85,00	98,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74
Mei	90,00	85,00	95,66	98,92	98,92	94,62	43,01	100,00	92,47
Juni		85,00	93,28	100,00	100,00	95,80	100,00	100,00	98,24

4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0		
Februari	0	0		
Maret	0	0		
April	100	100		
Mei	100	100		
Juni	100	100		

5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	85,00	100,00	0,00	0,00	100,00	34,29	#DIV/0!
Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00
April	85,00	100,00	100,00	37,14	100,00	34,29	100,00
Mei	85,00	77,14	100,00	54,29	100,00	34,29	100,00
Juni	85,00	97,14	100,00	97,14	100,00	34,29	100,00

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala
Januari	60,00	69,01	0,00	69,01	Terdapat Kesalah input data akan dilakukan revisi Data
Februari	62,00	70,63	0,00	70,63	Terdapat Kesalah input data akan dilakukan revisi Data
Maret	64,00	72,41	0,00	72,41	Terdapat Kesalah input data akan dilakukan revisi Data
April	66,00	69,48	0,00	69,48	Terdapat Kesalah input data akan dilakukan revisi Data
Mei	70,00	72,39	0,00	72,39	Terdapat Kesalah input data akan dilakukan revisi Data
Juni	72,00	44,44	100,00	72,22	

7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	87.04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	87.04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	87.04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
April	87.04	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Mei	87.04	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Juni	87.04	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00

8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	80,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	66,67
Maret	80,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
April	80,00	7,00	7,00	100,00	5,00	7,00	71,43	6,00	7,00	85,71	85,71
Mei	80,00	12,00	12,00	100,00	8,00	12,00	66,67	11,00	12,00	91,67	86,11
Juni	80,00	18,00	18,00	100,00	12,00	18,00	66,67	17,00	18,00	94,44	87,04

9) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari	73,88	95,83	100,00	#DIV/0!	87,50	94,44
Februari	73,88	95,83	100,00	#DIV/0!	87,50	94,44
Maret	73,88	95,45	100,00	100,00	91,67	96,78
April	73,88	90,70	108,75	100,00	101,25	100,18
Mei	73,88	94,87	102,08	100,00	104,71	100,42
Juni	73,88	97,77	93,75	108,33	97,16	99,25

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	80	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	80	2	2	20,00	2	2	70,00	1	2	5,00	95,00
Maret	80	7	7	20,00	5	7	50,00	6	7	8,57	78,57
April	80	13	13	20,00	10	13	53,85	12	13	9,23	83,08
Mei	80	19	19	20,00	16	19	58,95	18	19	9,47	88,42
Juni	80	25	25	20,00	22	25	61,60	21	25	8,40	90,00

11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	98,00
Februari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,21	98,24
Maret	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,07	99,21
April	88,00	100,00	100,00	99,03	100,00	97,77	99,36
Mei	88,00	117,14	100,00	98,62	99,07	98,33	102,63
Juni	88,00	102,98	100,00	98,71	99,12	98,80	99,92

12) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari	0	0	1	0,00
Februari	0	0	1	0,00
Maret	100	1	1	100,00
April	100	1	1	100,00
Mei	100	1	1	100,00
Juni	100	1	1	100,00

13) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

**LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM**

Unit Kerja : BBPOM di Palangkaraya
 Triwulan/Tahun : 2/2025
 Tanggal Penilaian : 23 Juni 2025
 Nama Tim Penilai : 1. Yustina, S.Si., M.Si.
 2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	78.1	75.3	71	106.0
2.	Standar Peralatan	78.6			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	90			
4.	Standar Metode Terverifikasi	25.0			

14) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



15) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi
Januari	0					0,00
Februari	5	5,00				5,00
Maret	5	5,00				5,00
April	35	25,00	12,5			37,50
Mei	35	25,00	25,00			50,00
Juni	35	25,00	25,00			50,00

16) Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	50	25,00	25,00				50,00
Mei	60	25,00	25,00	10,00			60,00
Juni	70	25,00	25,00	20,00			70,00

17) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00
April	25	25,00					25,00
Mei	60	25,00	25,00	10,00			60,00
Juni	70	25,00	25,00	20,00	10,00		80,00

18) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	1,00	3,00	0,00	10,00	6,50
Februari	8,50	6,00	20,00	20,00	15,33
Maret	19,00	10,00	22,50	32,50	21,67
April	29,50	15,00	37,50	42,50	31,67
Mei	39,50	55,00	37,50	52,50	48,33
Juni	61,00	67,00	57,50	62,50	62,33

19) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	3	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	18,33
Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
April	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Mei	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33
Juni	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33

20) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Lampiran
Nota Dinas Direktorat Siber Obat dan Makanan
Nomor : PR.09.02.63.07.25.350
Tanggal : 07 Juli 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi										Nilai Kinerja					
		Patroli Siber					Profiling Siber					B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru											100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
5.	Denpasar											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta											100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
8.	Jayapura											100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
9.	Kupang											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado											100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
12.	Mataram											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang											100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
22.	Surabaya											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta											100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:
■ Tepat Waktu
■ Lewat Waktu

21) Indeks Pelayanan Publik UPT

Penilaian dilakukan diakhir tahun

22) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

23) Nilai AKIP UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

24) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

25) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

Laporan KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya



Interim
Triwulan II
2025

